



LKPJ

Tahun

2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN**



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada akhir tahun anggaran 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2024.

LKPj adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD, dalam kaitan dengan hal ini bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban, khususnya menyangkut lingkup pelaksanaan pembangunan Urusan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Banten selama Tahun Anggaran 2024. Dalam LKPj ini disampaikan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban, mencakup pelaksanaan program/kegiatan, capain kinerja, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dan upaya pemecahan masalahnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen LKPj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 diucapkan terima kasih dan kami harapkan LKPj ini dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Serang, Desember 2024

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten**

**Dr. Wawan Gunawan, S.Sos, M.Si
NIP : 19671217 198803 1006**



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v

I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang	2
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Tujuan dan Sasaran.....	5
1.4	Visi dan Misi.....,	6
1.5	Data Umum /Gambaran Umum Daerah.....	10
	A. Data Geografis dan Potensi Sumberdaya Alam	10
	B. Data PNS/Sumber Daya Manusia (SDM) DLHK Provinsi Banten	13
	C. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Jenis Pendapatan TA 2024	15
	D. Realisasi Belanja TA 2024.....	17

II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1	Perubahan/Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan Perubahan Anggaran Tahun 2024.....	29
2.2	Perubahan Penjabaran Anggaran Melalui Perubahan Anggaran Tahun 2024	29

III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

3.1	Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan.....	45
	A. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran.....	45



B. Capaian Pelaksanaan Kinerja Program	51
C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan	71
D. Realisasi Pendapatan	107
E. Permasalahan dan Solusi.....	107
E. Analis Kesesuaian kegiatan dengan Target Kinerja Program.....	111
3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	118
3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	118
VI Penutup	120



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten	7
Tabel 1.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLHK Provinsi Banten	8
Tabel 1.3	Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten.....	10
Tabel 1.4	Rencana Kawasan Lindung Provinsi Banten Tahun 2010-2030	11
Tabel 1.5	Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Struktura di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	14
Tabel 1.6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	14
Tabel 1.7	Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2024	17
Tabel 1.8	Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2024.....	18
Tabel 1.9	Realisasi Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten Tahun 2024.....	22
Tabel 2.1	Rencana Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2024.....	30
Tabel 2.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan pada Perubahan Renja / Anggaran Tahun 2024.....	31
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.....	45
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024.....	72
Tabel 3.3	Realisasi Target Pendapatan Tahun 2024	107
Tabel 3.4	Kesesuaian dengan target kinerja program DLHK Tahun 2024.....	112
Tabel 3.5	Kebijakan Strategis yang ditetapkan	118
Tabel 3.10	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	118



Daftar Gambar

Gambar 1	Gambaran persentase pegawai berdasarkan golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	15
Gambar 2.	Hasil Perhitungan IKU Provinsi Banten.....	46
Gambar 3.	Hasil Perhitungan IKA Provinsi Banten	47
Gambar 4.	Hasil Perhitungan IKAL Provinsi Banten	48
Gambar 5.	Hasil Perhitungan IKTL Provinsi Banten	50

PENDAHULUAN

LKPJ TA-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Berdasarkan kerangka regulasi tersebut diatas maka pada pelaksanaannya, Gubernur diharuskan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang didukung dengan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara tepat dan akurat.

Sebagai bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dimaksud, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membantu memberikan kontribusi terhadap kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan tersebut dengan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPj-OPD) guna mempertanggungjawabkan anggaran yang dilaksanakan secara operasional oleh program dan kegiatan organisasi perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Perda tersebut mengemukakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2019 tentang uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten terdiri Kesekretariatan dan 4 bidang teknis yaitu Bidang Pengelolaan Sampah, Limbag B3 & Pengendalian Pencemaran, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan serta Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE & Pemberdayaan Masyarakat serta memiliki 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dan UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan dan 2 (dua) Cabang Dinas yaitu Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Pandeglang, Serang dan cilegon dan Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Wilayah Lebak dan Tangerang serta Kelompok Jabatan fungsional (Penyuluh Kehutanan)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DLHK Provinsi Banten adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
8. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2024.

Adapun Sasarannya adalah tersusunnya data dan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program pembangunan Instansi Pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selama Tahun Anggaran 2024.

1.4. Visi dan Misi

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2023-2026 sama dengan Visi **Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026** yakni : **“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Misi OPD tidak boleh terlepas dari visinya. tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2023-2026, adalah Misi ke-3 (tiga) dan Misi ke-4 (empat) yaitu:

1. Misi ke-3 : **Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.**
2. Misi ke-4 : **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.**

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Banten akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhinya

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan maupun mempermudah alokasi penempatan sumber daya yang ada sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan optimal.

Adapun yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis DLHK Provinsi Banten

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut
		2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan kedepan. Sebelum menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu program maka diperlukan beberapa strategi yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut.

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tentunya mengacu pada tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra DLHK Provinsi Banten Tahun 2023-2026, akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dan pembangunan Provinsi Banten secara umum.

Selanjutnya arah kebijakan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan serta indikatornya, agar dalam pelaksanaan dapat terukur dengan baik. Program yang disusun disesuaikan dengan bidang urusan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Secara lengkap strategi serta arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan pada Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DLHK Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;			
1. Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	1. Meningkatkan perencanaan pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup; 3. Meningkatkan Pengelolaan Kehati; 4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, penghargaan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Meningkatkan Pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum 6. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 dan penanganan sampah	1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi, dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi. 2. Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 3. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. 4. Peningkatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi dan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat. 5. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	7. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan hasil hutan dan Rehabilitasi lahan kritis 8. Meningkatkan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 9. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan 10. Meningkatkan SDM, Kapasitas dan Kompetensi serta kelembagaan Penyuluh kehutanan dan Kelompok Tani Hutan serta Pengembangan Perhutanan Sosial	6. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta pemberdayaan MHA yang terkait PPLH. 7. Peningkatan kapasitas SDM, penyuluhan, serta kesadaran pengelolaan lingkungan untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat Provinsi. 8. Peningkatan pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi. 9. Peningkatan Pembinaan, pengawasan, kapasitas SDM PPLH serta koordinasi penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH. 10. Peningkatan penanganan pengaduan Lingkungan Hidup. 11. Peningkatan kordinasi pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangan provinsi. 12. Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah 13. Peningkatan kualitas Perencanaan, Penyediaan data, koordinasi pemanfaatan hutan produksi dan lindung serta pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu diluar kawasan hutan. 14. Peningkatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara. 15. Peningkatan Pengembangan Perbenihan dan sertifikasi tanaman hutan untuk Rehabilitasi Lahan. 16. Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 17. Peningkatan Penangan Catchment Area. 18. Peningkatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi. 19. Peningkatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi Wilayah Lebak dan Tangerang. 20. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangera. 21. Peningkatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			22. Peningkatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon. 23. Peningkatan Pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan. 24. Peningkatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Berwibawa			
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada perangkat daerah	3. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

1.5. Data Umum /Gambaran Umum Daerah

A. Data Geografis dan Potensi Sumberdaya Alam

Provinsi Banten mempunyai potensi sumber daya alam kehutanan seluas 208.161,27 Ha, sebagian besar kawasan hutan tersebut merupakan kawasan hutan konservasi. Provinsi Banten memiliki kekayaan keanekaragaman hayati berupa flora, fauna dan tipe ekosistem yang sangat tinggi. Sebagian diantaranya merupakan jenis dan tipe ekosistem yang bersifat endemik. Namun demikian, potensi yang tinggi tersebut, belum dapat termanfaatkan dengan maksimal, bahkan kondisinya semakin mengalami tekanan sebagai akibat dari pencurian plasma nutfah, penyelundupan satwa, perambahan hutan, perburuan liar, perdagangan flora/fauna yang dilindungi.

Tabel 1.3. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Banten

No	Pengelola Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah
1	KPH Banten	69.266	7.879	-	77.145
2	KPH Bogor	-	1.591	-	1.591
3	Balitbang	3.026	-	-	3.026
4	BBKSDA	-	-	4.853	4.853
5	TNGHS	-	-	42.925	42.925
6	TNUK	-	-	78.619	78.619

No	Pengelola Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Jumlah
	Total	72.292	9.471	126.397	208.161

Sumber: DLHK Banten, 2024

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Banten meliputi; Hutan Produksi (HP) seluas 72.292 Ha, Hutan Lindung 9.471 Ha dan Hutan Konservasi 126.397 Ha.

Kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Banten terdiri dari dua taman nasional, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Luas Taman Nasional Ujung Kulon (daratan) adalah seluas 78.619 Ha, dan kawasan taman/perairan lautnya seluas 44.337 Ha. Sedangkan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terbagi dua Provinsi, yaitu Banten dan Jawa Barat dengan areal yang masuk di Provinsi Banten seluas 42.925,15 Ha. Kawasan konservasi lainnya adalah Cagar Alam seluas 4.230 ha dan Taman Wisata Alam seluas 623,15 Ha serta Taman Wisata Alam Perairan Laut seluas 720,00 Ha.

Tabel 1.4 Rencana Kawasan Lindung Provinsi Banten Tahun 2010-2030

No	Kawasan Lindung	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Hutan Lindung	9.804,47	1,01	Kep.Direksi Perhutani No.681/KPTS/DIR/2013
2	Sempadan Pantai	5.174,00	0,54	
3	Sempadan Sungai	7.877,00	0,82	
4	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	83.155,00	8,61	
5	Kawasan Sekitar Mata Air	787,00	0,08	
6	Kawasan Cagar Alam Rawa Danau	3.542,70	0,37	SK.3586/Menhut-VII/KUH/2014
7	Kawasan Cagar Alam Tukung Gede	1.519,50	0,16	SK.3622/Menhut-VII/KUH/2014
8	Kawasan Cagar Alam Pulau Dua	32,85	0,003	SK.3107/Menhut-VII/KUH/2014
9	Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon	61.357,46	6,35	SK.3658/Menhut-VII/KUH/2014
10	Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak	42.925,15	4,44	Kepmenhut No.698/Kpts-II/2003
11	Kawasan Taman Hutan Raya Banten	1.595,90	0,17	SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014

No	Kawasan Lindung	Luas		Keterangan
		Ha	%	
12	Kawasan Taman Wsiata Alam Pulau Sangiang	528,15	0,05	Kepmenhut No.698/Kpts-II/1991
13	Kawasan Rawan Bencana	66.451,33	6,88	
14	Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy	5.136,58	0,53	
	Total	289.887,60	30,00	

Sumber: DLHK Banten, 2024

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi dunia karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe Ekosistem Hutan Hujan Dataran rendah yang tersisa dan terluas di Pulau Jawa. Gejala alamnya yang unik serta panorama yang asri dan alami di berbagai tempat, secara keseluruhan merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata alam. Di dalamnya terdapat satwa spesifik endemic langka yaitu badak bercula satu (*Rhinoceros sundaicus*). Selain hal tersebut di atas Provinsi Banten memiliki Cagar Alam Rawa Danau yang merupakan kawasan penyedia air baku dan satu-satunya reservoir air di wilayah Provinsi Banten Bagian Barat.

Kawasan hutan produksi di Provinsi Banten terbagi kedalam beberapa kelas perusahaan yaitu kelas perusahaan Jati 34.759,15 Ha, kelas perusahaan Mahoni 14.844,44 Ha, dan kelas perusahaan Acacia mangium 22.179,19 Ha. Selain memiliki kawasan-kawasan hutan tersebut diatas, Provinsi Banten memiliki juga kawasan konservasi khusus Baduy seluas 5.136,58 Ha berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Pengelolaan hutan tidak mengikuti pembagian administratif Pemerintahan, tetapi mengacu pada satu sistem pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Provinsi Banten terdapat beberapa Daerah Aliran Sungai penting antara lain DAS Ciujung seluas 279.839 Ha, DAS Cidanau seluas 22.620 Ha dan DAS Cibaliung seluas 63.669 Ha yang merupakan DAS prioritas. Keutuhan dan kemantapan fungsi cathment area DAS Ciujung sangat berpengaruh kepada

daerah-daerah seperti daerah Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang khususnya berkaitan dengan sering terjadinya banjir di wilayah DAS Ciujung, selain itu DAS Ciujung berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang akan diarahkan untuk mensuplai air bagi Waduk Karian sedangkan DAS Cidanau merupakan salah satu sumber air bagi masyarakat Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dan diarahkan untuk mensuplai keberlangsungan Waduk Krenceng.

Pengelolaan kawasan hutan produksi di Provinsi Banten diarahkan bagi pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan. Lokasi kawasan hutan produksi tersebar di 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak, meliputi kecamatan Banjarsari, Cileles, Gunung Kencana, Bojong Manik, Cikulur dan Cimarga); Kabupaten Pandeglang, meliputi Cikeusik, Munjul, Cibaliung, Mandalawangi, Labuan dan Cimanggu; serta Kabupaten Serang yang meliputi Kecamatan Mancak dan Ciomas.

Selain kawasan hutan negara, luas indikatif hutan rakyat di Provinsi Banten mencapai 322.152,59 ha dengan potensi kayu/tegakan mencapai 9.011.156,44 m³ dan potensi karbon mencapai 5.152.034,71 ton. Hutan rakyat di Provinsi Banten terbesar luasannya berturut-turut adalah di Kabupaten Lebak disusul oleh Kabupaten Pandeglang. Tanaman hutan rakyat yang dominan di Provinsi Banten adalah sengon, durian, tangkil, jati, mahoni, dll

B. Data PNS/Sumber Daya Manusia (SDM) DLHK Provinsi Banten

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sumber Daya Manusia OPD umumnya didasarkan pada beban kerja (tupoksi) yang diberikan, dengan klasifikasi tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tenaga Non-PNS (kontrak). Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi Banten pada tahun 2024 sebanyak 264 orang yaitu pegawai **PNS** (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 133 orang dan tenaga **Non-PNS** (kontrak) sebanyak 131 orang. Adapun rincian jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Jabatan Struktura di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Golongan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Esselon II	1	Kepala Dinas
2	Esselon III	10	Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Balai dan Kepala UPTD
3	Esselon IV	30	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian
4	Fungsional	4	Penyuluh Kehutanan
5	Fungsional Umum	88	Pelaksana/ASN
	Jumlah PNS	133	
6	Tenaga Non-PNS (kontrak)	131	TKS/Honoror
	Jumlah Total	264	

Sumber: DLHK Banten, 2024

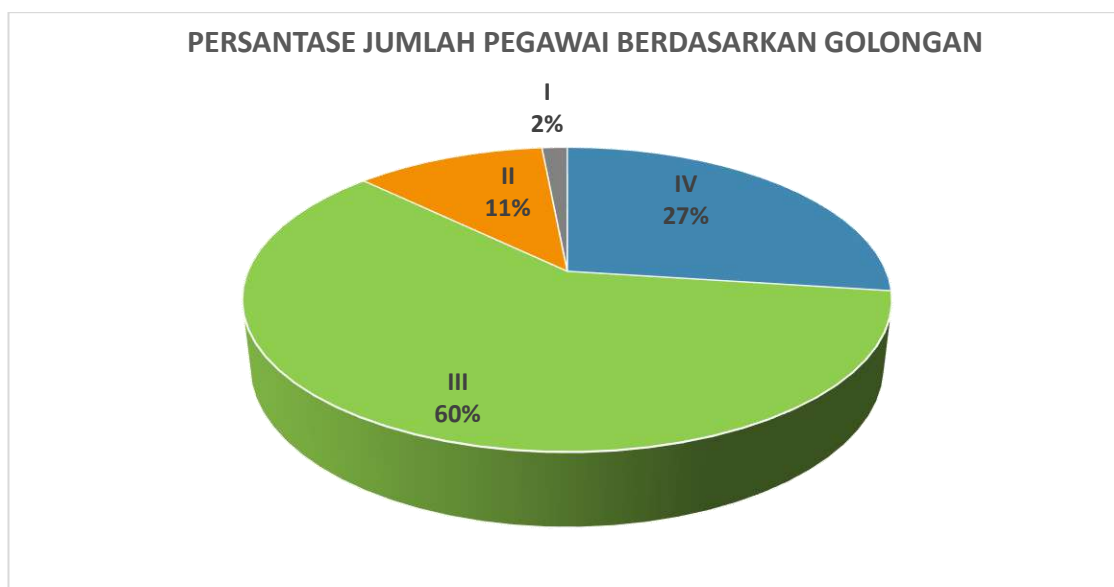
Komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten berdasarkan jabatan dan golongan, disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	3	-	-	-	3
4	Kepala CDLHK / UPTD	5	-	-	-	5
6	Kepala Sub Bagian	4	4	-	-	8
7	Kepala Seksi	13	9	-	-	22
8	Penyuluh	3	1	-	-	4
9	Pelaksana/ASN	6	66	15	2	89
	Jumlah	36	80	15	2	133

Sumber: DLHK Banten, 2024

Berdasarkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan, diperoleh bahwa total Golongan IV sebanyak 36 orang (24,46%), Golongan III sebanyak 80 orang (59,71%), Golongan II sebanyak 15 orang (14,39%) dan Golongan I sebanyak 2 orang (1,44%). Secara grafis disajikan sebagai berikut :



Gambar 1. Gambaran Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024.

C. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan TA 2024

Target Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum Perubahan Anggaran (APBD Murni TA 2024) adalah sebesar **Rp 276.120.000,-** (Dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa retribusi pemakaian laboratorium target sebesar Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Retribusi Pemakaian Ruangan (kantin) target sebesar Rp. 6.120.000,- (Enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (TAHURA) target sebesar Rp. 20.000.000,-. Adapun Target Pendapatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 tetap **276.120.000,-** (Dua ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. **181.313.000,-** (*Seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah*) atau 65,66 %. terdiri dari retribusi pemakaian

laboratorium realisasi sebesar Rp. 160.186.000,- atau sebesar 64,07,% Retribusi Pemakaian Ruangan (kantin) realisasi sebesar Rp. 6.120.000,- atau 100% dan Realisasi Retribusi dari Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (TAHURA) sebesar Rp. 21.127.000,- atau 105,64%

Beberapa kendala terkait pencapaian/Realisasi pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain : Pelaksanaan implementasi Keputusan Gubernur Banten No. 181 Tahun 2024 tentang pembentukan komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup provinsi banten tanggal 06 Juni 2024, dimana ada kebijakan yang mengharuskan bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan terakreditasi (UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK PROVINSI BANTEN) dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji rona awal lingkungan dalam dokumen lingkungan dan monitoring lingkungan baru berjalan pada TW. IV (Oktober – Desember 2024) sehingga masih belum maksimal pencapaian realisasi kemudian Perjalanan Dinas Tahun 2024 untuk pengambilan sample retribusi hanya Rp. 75.000.000,- sehingga ada permintaan sampling retribusi yang tidak bisa di fasilitasi dengan perjalanan dinas pada bulan desember 2024

Beberapa tindaklanjut yang akan dilaksanakan terkait permasalahan yang terjadi antara lain : perlunya peningkatan anggaran perjalanan dinas dalam rangka pengambilan sampling uji laboortorium ke lapangan dalam rangka pengambilan sample dalam upaya peningkatan PAD, perlunya dilaksanakan sosialisasi terkait pelayanan pengujian Laboratorium UPTD Laboratorium Provinsi Banten kepada para pelaku usaha yang ada di Provinsi Banten serta pengadaan sarana dan prasarana prasarana alat pengujian dan sampling khususnya Pengujian kualitas air laut, pengujian parameter mikrobiologi dan kualitas udara ambien untuk parameter gas.

Adapun rincian target dan realisasi anggaran pendapatan tahun anggaran 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

Tabel.1.7 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten TA 2024

No	Kode rek	Uraian Pendapatan	Target APBD Murni (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Lebih/(kurang) (Rp)
					(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	276.120.000,00	276.120.000,00	181.313.000,00	65,66%	-Rp 88.687.000,00
1	4.1.02.02.01.0001	Kantin	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	100%	Rp -
2	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	250.000.000,00	250.000.000,00	160.186.000,00	64,07%	-Rp 89.814.000,00
2	4.1.02.02.09.0001	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (TAHURA)	20.000.000,00	20.000.000,00	21.127.000,00	105,64%	Rp 1.127.000,00

D. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

Dukungan anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Tahun Anggaran 2024 APBD Murni adalah sebesar **Rp 66.918.742.726,-** (Enam puluh enam milyar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan Rincian **Belanja Operasi Rp 66.116.432.526,-** (Enam puluh enam milyar seratus enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dan **Belanja Modal sebesar Rp. 802.310.200,-** (Delapan ratus dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah). Jumlah Program yang dilaksanakan pada tahun Anggaran 2024 (APBD Murni) dilaksanakan melalui 15 Program dan 55 kegiatan

Dalam APBD Perubahan TA 2024 terjadi Perubahan Pagu Anggaran menjadi sebesar **Rp. 70.874.987.485,-** (Tujuh puluh milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian **Belanja Operasi menjadi Rp. 69.507.900.415,-** (Enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus ribu empat ratus lima belas rupiah) dan **Belanja Modal menjadi Rp. 1.367.087.070,-** (Satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) dengan jumlah Program yang dilaksanakan sebanyak 15 Program dan 55 Kegiatan

Adapun Rincian Program, Kegiatan dan alokasi anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8. Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten sebelum dan sesudah perubahan Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	62.626.242.726	66.385.287.328	3.759.044.602
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	62.626.242.726	66.385.287.328	3.759.044.602
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.493.357.726	51.973.197.328	479.839.602
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.000.000	401.008.000	91.008.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.072.632.798	35.539.122.000	(1.533.510.798)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	92.500.000	(7.500.000)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.343.468	521.806.468	136.463.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.752.752.000	8.433.477.000	(319.275.000)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.000.000	648.682.000	108.682.000
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Lab)	184.000.000	234.000.000	50.000.000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Lab)	235.000.000	290.000.000	55.000.000
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK LT)	66.800.000	62.667.400	(4.132.600)
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	313.400.000	301.917.000	(11.483.000)
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	125.820.000	125.820.000	-
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK PSC)	110.000.000	110.000.000	-
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	170.000.000	178.617.000	8.617.000
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	91.000.000	91.000.000	-
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Tahura)	212.000.000	295.243.700	83.243.700
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Tahura)	723.992.460	1.108.052.460	384.060.000
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	75.000.000	63.776.300	(11.223.700)

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	1.411.686.000	2.942.006.000	1.530.320.000
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	107.400.000	107.400.000	-
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD SPTH)	30.000.000	30.000.000	-
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	162.000.000	143.520.000	(18.480.000)
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	294.531.000	232.582.000	(61.949.000)
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	577.907.600	796.437.600	218.530.000
24	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	304.679.000	396.009.000	91.330.000
25	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	273.228.600	400.428.600	127.200.000
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.569.950.000	2.526.030.000	(43.920.000)
26	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.339.950.000	2.281.010.000	(58.940.000)
27	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	130.000.000	150.000.000	20.000.000
28	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	100.000.000	95.020.000	(4.980.000)
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000	6.000.000	(44.000.000)
29	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	50.000.000	6.000.000	(44.000.000)
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	50.000.000	-
30	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	-
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	65.000.000	133.400.000	68.400.000
31	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	15.000.000	8.400.000	(6.600.000)
32	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000	125.000.000	75.000.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	990.000.000	855.615.000	(134.385.000)
33	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	990.000.000	855.615.000	(134.385.000)
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	150.000.000	-
34	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000	-
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	142.092.400	127.092.400	(15.000.000)
35	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	142.092.400	127.092.400	(15.000.000)
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000	186.510.000	(38.490.000)
36	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	225.000.000	186.510.000	(38.490.000)
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
37	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
B	Urusan Pemerintahan Pilihan	4.292.500.000	4.489.700.157	197.200.157
	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan	4.292.500.000	4.489.700.157	197.200.157
XII	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.327.500.000	2.309.816.100	(17.683.900)
38	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	150.000.000	184.024.000	34.024.000
39	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	120.000.000	107.250.000	(12.750.000)
40	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	250.000.000	270.000.000	20.000.000
41	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	150.000.000	130.960.000	(19.040.000)
42	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	25.000.000	25.000.000	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
43	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	25.000.000	25.000.000	-
44	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	526.250.000	580.850.000	54.600.000
45	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	476.250.000	437.992.800	(38.257.200)
46	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	480.000.000	439.755.300	(40.244.700)
47	Perbenihan Tanaman Hutan	125.000.000	108.984.000	(16.016.000)
H	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.395.000.000	1.424.923.057	29.923.057
48	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	945.000.000	945.359.057	359.057
49	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	20.000.000	20.000.000	-
50	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	80.000.000	64.976.000	(15.024.000)
51	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	20.000.000	20.000.000	-
52	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	80.000.000	68.670.000	(11.330.000)
53	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	250.000.000	305.918.000	55.918.000
I	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	310.000.000	372.336.000	62.336.000

No	Program/Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
		APBD Murni (Rp)	APBD Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
54	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	310.000.000	372.336.000	62.336.000
J	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	260.000.000	382.625.000	122.625.000
55	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	260.000.000	382.625.000	122.625.000
JUMLAH TOTAL		66.918.742.726	70.874.987.485	(3.956.244.759)

Jumlah realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp 69.893.430.100,- (98,62%)** dengan realisasi fisik sebesar **99,95%** terdiri dari **Belanja Operasi** dengan pagu sebesar Rp. **69.507.900.415,-** realisasi sebesar **Rp 68.540.771.605,- (98,61%)** dan **Belanja Modal** dengan pagu sebesar **Rp1.367.087.070,-** realisasi sebesar **Rp1.352.658.495,- (98,94%)**

Adapun Realisasi fisik dan keuangan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun anggaran 2024 selengkapnya dapat di lihat pada tabel 1.9 berikut ini :

Tabel 1.9. Realisasi Anggaran Belanja DLHK Provinsi Banten Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	66.385.287.328	65.650.429.283	98,89		734.858.045
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	66.385.287.328	65.650.429.283	98,89		734.858.045
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.973.197.328	51.538.740.756	99,16		434.456.572
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.008.000	395.534.631	98,64	100	5.473.369
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.539.122.000	35.287.429.114	99,29	100	251.692.886
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	19.999.000	100,00	100	1.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.500.000	89.366.300	96,61	100	3.133.700
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.806.468	521.016.349	99,85	100	790.119
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.433.477.000	8.374.389.316	99,30	100	59.087.684
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	648.682.000	644.545.200	99,36	100	4.136.800
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Lab)	234.000.000	231.608.800	98,98	100	2.391.200
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Lab)	290.000.000	289.154.050	99,71	100	845.950
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK LT)	62.667.400	56.983.299	90,93	100	5.684.101
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	301.917.000	295.906.760	98,01	100	6.010.240
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK LT)	125.820.000	121.731.600	96,75	100	4.088.400
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK PSC)	110.000.000	108.652.400	98,77	100	1.347.600
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	178.617.000	171.492.010	96,01	100	7.124.990
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	91.000.000	90.754.000	99,73	100	246.000
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Tahura)	295.243.700	292.785.040	99,17	100	2.458.660
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Tahura)	1.108.052.460	1.094.920.572	98,81	100	13.131.888
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	63.776.300	59.174.780	92,78	100	4.601.520
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Tahura)	2.942.006.000	2.909.261.341	98,89	100	32.744.659
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	107.400.000	105.986.266	98,68	100	1.413.734
21	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD SPTH)	30.000.000	29.190.985	97,30	100	809.015
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	143.520.000	120.234.943	83,78	100	23.285.057
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	232.582.000	228.624.000	98,30	100	3.958.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	796.437.600	766.434.074	96,23		30.003.526
24	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	396.009.000	392.715.100	99,17	100	3.293.900
25	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	400.428.600	373.718.974	93,33	100	26.709.626
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.526.030.000	2.471.265.477	97,83		54.764.523
26	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.281.010.000	2.231.864.400	97,85	100	49.145.600
27	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	150.000.000	149.434.600	99,62	100	565.400
28	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)	95.020.000	89.966.477	94,68	100	5.053.523
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.000.000	5.980.000	99,67		20.000
29	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	6.000.000	5.980.000	99,67	100	20.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	49.163.820	98,33		836.180
30	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	49.163.820	98,33	100	836.180
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	133.400.000	124.560.000	93,37		8.840.000
31	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	8.400.000	7.800.000	92,86	100	600.000
32	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	125.000.000	116.760.000	93,41	100	8.240.000
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	855.615.000	845.843.690	98,86		9.771.310
33	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	855.615.000	845.843.690	98,86	100	9.771.310
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	145.159.000	96,77		4.841.000

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
34	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	145.159.000	96,77	100	4.841.000
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	127.092.400	125.973.212	99,12		1.119.188
35	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	127.092.400	125.973.212	99,12	100	1.119.188
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	186.510.000	184.579.000	98,96		1.931.000
36	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	186.510.000	184.579.000	98,96	100	1.931.000
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9.581.005.000	9.392.730.254	98,03		188.274.746
37	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	9.581.005.000	9.392.730.254	98,03	100	188.274.746
B	Urusan Pemerintahan Pilihan	4.489.700.157	4.243.000.817	94,51		246.699.340
	Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan	4.489.700.157	4.243.000.817	94,51		246.699.340
XII	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.309.816.100	2.153.687.592	93,24		156.128.508
38	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	184.024.000	169.949.261	92,35	100	14.074.739
39	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	107.250.000	97.209.824	90,64	100	10.040.176
40	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	270.000.000	250.807.370	92,89	100	19.192.630
41	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	130.960.000	126.991.500	96,97	100	3.968.500
42	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)	25.000.000	24.508.000	98,03	100	492.000
43	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	25.000.000	24.796.000	99,18	100	204.000
44	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	580.850.000	487.510.210	83,93	84,88	93.339.790

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
45	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	437.992.800	430.529.915	98,30	100	7.462.885
46	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	439.755.300	433.173.906	98,50	100	6.581.394
47	Perbenihan Tanaman Hutan	108.984.000	108.211.606	99,29	100	772.394
H	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.424.923.057	1.348.537.375	94,64		76.385.682
48	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	945.359.057	897.793.255	94,97	100	47.565.802
49	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	20.000.000	19.756.680	98,78	100	243.320
50	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	64.976.000	62.770.940	96,61	100	2.205.060
51	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	20.000.000	19.335.500	96,68	100	664.500
52	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	68.670.000	59.491.000	86,63	100	9.179.000
53	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	305.918.000	289.390.000	94,60	100	16.528.000
I	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	372.336.000	367.658.050	98,74		4.677.950
54	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	372.336.000	367.658.050	98,74	100	4.677.950
J	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	382.625.000	373.117.800	97,52		9.507.200

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%	Fisik %	
1	2	3	4	5	6	7
55	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	382.625.000	373.117.800	97,52	100	9.507.200
JUMLAH TOTAL		70.874.987.485	69.893.430.100	98,62		981.557.385

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DLHK PROVINSI BANTEN TA 2024

LKPJ TA-2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN 2024**

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Perubahan/Pergeseran Anggaran Sebelum Perubahan Anggaran Tahun 2024

Sebelum perubahan anggaran Tahun 2024 tidak terjadi Perubahan/optimalisasi anggaran (efisiensi anggaran) namun dinamika optimalisasi serta perubahan anggaran prosesnya dilaksanakan pada tahapan perubahan anggaran tahun 2024.

2.2 Perubahan Penjabaran Anggaran Melalui Perubahan Anggaran Tahun 2024

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melaksanakan penyesuaian/perubahan Anggaran Tahun 2024 antara lain : (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD, (b) Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan sehingga diperlukan beberapa penyesuaian anggaran dan target kinerja yang telah ditetapkan serta penyesuaian jumlah anggaran pada beberapa kegiatan, terkait hal-hal tersebut diatas perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian diantaranya perubahan pergeseran, pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyesuaian yang dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024 diharapkan tetap mampu memaksimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Selengkapanya Rencana

Target Pendapatan dan Belanja serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Target Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2024

Koding	Uraian	Jumlah Target Pendapatan (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1	Pendapatan Asli Daerah	276.120.000	276.120.000	0	0
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1.02	Retribusi Daerah	276.120.000	276.120.000	0	0
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	256.120.000,00	256.120.000,00	0	0
2.11.3.28.0.00.02.0000.4.1.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0

**Tabel 2.2. Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
A	DINAS			59.573.613.266	61.576.778.468	2.003.165.202
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			58.083.613.266	59.823.665.468	1.740.052.202
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			58.083.613.266	59.823.665.468	1.740.052.202
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			47.180.728.266	45.656.595.468	-1.524.132.798
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		310.000.000	401.008.000	91.008.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		80.000.000	80.000.000	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		10.000.000	9.000.000	-1.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		10.000.000	9.000.000	-1.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		5.000.000	5.000.000	0
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		5.000.000	5.000.000	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100.000.000	100.000.000	0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.000.000	193.008.000	93.008.000
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		37.072.632.798	35.539.122.000	-1.533.510.798
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		36.194.597.798	34.828.767.000	-1.365.830.798
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		789.035.000	601.355.000	-187.680.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		31.000.000	51.000.000	20.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		6.500.000	6.500.000	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		6.500.000	6.500.000	0
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		32.000.000	32.000.000	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		6.500.000	6.500.000	0
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		6.500.000	6.500.000	0
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000.000	20.000.000	0
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		20.000.000	20.000.000	0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100.000.000	92.500.000	-7.500.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000	40.000.000	0
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.000.000	4.000.000	0
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.000.000	48.500.000	-7.500.000
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		385.343.468	521.806.468	136.463.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.865.000	42.865.000	10.000.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	144.880.000	44.880.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	137.483.000	57.483.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	0
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	12.000.000	-8.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.478.468	149.578.468	32.100.000
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	15.000.000	0
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.752.752.000	8.433.477.000	-319.275.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.622.000.000	1.741.549.883	119.549.883
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.130.752.000	6.691.927.117	-438.824.883
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		540.000.000	648.682.000	108.682.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	300.000.000	0
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	240.702.000	90.702.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	47.980.000	17.980.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			577.907.600	796.437.600	218.530.000
	7	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		304.679.000	396.009.000	91.330.000
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	218.349.000	309.679.000	91.330.000
			Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	86.330.000	86.330.000	0
	8	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		273.228.600	400.428.600	127.200.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	24.185.000	24.185.000	0
			Pemantauan dan Evaluasi KLHS	249.043.600	376.243.600	127.200.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.339.950.000	2.281.010.000	-58.940.000
	9		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.339.950.000	2.281.010.000	-58.940.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	26.600.000	20.100.000	-6.500.000
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.000.000	10.000.000	0
			Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	10.000.000	10.000.000	0
			Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.964.950.000	1.942.950.000	-22.000.000
			Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	10.000.000	10.000.000	0
			Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	20.720.000	15.640.000	-5.080.000
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	241.880.000	241.880.000	0
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20.800.000	20.440.000	-360.000
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	10.000.000	10.000.000	0
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	25.000.000	0	-25.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000	6.000.000	-44.000.000
	10		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	50.000.000	6.000.000	-44.000.000
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50.000.000	6.000.000	-44.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	50.000.000	0
	11		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25.000.000	25.000.000	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25.000.000	25.000.000	0
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	142.092.400	127.092.400	-15.000.000
	12		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	142.092.400	127.092.400	-15.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1.458.400	1.458.400	0
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	140.634.000	125.634.000	-15.000.000
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	65.000.000	133.400.000	68.400.000
	13		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	15.000.000	8.400.000	-6.600.000
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	15.000.000	8.400.000	-6.600.000
	14		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	50.000.000	125.000.000	75.000.000
			Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	50.000.000	125.000.000	75.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	990.000.000	855.615.000	-134.385.000
	15		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	990.000.000	855.615.000	-134.385.000
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	20.000.000	19.960.000	-40.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	554.000.000	451.330.000	-102.670.000
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat	366.000.000	334.325.000	-31.675.000
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	150.000.000	0
	16		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	150.000.000	0
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150.000.000	150.000.000	0
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000	186.510.000	-38.490.000
	17		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	225.000.000	186.510.000	-38.490.000
			Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	50.000.000	39.000.000	-11.000.000
			Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	50.000.000	43.450.000	-6.550.000
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	125.000.000	104.060.000	-20.940.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
	18		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
			Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	6.288.050.000	9.556.120.000	3.268.070.000
			Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	24.885.000	24.885.000	0
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.490.000.000	1.753.113.000	263.113.000
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.490.000.000	1.753.113.000	263.113.000
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	670.000.000	692.234.000	22.234.000
	19		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	150.000.000	184.024.000	34.024.000
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	150.000.000	184.024.000	34.024.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	20	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		120.000.000	107.250.000	-12.750.000
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	30.000.000	17.250.000	-12.750.000
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000	30.000.000	0
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	30.000.000	30.000.000	0
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	30.000.000	30.000.000	0
	21	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		250.000.000	270.000.000	20.000.000
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.000.000	75.000.000	50.000.000
			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	225.000.000	195.000.000	-30.000.000
	22	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		150.000.000	130.960.000	-19.040.000
			Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	55.960.000	-19.040.000
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	75.000.000	0
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			250.000.000	305.918.000	55.918.000
	23	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		250.000.000	305.918.000	55.918.000
			Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	40.000.000	26.680.000	-13.320.000
			Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	40.000.000	40.000.000	0
			Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	170.000.000	239.238.000	69.238.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			310.000.000	372.336.000	62.336.000
	24	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		310.000.000	372.336.000	62.336.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	50.000.000	30.530.000	-19.470.000
			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	180.000.000	279.536.000	99.536.000
			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	80.000.000	62.270.000	-17.730.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	260.000.000	382.625.000	122.625.000
	25		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	260.000.000	382.625.000	122.625.000
			Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	30.000.000	33.566.000	3.566.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200.000.000	319.059.000	119.059.000
			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	30.000.000	30.000.000	0
B			Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang	1.157.270.000	1.181.230.400	23.960.400
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	506.020.000	490.404.400	-15.615.600
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	506.020.000	490.404.400	-15.615.600
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	506.020.000	490.404.400	-15.615.600
	26		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.800.000	62.667.400	-4.132.600
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.300.000	3.300.000	0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	16.500.000	0
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.300.000	3.300.000	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.200.000	2.200.000	0
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000	11.000.000	0
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	1.367.400	-4.132.600
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	25.000.000	0
	27		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.400.000	301.917.000	-11.483.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.740.000	61.740.000	0
	28		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	251.660.000	240.177.000	-11.483.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.820.000	125.820.000	0
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.700.000	92.700.000	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.120.000	33.120.000	0
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	651.250.000	690.826.000	39.576.000
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	651.250.000	690.826.000	39.576.000
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	551.250.000	605.850.000	54.600.000
	29		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	526.250.000	580.850.000	54.600.000
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	40.000.000	38.560.000	-1.440.000
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	300.000.000	450.000.000	150.000.000
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			0
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	100.000.000	6.040.000	-93.960.000
			Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan			0
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30.000.000	30.000.000	0
			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	56.250.000	56.250.000	0
	30		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	25.000.000	25.000.000	0
			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	25.000.000	25.000.000	0
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000	84.976.000	-15.024.000
	31		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	20.000.000	20.000.000	0
			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	20.000.000	20.000.000	0
	32		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	80.000.000	64.976.000	-15.024.000
			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	15.000.000	15.000.000	0
			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	15.000.000	5.800.000	-9.200.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000	44.176.000	-5.824.000
C	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon			972.250.000	931.279.800	-40.970.200
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			371.000.000	379.617.000	8.617.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			371.000.000	379.617.000	8.617.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			371.000.000	379.617.000	8.617.000
	33	Administrasi Umum Perangkat Daerah		110.000.000	110.000.000	0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	25.000.000	0
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	0
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	10.000.000	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	0
	34	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		170.000.000	163.500.000	-6.500.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	33.500.000	-6.500.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000	130.000.000	0
	35	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		91.000.000	106.117.000	15.117.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	81.117.000	15.117.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	0
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			601.250.000	551.662.800	-49.587.200
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			601.250.000	551.662.800	-49.587.200
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			501.250.000	462.992.800	-38.257.200
	36	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		476.250.000	437.992.800	-38.257.200
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	40.000.000	20.473.800	-19.526.200
			Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	300.000.000	281.269.000	-18.731.000
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	50.000.000	50.000.000	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan			0
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30.000.000	30.000.000	0
			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	56.250.000	56.250.000	0
			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	25.000.000	25.000.000	0
			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	25.000.000	25.000.000	0
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000	88.670.000	-11.330.000
	37		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	20.000.000	20.000.000	0
			Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	20.000.000	20.000.000	0
	38		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	80.000.000	68.670.000	-11.330.000
			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	15.000.000	5.370.000	-9.630.000
			Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	15.000.000	13.300.000	-1.700.000
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
D			UPTD Laboratorium Lingkungan	649.000.000	769.020.000	120.020.000
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	649.000.000	769.020.000	120.020.000
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	649.000.000	769.020.000	120.020.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	419.000.000	524.000.000	105.000.000
	39		Administrasi Umum Perangkat Daerah	184.000.000	234.000.000	50.000.000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	35.000.000	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	150.000.000	50.000.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.500.000	6.500.000	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	35.000.000	0

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
	40	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		235.000.000	290.000.000	55.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.000.000	185.000.000	0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	105.000.000	55.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		230.000.000	245.020.000	15.020.000
	41	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		130.000.000	150.000.000	20.000.000
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	50.000.000	75.000.000	25.000.000
			Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	25.000.000	25.000.000	0
			Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	5.000.000	0	-5.000.000
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
	42	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		100.000.000	95.020.000	-4.980.000
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100.000.000	95.020.000	-4.980.000
E	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan			1.198.931.000	1.062.241.300	-136.689.700
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			593.931.000	513.502.000	-80.429.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			593.931.000	513.502.000	-80.429.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			593.931.000	513.502.000	-80.429.000
	43	Administrasi Umum Perangkat Daerah		107.400.000	107.400.000	0
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	0
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.000.000	19.000.000	0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.000.000	43.000.000	0
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000	6.000.000	0
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.000.000	28.000.000	0
	44	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30.000.000	30.000.000	0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
	45	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		162.000.000	143.520.000	-18.480.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.000.000	58.520.000	-18.480.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.000.000	85.000.000	0
	46	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		294.531.000	232.582.000	-61.949.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	125.282.500	63.333.500	-61.949.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.248.500	139.248.500	0
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			605.000.000	548.739.300	-56.260.700
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			605.000.000	548.739.300	-56.260.700
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			605.000.000	548.739.300	-56.260.700
	47	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		480.000.000	439.755.300	-40.244.700
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	480.000.000	439.755.300	-40.244.700
	48	Perbenihan Tanaman Hutan		125.000.000	108.984.000	-16.016.000
			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	25.000.000	25.000.000	0
			Sertifikasi Sumber Benih	25.000.000	25.000.000	0
			Sertifikasi Mutu Benih	25.000.000	25.000.000	0
			Sertifikasi Mutu Bibit	25.000.000	25.000.000	0
			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	25.000.000	8.984.000	-16.016.000
F	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten			3.367.678.460	5.354.437.517	1.986.759.057
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.422.678.460	4.409.078.460	1.986.400.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.422.678.460	4.409.078.460	1.986.400.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.422.678.460	4.409.078.460	1.986.400.000
	49	Administrasi Umum Perangkat Daerah		212.000.000	295.243.700	83.243.700
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	90.620.000	85.620.000
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.292.000	33.829.000	-3.463.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.816.000	87.479.700	-10.336.300
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.124.000	19.124.000	0
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	2.064.000	-936.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN			PAGU (Rp)		KETERANGAN
				APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	BERTAMBAH BERKURANG
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.768.000	62.127.000	12.359.000
	50		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	723.992.460	1.108.052.460	384.060.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.566.000	123.566.000	0
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	600.426.460	984.486.460	384.060.000
	51		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	63.776.300	-11.223.700
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	63.776.300	-11.223.700
	52		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.411.686.000	2.942.006.000	1.530.320.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	215.000.000	95.836.000	-119.164.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.196.686.000	2.846.170.000	1.649.484.000
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			945.000.000	945.359.057	359.057
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			945.000.000	945.359.057	359.057
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			945.000.000	945.359.057	359.057
	53		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	945.000.000	945.359.057	359.057
			Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	450.000.000	404.597.057	-45.402.943
			Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
			Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	50.000.000	50.000.000	0
			Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	20.000.000	19.880.000	-120.000
			Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	20.000.000	20.000.000	0
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	125.000.000	125.000.000	0
			Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	100.000.000	162.948.000	62.948.000
			Perencanaan Pengelolaan TAHURA	130.000.000	112.934.000	-17.066.000
						0
JUMLAH TOTAL				66.918.742.726	70.874.987.485	3.956.244.759

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

LKPJ TA-2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN 2024**

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan (IKU DLHK)

A. Capaian Pelaksanaan Kinerja Sasaran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah menyelenggarakan bidang urusan pemerintah daerah terdiri dari: **(a) urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Lingkungan hidup, (b) Urusan Pilihan Bidang Kehutanan.**

Secara umum pelaksanaan Sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2024 berjalan dengan baik. Target realisasi serta capaian Indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Pencapaian Th 2024
1	Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (satuan Nilai)	74,22, 54,46 80,20	69,84 54,32 85,46	94,10 99,74 106,56
2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (satuan : nilai)	35,20	43,03	122,24
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (satuan Nilai)	73,16	- *	- *

Ket : * = SAKIP Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Provinsi Banten

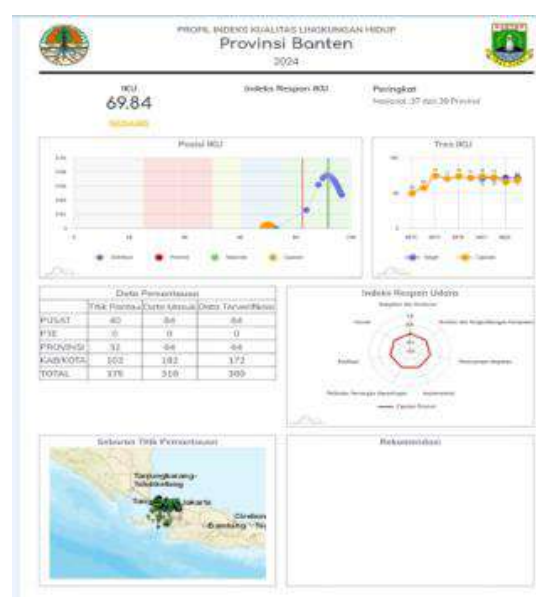
Sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan air laut dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem dengan indikator sasaran yaitu:

a. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, Adapun Rumus Perhitungan IKU yaitu :

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

Indeks Kualitas Udara di Provinsi Banten pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 74,22 berdasarkan hasil pemantauan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Udara untuk Provinsi Banten sebesar 69,84 (capaian terhadap target 94,10%)



Gambar 2. Hasil Perhitungan IKU Provinsi Banten

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun Rumus Perhitungan IKA yaitu:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <i>IP_j</i> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan <i>j</i> <i>C_i</i> = konsentrasi parameter <i>i</i> (hasil pengukuran) <i>L_{ij}</i> = Baku mutu parameter <i>i</i> bagi peruntukkan <i>j</i> <i>M</i> = maksimum, <i>A</i> = average (rata-rata)

Indeks Kualitas Air di Provinsi Banten pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 54,46 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Air di Provinsi Banten adalah 54,32 (capaian terhadap target 99,74%)



Gambar 3. Hasil Perhitungan IKA Provinsi Banten

c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Adapun Rumus Perhitungan IKAL yaitu:

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	TSS; DO; Minyak dan Lemak; Amonia Total; Orto-Fosfat	$IKAL = \sum_{i=1}^n Q_i W_i$ Q_i : Sub-index untuk parameter kualitas air laut ke i, W_i : Bobot parameter kualitas air laut ke i, n : Jumlah parameter kualitas air laut

Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Banten pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,20 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Air Laut di Provinsi Banten adalah 85,46 (capaian terhadap target 106,56%)



Gambar 4. Hasil Perhitungan IKAL Provinsi Banten

d. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Adapun Rumus perhitungan IKTL adalah sebagai berikut :

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$$

dimana,

TL : Tutupan lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Banten pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 35,20 berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh capaian Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Banten adalah 43,03 (capaian terhadap target 122,24%)



Gambar 5. Hasil Perhitungan IKTL Provinsi Banten

e. **Capaian Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**

Sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator sasaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra 2023-2026 nilai target 2024 sebesar 73,16 akan tetapi perhitungan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat nilai realisasinya belum bisa dihitung karena penilaian untuk tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2025.

B. Capaian Pelaksanaan Kinerja Program

Capaian kinerja tercapai dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada program dapat mendukung capaian target kinerja yang ditetapkan. Berikut penjelasan capaian setiap program dan kegiatan :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator Program Perencanaan Lingkungan Hidup adalah Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas. Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Rumus perhitungan indikator yang digunakan adalah Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang berkualitas = $\frac{\Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)} + \Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)}}{\text{Jumlah Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan yang divalidasi}} \times 100\%$.

Target Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. **Kegiatan** yang dilaksanakan pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup ini adalah :

- a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
- b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

Capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 ini dapat tercapai sebesar 100% (Persentase Capaian 100%)

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembagi Persegi	Nilai Hasil	
2	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	= Z dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) + Z dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sudah divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di bagi Jumlah Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan yang divalidasi dikali 100%	Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100 Persen	1. Dokumen DIKPLHD 2. Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat 3. Dokumen Review RPJLH Banten 2024 4. Dokumen RPL (BPSDM, DLHK dan KP3B) 5. Pembinaan Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota) 6. Pemantauan dan Evaluasi Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota)	=(6/6)*100	100	100

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah :

- 1) Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Rumus perhitungan yang digunakan Σ lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dibagi target lokasi 4 tahun dikali 100. Target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 61,5 % Capaian tahun 2024 adalah 64% (Prosentase Capaian 104,07%)

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembagi Persegi	Nilai Hasil	
8	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Σ lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dibagi target lokasi 4 tahun	Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah persentase dari pencapaian upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PSLB3PP	61,5 Persen	1. jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebanyak 112 lokasi (udara 64 kali, sungai 40 kali, laut 8 kali) 2. jumlah lokasi penanggulangan pencemaran tidak ada (= 0) 3. jumlah lokasi pemulihan pencemaran/proklam = 64 lokasi jadi realisasi = 112+0+64 = 176 target lokasi 4 tahun adalah: 1. target pencegahan pencemaran 202 lokasi 2. target penanggulangan pencemaran 13 titik 3. target pemulihan pencemaran/proklam 60 titik jadi total target = 275 lokasi	=(176/275)x 100	64 Persen	104,07

- 2) Indikator Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan. Rumus perhitungan yang digunakan Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan $IK = (\% IK \text{ Peningkatan Kompetensi} + \% IK \text{ Pelayanan}) / (\text{Total } \% IK) \times 100 = \%$. Target yang

ditetapkan tahun 2024 adalah 21,8% , Realisasi pada tahun 2024 adalah 21,8% (Prosentase Capaian 100%)

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan indikator	Sumber Data	Penasang/Jawab	Target	Realisasi			Capaian [%]
							Nilai Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil	
20	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan IK=(% IK Peningkatan Kompetensi+% IK Pelayanan)/(Total % IK) x 100 %	Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan adalah Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Parameter Kualitas Lingkungan dan Pelayanan Pengujian Parameter Lingkungan Kepada Masyarakat	DINAS LHK	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	21.8 Persen	Penambahan Parameter Lingkup Akreditasi dari Tahun 2024 direncanakan sebanyak 4 parameter dari 81 parameter sampai dengan tahun 2026 Indikator kerja lingkup akreditasi=(28 parameter)/(81 parameter) x 100%=34,6 % Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan Kab/Kota se Provinsi Banten Direncanakan sebanyak 20 orang dengan dengan rencana sampai tahun 2026 sebanyak 100 orang dan Realisasi sebanyak 7 orang untuk pelatihan Internal saja hal ini karena anggaran bimbingan teknis tidak tersedia di tahun 2024 Indikator kerja pembinaan mutu=(7 orang)/(100 orang) x 100%=7 % Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2024 direncanakan sebanyak 21 sampel pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai dengan tahun 2026 sebanyak 600 sampel dan realisasi sebanyak 161 sampel pada tahun 2024 Indikator kerja Pengujian dan analisis=(161 sampel)/(600 sampel) x 100%=26,8 % Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal Tahun 2024 direncanakan sebanyak 300 sampel dengan rencana s/d 2026 sebanyak 1000 sampel dan realisasi sebanyak 347 sampel pada tahun 2024 Indikator kerja Pengujian dan analisis=(347 sampel)/(1000 sampel) x 100%=34,7 % Total % IK dihitung dari = Tahun 2022 + Tahun 2023 + Tahun 2024 + Tahun 2025 + Tahun 2026 =92 + 99,6 + 101,3 + 106,6 + 72 = 473,5	IK= (34,6 + 7 + 26,8 + 34,7)/473,5 x 100= 100,3/473,5=21,8 %	21.8 Persen	100

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ini adalah :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan
5. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)
6. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD Lab)

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah Persentase Pencapaian Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah presentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun.

Rumus perhitungan indicator yang digunakan adalah Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati = $(\Sigma \text{ rencana induk pengelolaan kehati yang disusun} + \Sigma \text{ jumlah dokumen laporan peningkatan})$

kapasitasnya dalam pengelolaan kehati + Σ dokumen laporan sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang dikelola) tahun berjalan dibagi target pengelolaan 14 dokumen dalam 4 tahun dikali 100%.

Target Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup pada tahun 2024 adalah sebanyak 14,29 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Hidup ini adalah :

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Tahun 2024 ini adalah sebesar 14,29% (Prosentase Capaian 100%)

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil	
9	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati = (2 rencana induk: pengelolaan kehati yang disusun + 2 jumlah dokumen laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati + 2 dokumen laporan sarana dan prasarana pengelolaan kehati yang dikelola) tahun berjalan dibagi target pengelolaan 14 dokumen dalam 4 tahun dikali 100%	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah persentase ketersediaan Rencana Induk, laporan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehati, dan laporan sarana sarana prasarana pengelolaan kehati yang meningkat tiap tahun	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PSLEBPP	14,29 Persen	1. rencana induk: pengelolaan kehati yang disusun 2. dokumen laporan peningkatan kapasitas 3. dokumen laporan sarpras target 14 dokumen dalam 4 tahun	= $\frac{14}{100} \times 100\%$ = 14,29%	14,29	100

4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Indikator Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH adalah Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (%). Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh kementerian lhk dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup setiap tahun.

Rumus perhitungan indicator yang digunakan adalah Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi

jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%.

Target Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH pada tahun 2024 adalah sebanyak 11.76 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH ini adalah :

1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Capaian Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH pada Tahun 2024 ini adalah : 17,65% (Prosentase Capaian 150,06%)

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Pengebut	NilaiHas	
3	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%	Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh kementerian lkh dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup setiap tahun	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	11,76 persen	1. MHA Karang (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg) 2. MHA Cibarani (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg) 3. MHA Pasir Eurih (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg)	=3/17*100	17,65	150,06

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%). Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga.

Rumus perhitungan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%.

Target Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebanyak 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Capaian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada Tahun 2024 ini adalah 100% (prosentase capaian 100%)

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitung	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Pembebut	Nilai/Has	
4	Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%	Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100 Persen	1. Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (1 Dokumen) 2. Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Penyuluhan dan Kampanye (150 org) 3. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat (288 Keluarga) 4. Jumlah lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (348 Lembaga)	=787/787*100	100	100

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Indikator

Indikator Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/Kab.Kota). Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan.

Rumus perhitungan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah Jumlah sekolah

adiwiyata/Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan.

Target Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada tahun 2024 adalah sebanyak 68 Lembaga/7 Kab.kota.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat adalah :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat pada Tahun 2024 ini adalah : 135 lembaga/7 kab kota (Proesentase capaian 198,53%)

No.	Indikator	etode/Rumus Perhitung	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Pengebut	Nilai/Has	
5	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/Kab.Kota)	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	68 lembaga / 7 Kab.kota	1. Jumlah sekolah adiwiyata yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan : Adiwiyata Provinsi 83 Sekolah, Adiwiyata Nasional/Mandiri 52 Sekolah 2. Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan : 7 Kab/Kota	=135 Lembaga/ 7 Kab.Kota	135 Lemba ga/ 7 Kab.Kota	198,53

7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup (%). Banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan :

1. Memiliki dokumen dan perizinan dibidang lingkungan hidup secara lengkap dan belum habis masa berlakunya.
2. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan dan peraturan di bidang lingkungan hidup.

- Mengirimkan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rutin sesuai peraturan.

Rumus perhitungan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah

$$=((\text{Jumlah industri yang diawasi} - \text{jumlah industri yang tidak taat}))/(\text{Jumlah industri yang diawasi}) \times 100\%$$

Target Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada tahun 2024 adalah 85 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah :

- Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2024 adalah 86,87% (Prosentase capaian sebesar 102,21%)

No.	Indikator	etode/Rumus Perhitung	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Pembebut	Hasil/Has	
6	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	jumlah pelaku usaha yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di kali 100%	Banyaknya pelaku usaha /kegiatan yang dilaksanakan pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	85 Persen	1. terdapat 160 pelaku usaha yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 2. telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 139 pelaku usaha	= (139 / 160) x 100	86.875 Persen	102,21

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indikator Program penanganan pengaduan lingkungan hidup adalah Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti (%). Jumlah pengaduan yang

ditindak lanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan :

- a) Pemeriksaan kelengkapan pengaduan
- b) Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan
- c) Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan
- d) Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan

Rumus perhitungan Program penanganan pengaduan lingkungan hidup adalah Jumlah pengaduan yang masuk dikurangi jumlah pengaduan yang tidak selesai dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%

Target Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup adalah :

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada Tahun 2024 ini adalah 100% (Prosentase Capaian 100%)

No	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Perjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Rencana			Capaian
							Tahun Data	Pembatas/Persentase	Mula/Tahun	
7	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjut	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjut dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjut adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan : 1. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan 2. Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan 3. Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan 4. Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100 Persen	Jumlah Pengaduan yang masuk 26, yang ditindak lanjut 26 = 100%	= (26/26) x 100	100 Persen	100

9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Indikator Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah Presentase

Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3 (%).Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3

Rumus perhitungan Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah Persentase Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan

Target Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah :

1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Capaian Program pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) pada Tahun 2024 ini adalah 100% (Prosentase capaian 100%)

No.	Indikator	Metode/Formulir Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian
							Jumlah Data	Persentase/ Penyelesaian	Nilai Aktual	
50	Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Persentase Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan	Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PSLEBPP	100	persentase Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 sebesar 100 Persen = jumlah permohonan fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dibagi jumlah pemohon dikali 100 persen terdapat 5 permohonan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3, dan difasilitasi sebanyak 5 Pemohon. Persentase Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan 100 Persen = jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan pada tahun 2024 (30 perusahaan/capaian koordinasi 11 perusahaan sebesar 100% dan capaian fasilitasi 19 perusahaan sebesar 100%) dibagi target Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 tahun 2024 30 Perusahaan (100%) dikali 100% Target Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 tahun 2024 adalah sebanyak 11 perusahaan dan sudah dilakukan pembinaan terhadap 11 perusahaan tersebut	$\frac{100 + 100\%}{100\% + 100\%} = 100\%$	100%	100

10. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator Program Pengelolaan Persampahan adalah prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi (%). Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditingani x 100%

Rumus perhitungan Program Pengelolaan Persampahan adalah

$$=(\Sigma \text{ sampah kerjasama tahun } n)/(\Sigma \text{ Target Volume sampah ditangani Tahun } n) \times 100\%$$

Target Program Pengelolaan Persampahan pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Persampahan adalah :

1. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

Capaian Program Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2024 ini adalah 101,55% (Prosentase capaian sebesar 101,55%)

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil	
11	Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	Jumlah sampah kerjasama pada tahun n dibagi target volume sampah ditangani pada tahun n x 100%	Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditingani x 100%	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PSLB3PP	100	Jumlah sampah kerjasama pada tahun 2024 adalah sebanyak : 264 Ton, Target Volume sampah yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebanyak 258 Ton	= (262/258) x 100% =	101,55	101,55

11. Program Pengelolaan Hutan

Indikator Program Pengelolaan Hutan adalah:

- a. Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (%).
- b. Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang.
- c. Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon.
- d. Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat.

Rumus perhitungan Indikator Program Pengelolaan Hutan untuk masing masing indikator adalah :

- a. Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (%) =
Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%.

- b. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang adalah Jumlah Lahan yang terehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT
- c. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah Jumlah Lahan yang terehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC
- d. Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat adalah Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga dengan rumus perhitungan Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat dibagi Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100%

Target Indikator Program Pengelolaan Hutan pada tahun 2024 untuk masing masing indikator adalah

- a. Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan (25 %).
- b. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang (2.500 Ha).
- c. Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (2.500).
- d. Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat (90%).

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Hutan adalah :

1. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
2. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
4. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³ /Tahun
5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)

6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³ /Tahun (CDLHK LT)
7. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)
8. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³ /Tahun (CDLHK PSC)
9. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)
10. Perbenihan Tanaman Hutan

Capaian Program Pengelolaan Hutan pada tahun 2024 untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut :

- a. Capaian persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan adalah sebesar 44,57 % dengan prosentase capaian sebesar 178,28%

No	Indikator	Metode/Humas Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Hasil			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Pembebut	Hasil	
12	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	Jumlah dokumen perencanaan hutan tahun ke n + jumlah dokumen pemanfaatan hutan tahun ke n + jumlah unit management HHK tahun ke n + jumlah unit management HHBK tahun ke n dibagi target 4 tahun	Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	25%	1. realiasi dokumen perencanaan hutan = 6 dokumen 2. realiasi dokumen pemanfaatan hutan = 4 dokumen 3. realisasi unit manajemen HHK = 24 unit management 4. realisasi unit management HHBK = 7 unit management Target 4 tahun 1. dokumen perencanaan = 20 dokumen 2. dokumen pemanfaatan hutan = 16 Dokumen 3. target unit manajemen HHK = 40 unit management 4. target unit management HHBK = 28 unit management	$= \frac{(6+4+24+7)}{(20+16+40+16)} \times 100\%$	44,57	178,28

- b. Capaian luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang adalah seluas 2.830 Ha dengan prosentase capaian sebesar 113,2%

No	Indikator	Metode/Humas Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Hasil			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Pembebut	Hasil	
16	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	Jumlah Lahan yang terehabilitasi = Z pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pemangrovean hutan kota), maupun yang terehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipit Teknik (Sumur Resapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah lebak dan tangerang	DINAS LHK	KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG	2500 HA	Jumlah pohon yang ditanam = 1.415.000 batang yang tertanam pada 13 KTH dan 32 Kelompok, di wilayah Lebak Tangerang		2830 Ha	113,2

- c. Capaian Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon adalah seluas 2.363,32 Ha dengan prosentase capaian sebesar 94,53%

No.	Indikator	Metode/Humus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembagi	Hasil	
18	Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar pertahun wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Jumlah Lahan yang ter rehabilitasi = 3 pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Mumi = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang ter rehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Resapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah Pandeglang, Serang Cilegon	DINAS LHK	KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON	2500 HA	Jumlah bibit tertanam pada hutan mangrove = 21.500 batang = 5,3 Ha Jumlah bibit tertanam pada hutan rakyat pengkayaan = 706.641 batang = 2.355,47 Ha	= 5,3 Ha + 2.355,47 Ha = 2.363,32 Ha	2.363,32 Ha	94,53

- d. Capaian persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat adalah 99,12% dengan prosentase capaian sebesar 110,13%

No.	Indikator	Metode/Humus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembagi	Hasil	
22	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat = Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat dibagi Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100%	Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	DINAS LHK	KEPALA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	90 Persen	Jumlah bibit tanaman yang dibagikan sebanyak : 112.640 batang jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia sebanyak : 113.650 batang	= (112.640 / 113.650) x 100	99.12 Persen	110,13

12. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Indikator Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun (%).

Adapun Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten.

Rumus perhitungan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah:

$$\frac{\text{Jumlah DAS yang ditangani Tahun N}}{\text{Jumlah Keseluruhan DAS Prioritas}} \times 100\%$$

Target Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada tahun 2024 adalah 20%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah :

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Capaian Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Tahun 2024 ini adalah sebesar 40% dengan Prosentase capaian sebesar 200%

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil	
15	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Jumlah DAS yang ditangani pertahun / DAS Prioritas x 100%	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten	DINAS LHK	KEPALA BIDANG DAS, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20 Persen	1. DAS Prioritas : Cidurian, Cijung, Cidanau, Cibanten, Cisdane 2. DAS Yang ditangani Cidanau dan Cijung	= 2/5 x 100%	40	200

13. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Indikator Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya adalah:

- a. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten
- b. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang.
- c. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon
- d. Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun

Rumus perhitungan Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk masing masing indicator adalah :

- a. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten = Rata-rata Persentase Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
- b. Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun di wilayah LT

- c. Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun di wilayah PSC
- d. Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %
- e. Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %

Target Indikator Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada tahun 2024 untuk masing masing indikator sebagai berikut :

- a. Persentase Pengelolaan TAHURA Banten 100 %
- b. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang 9 Kelompok
- c. Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon 9 Kelompok
- d. Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun 28,57%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya adalah :

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)
4. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)

5. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)
6. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Capaian Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya pada tahun 2024 untuk masing masing indikator adalah :

- a. Capaian persentase Pengelolaan TAHURA Banten capaian kinerja nya sebesar 100% dengan prosentase capaian kinerja sebesar 100%

No.	Indikator	Metode/Rumus Penghitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembatas/Pengukur	Nilai Aktual	
23	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura	Pengelolaan tahura meliputi pengelolaan hutan konservasi untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, pelestarian budaya dan potensi flora, fauna serta sarana prasarana penunjangnya.	DINAS LHK	KEPALA UPTD TAHURA BANTEN	100 Persen	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura ~50% + 50 % ~100 %	=50% + 50 % ~100 %	100 Pers	100

- b. Capaian indikator jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang adalah 9 kelompok dengan prosentase capaian sebesar 100%

No.	Indikator	Metode/Rumus Penghitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembatas/Pengukur	Nilai Aktual	
17	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	DINAS LHK	KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG	9 Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan bernilai ekosistem penting : 1. KTH Saung Ayub 2. KTH Muara Cemerlang 3. KTH Mapuca 4. KTH Mangrove Lestari Lontar 5. KTH Cirinten 6. KTH Bayah Timur TSL : 1. Kelompok Penangkaran Burung 2. kelompok penangkaran jangkrik 3. kelompok Transplantasi Koral	= 6 +3 = 9 kelompok	9 kelompok	100

- c. Capaian indikator Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang adalah 9 kelompok dengan prosentase capaian sebesar 100%

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Hasil			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil	
19	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok setahun	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Pandeglang, Serang Cilegon	DINAS LHK	KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON	9 Kelompok	Kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekosistem penting 1. KTH Tunas Baru desa anyar 2. Kelompok pe cinta alam pesisir Pulau dua 3. Kelompok segara biru 4. kelompok budidaya ikan loris manis (Mangrove) 5. KTH Alam sejatitera Koko kebi Serang Kelompok TSL 1. sukar Glider serang 2. jumlah serang 3. conan reptil serang 4. kelompok pedagang burung Pandeglang	= 5 + 4 = 9 Kelompok	9 Kelompok	100

- d. Capaian Indikator Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani per Tahun adalah sebesar 28,57% dengan prosentase capaian sebesar 100%

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Hasil			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil	
14	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %	Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang ditangani setiap tahun dibagi 14 kawasan ekosistem bernilai penting di provinsi banten	DINAS LHK	KEPALA BIDANG DAS, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28,57 Persen	Jumlah KEE di Banten ada 14, yang ditangani 4 KEE (Serang kadu beureum Padarincang, Taman Kehati Serang, Lebak HA Kasepuhan Karang, Banten Mangrove Center Sawah Luhur) = $4/14 \times 100\% = 28,57$	= $4/14 \times 100\% = 28,57$	28,57 Pe	100

14. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan

Indikator Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan adalah Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun (Kelompok). Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial.

Rumus perhitungan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan adalah Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat = Σ KTH + FMU + Σ Penyuluh + Σ Kelompok Perhutanan Sosial.

Target Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan pada tahun 2024 adalah 47 Kelompok.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Capaian Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat di Bidang Kehutanan pada Tahun 2024 ini adalah 58 kelompok dengan prosentase capaian sebesar 123,40%

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)
							Isian Data	Pembilang Persekat	Hasil Persekat	
13	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat = Σ KTH + FMU + Σ Penyuluh + Σ Kelompok Perhutanan Sosial	Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial	DINAS LHK	KEPALA BIDANG DAS, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47 Kelompok	1. Jumlah KTH = 55 2. Jumlah FMU = 0 3. Jumlah Penyuluh = 1 4. Kelompok PS = 2 total 58 kelompok	$\frac{55+0+1+2}{47}$	58	123,40

16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu.

Rumus perhitungan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah = $\frac{\Sigma \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Kegiatan yang diampu}}$

Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2024 adalah 100 Persen.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)
15. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
16. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)
19. Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)
20. Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)
21. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)

22. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Tahun 2024 ini adalah sebesar 100% dengan Prosentase capaian sebesar 100%

No.	Indikator	Metode/Instrumen Pengukuran	Pengukuran Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Energi	Realisasi			Capaian (%)
							Tahun Data	Persentase Peningkatan	Realisasi	
1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	= 2 Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi / Jumlah Kegiatan yang diampu	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	DINAS LHK	SEKRETARIS DINAS LHK	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 7 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (7)	= (700/7)	100	100
					KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 3 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	= (300/3)	100	100
					KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 3 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	= (300/3)	100	100
					KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 2 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (2)	= (200/2)	100	100
					KEPALA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 4 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (4)	= (400/4)	100	100
					KEPALA UPTD LAHURA BANTEN	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 4 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (4)	= (400/4)	100	100

C. Capaian Pelaksanaan Kinerja Kegiatan

Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan/Keluaran dan sub kegiatan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Piihan Bidang Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024

 PROVINSI BANTEN LAPORAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024																				
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																				
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT																				
TRIMULAN : 4																				
APBD : APBD Perubahan																				
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Peninggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDIK)				61.576.778.468,00	27,29		16.123.416.467,00	24,43		9.832.512.957,00	89,53	60,98	57,37		27.548.453.118,18		44,74		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					59.823.665.468,00	27,20		15.445.419.537,00	24,26		9.361.258.906,00	89,21	60,61	57,41		26.787.105.017,18		44,78		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		45.656.595.468,00	26,82		10.898.276.122,00	26,81		8.306.143.270,00	99,95	76,22	62,43		23.341.213.486,18		51,12		
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persen)		100,00		401.008.000,00	53,05		216.749.359,00	53,05		335.430.181,00	100,00	89,51	88,73		335.430.181,00	88,73	83,65		
2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumupradja, SH, M.Si		9,00	80.000.000,00	13,22	1,00	11.459.109,00	13,22	1,00	10.580.000,00	100,00	92,33	94,75	9,00	70.650.391,00		88,31		
	Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	19.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	20.874.031,00	100,00	104,68	tidak ada target kinerja	tidak ada
	Penyusunan Daftar Rincian Kegiatan (DRK) DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	3.288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	tidak ada target kinerja	tidak ada
	Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	8.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	8.876.120,00	100,00	99,29	tidak ada target kinerja	tidak ada
	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, IKU dan RKT DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	1.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	1.488.080,00	100,00	97,90	tidak ada target kinerja	tidak ada
	Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja, IKU dan RKT DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	1.520.000,00	100,00	1,00	1.520.000,00	100,00	1,00	1.500.000,00	100,00	98,68	100,00	1,00	1.500.000,00	100,00	98,68	tidak ada	tidak ada
	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	12.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	11.164.180,00	100,00	91,06	tidak ada target kinerja	tidak ada
	Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Rencana) DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	5.850.000,00	59,55	0,00	4.367.609,00	59,55	0,00	3.982.500,00	100,00	91,18	59,55	1,00	3.982.500,00	59,55	66,08	tidak ada target kinerja	tidak ada
	Penyusunan Rencana Kerja (Rencana) DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	26.362.000,00	21,13	0,00	5.571.500,00	21,13	0,00	5.087.500,00	100,00	91,49	93,04	1,00	22.465.500,00	93,04	85,22	kegiatan perjanjian dinas dalam daerah telah dilaksanakan di bulan november hanya saja penitiansiran masuk di LRA bulan desember	melakukan koordinasi dengan keuangan
	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	300.000,00	100,00	93,75	tidak ada target kinerja	tidak ada
2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumupradja, SH, M.Si		1,00	9.000.000,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	1,00	6.526.400,00		72,52		
	Penyusunan RKA DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	9.000.000,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	1,00	6.526.400,00	100,00	72,52	sisa dari penawaran ATK	tidak ada

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		1,00	9.000.000,00	1,00	0,00	1.172.900,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	1,00	7.827.100,00		86,97		
	Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	9.000.000,00	1,00	0,00	1.172.900,00	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	1,00	7.827.100,00	1,00	86,97	SISA DARI UANG LEMBUR	TIDAK ADA
2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		1,00	5.000.000,00	100,00	1,00	5.000.000,00	100,00	1,00	1.500.000,00	100,00	30,00	100,00	1,00	1.500.000,00		30,00		
	Penyusunan Dokumen DPA SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	5.000.000,00	100,00	1,00	5.000.000,00	100,00	1,00	1.500.000,00	100,00	30,00	100,00	1,00	1.500.000,00	100,00	30,00	honor pendamping sudah cair di bulan november sudah diupload di kinerja november, di bulan desember penransferan ATK	koordinasi dengan keuangan
2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA -SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		1,00	5.000.000,00	52,00	1,00	2.600.000,00	52,00	1,00	2.500.000,00	100,00	96,15	100,00	1,00	4.900.000,00		98,00		
	Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	5.000.000,00	52,00	1,00	2.600.000,00	52,00	1,00	2.500.000,00	100,00	96,15	100,00	1,00	4.900.000,00	100,00	98,00	tidak ada target kinerja	tidak ada
2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Satuan: Laporan)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		5,00	100.000.000,00	41,77	5,00	42.979.700,00	41,77	5,00	39.709.300,00	100,00	92,39	81,54	5,00	84.471.990,00		84,47		
	Laporan Evaluasi Kinerja SAKIP Triwulanan (Laporan)		100,00	1,00	26.280.000,00	27,85	1,00	7.320.000,00	27,85	1,00	7.300.000,00	100,00	99,73	75,95	1,00	19.876.120,00	75,95	75,63	tidak ada target kinerja	tidak ada
	Laporan LUP (PPID Pelaksanaan DLHK Provinsi Banten) (Laporan)		100,00	1,00	11.956.000,00	25,85	1,00	3.556.000,00	25,85	1,00	3.369.300,00	100,00	94,75	100,00	1,00	11.739.450,00	100,00	98,19	tidak ada	tidak ada
	Laporan Evaluasi Kinerja Indikator Pembangunan Bidang LHKProvinsi Banten (Semesteran) (Laporan)		100,00	1,00	18.530.000,00	75,59	1,00	13.580.700,00	75,59	1,00	10.659.000,00	100,00	78,49	75,59	1,00	12.459.000,00	75,59	67,24	tidak ada	tidak ada
	Laporan Realisasi Fiskal dan Keuangan DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	18.240.000,00	33,34	1,00	6.080.000,00	33,34	1,00	6.000.000,00	100,00	98,68	83,33	1,00	15.465.420,00	83,33	84,79	tidak ada	tidak ada
	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	24.994.000,00	45,10	1,00	12.443.000,00	45,10	1,00	12.381.000,00	100,00	99,50	81,70	1,00	24.932.000,00	81,70	99,75	sisa perjalanan dinas	tidak ada
2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Satuan: Laporan)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		6,00	193.008.000,00	79,11	6,00	153.464.050,00	79,11	6,00	139.724.300,00	100,00	91,05	92,95	6,00	159.554.300,00		82,67		
	Pengelolaan Website DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	39.162.000,00	33,68	1,00	7.722.000,00	33,68	1,00	7.162.500,00	100,00	92,75	77,44	1,00	26.002.500,00	77,44	66,40	tidak ada	tidak ada
	Penyusunan LPPD DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	9.130.000,00	100,00	1,00	9.130.000,00	100,00	1,00	9.057.500,00	100,00	99,21	100,00	1,00	9.057.500,00	100,00	99,21	tidak ada	tidak ada
	Penyusunan LKPJ DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	9.490.000,00	100,00	1,00	9.490.000,00	100,00	1,00	7.055.900,00	100,00	74,35	100,00	1,00	7.055.900,00	100,00	74,35	tidak ada	tidak ada
	Penyusunan LKIP DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	2,00	57.589.000,00	75,10	2,00	49.485.050,00	75,10	2,00	40.157.500,00	100,00	81,15	91,70	2,00	41.147.500,00	91,70	71,45	tidak ada	tidak ada
	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja DLHK Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	77.637.000,00	100,00	1,00	77.637.000,00	100,00	1,00	76.290.900,00	100,00	98,27	100,00	1,00	76.290.900,00	100,00	98,27	pagu kontrak sendiri dari jasa tenaga ahli, biaya makan minum rapat dan biaya ATK pengandaan	koordinasi dengan keuangan
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (%)		100,00		35.539.122.000,00	27,77		8.440.218.832,00	27,75		18.341.424.316,18	99,92	67,79	64,74		18.341.424.316,18	64,74	51,61		
2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan: orang/Bulan)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		139,00	34.828.767.000,00	27,67	36,00	8.235.881.017,00	27,67	36,00	5.531.265.109,00	100,00	67,16	64,91	104,00	17.986.344.027,00		51,64		
	Pembayaran Gaji ASN (Orang/ Bulan)		100,00	70,00	10.101.554.000,00	21,54	18,00	1.567.034.706,00	21,54	18,00	2.231.778.597,00	100,00	142,42	64,48	52,00	6.495.534.100,00	64,48	64,30	TIDAK ADA	TIDAK ADA
	Pembayaran Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		100,00	69,00	24.727.213.000,00	30,18	18,00	6.668.846.311,00	30,18	18,00	3.299.486.512,00	100,00	49,48	65,09	52,00	11.490.809.927,00	65,09	46,47	TIDAK ADA	TIDAK ADA

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi sid Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		12,00	601.355.000,00	32,97	5,00	171.025.100,00	32,70	5,00	161.222.500,00	99,16	94,27	57,60	9,00	291.235.000,00		48,43		
	Pembayaran Honorarium Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		100,00	11,00	591.345.000,00	33,25	4,00	169.365.100,00	33,25	4,00	159.282.500,00	100,00	94,05	58,25	8,00	287.555.000,00	58,25	48,63	TIDAK ADA	TIDAK ADA
	Koordinasi dan Konsultasi terkait Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Laporan)		100,00	1,00	10.010.000,00	16,58	1,00	1.660.000,00	0,00	1,00	1.940.000,00	0,00	116,87	19,28	1,00	3.680.000,00	19,28	36,76	TIDAK ADA REALISASI	
2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		12,00	51.000.000,00	45,70	2,00	23.312.715,00	45,70	2,00	18.972.500,00	100,00	81,38	89,31	12,00	40.986.785,00		80,37		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DOKUMEN)		100,00	12,00	51.000.000,00	45,70	2,00	23.312.715,00	45,70	2,00	18.972.500,00	100,00	81,38	89,31	12,00	40.986.785,00	89,31	80,37	realisasi di bulan nopember	
2.11.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		1,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	84,62	0,00	1.320.004,18		20,31		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (DOKUMEN)		100,00	1,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	84,62	0,00	1.320.004,18	84,62	20,31	tidak ada realisasi	
2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Satuan: Laporan)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		1,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	5.440.000,00		83,69		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (LAPORAN)		100,00	1,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	5.440.000,00	0,00	83,69	tidak ada realisasi	
2.11.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		2,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	4.687.500,00		14,65		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (DOKUMEN)		100,00	2,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	4.687.500,00	0,00	14,65	tidak ada realisasi	
2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan: Laporan)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		1,00	6.500.000,00	100,00	1,00	6.500.000,00	0,00	1,00	6.330.000,00	0,00	97,38	0,00	1,00	6.330.000,00		97,38		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (LAPORAN)		100,00	1,00	6.500.000,00	100,00	1,00	6.500.000,00	0,00	1,00	6.330.000,00	0,00	97,38	0,00	1,00	6.330.000,00	0,00	97,38	tidak ada	
2.11.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Satuan: Dokumen)	Budi Dharma Sumapradja, SH, M.Si		1,00	6.500.000,00	53,85	1,00	3.500.000,00	53,85	1,00	3.583.500,00	100,00	102,39	53,85	1,00	5.081.000,00		78,17		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (DOKUMEN)		100,00	1,00	6.500.000,00	53,85	1,00	3.500.000,00	53,85	1,00	3.583.500,00	100,00	102,39	53,85	1,00	5.081.000,00	53,85	78,17	tidak ada realisasi	
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persen)		100,00		20.000.000,00	0,00			0,00	0,00	19.999.000,00	NaN	NaN	100,00		19.999.000,00	100,00	100,00		
2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Satuan: Laporan)			1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	19.999.000,00		100,00		
	Barang Penatausahaan BMD pada SKPD (Laporan)		100,00	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	19.999.000,00	100,00	100,00	Tidak ada Kinerja	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Itri			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen)		100,00		92.500.000,00	3,24		3.300.000,00	3,24		44.045.000,00	100,00	96,61	50,81		44.045.000,00	50,81	47,52		
2.11.01.1.05.0002 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Satuan: Paket)	Edwin Liger Jatnika, SE, M.Si		2,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	2,00	35.175.000,00		87,94		
	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)		100,00	2,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	2,00	35.175.000,00	100,00	87,94	Tidak Ada Permasalahan Karena Tidak Ada Target Realisasi Pada Bulan Desember.	-
2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Edwin Liger Jatnika, SE, M.Si		1,00	4.000.000,00	25,00	0,00	1.000.000,00	25,00	0,00	900.900,00	100,00	90,00	25,00	1,00	3.870.000,00		96,75		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		100,00	1,00	4.000.000,00	25,00	0,00	1.000.000,00	25,00	0,00	900.900,00	100,00	90,00	25,00	1,00	3.870.000,00	25,00	96,75	Tidak Ada Realisasi Karena sisa anggaran Monitoring dialihkan ke Belanja Fotocopy	-
2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Satuan: Orang)	Edwin Liger Jatnika, SE, M.Si		24,00	48.500.000,00	4,12	6,00	2.000.000,00	4,12	6,00	2.000.000,00	100,00	100,00	12,37	25,00	5.000.000,00		10,31		
	Pengajian Bulanan (Kali)		100,00	3,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	66,67	3,00	1.000.000,00	66,67	33,33	Tidak Ada Target Realisasi Anggaran Pada Bulan Desember.	-
	Senam Bulanan (Kali)		100,00	16,00	8.000.000,00	25,00	6,00	2.000.000,00	25,00	6,00	2.000.000,00	100,00	100,00	50,00	16,00	4.000.000,00	50,00	50,00	Tidak Ada Target Realisasi Pada Bulan Desember	-
	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan (Orang)		100,00	5,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Ada Target Realisasi Pada Bulan Desember.	-
2.11.01.1.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen)		100,00		521.805.458,00	30,60		159.559.468,00	30,60		348.965.864,00	99,99	101,84	58,49		348.965.864,00	58,49	66,88		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Liger Jatnika, SE, M.Si		3,00	42.865.000,00	23,33	1,00	10.300.000,00	23,32	0,00	10.094.100,00	99,96	100,94	23,32	2,00	26.861.100,00		62,66		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Paket)		100,00	3,00	42.865.000,00	23,33	1,00	10.300.000,00	23,32	0,00	10.094.100,00	99,96	100,94	23,32	2,00	26.861.100,00	23,32	62,66	Tidak Ada Realisasi, Karena Hanya Sisa Anggaran Belanja Alat Listrik Yang Dialihkan ke belanja Fotocopy	-
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Liger Jatnika, SE, M.Si		8,00	144.880.000,00	31,50	5,00	45.536.000,00	31,50	0,00	45.053.900,00	100,00	100,92	38,30	3,00	107.060.300,00		73,90		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		100,00	8,00	144.880.000,00	31,50	5,00	45.536.000,00	31,50	0,00	45.053.900,00	100,00	100,92	38,30	3,00	107.060.300,00	38,30	73,90	Tidak Ada Target Realisasi Pada Bulan Desember.	-
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Liger Jatnika, SE, M.Si		18,00	137.483.000,00	51,42	9,00	70.585.000,00	51,42	9,00	72.837.495,00	100,00	103,05	80,59	18,00	105.340.935,00		76,62		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Paket)		100,00	18,00	137.483.000,00	51,42	9,00	70.585.000,00	51,42	9,00	72.837.495,00	100,00	103,05	80,59	18,00	105.340.935,00	80,59	76,62	Tidak Ada Permasalahan apapun pada Sub Kegiatan ini.	-
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Edwin Liger Jatnika, SE, M.Si		2,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,01	2,00	19.842.618,00		99,21		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)		100,00	2,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,01	2,00	19.842.618,00	100,01	99,21	Tidak Ada Target Realisasi pada Bulan Desember	-
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Edwin Liger Jatnika, SE, M.Si		12,00	12.000.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	66,70	6,00	7.396.000,00		61,63		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)		100,00	12,00	12.000.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	66,70	6,00	7.396.000,00	66,70	61,63	Tidak Ada Target Realisasi pada Bulan Desember.	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Juniah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Saluran: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		12,00	119.578.466,00	22,29	3,00	33.338.466,00	22,29	3,00	33.517.000,00	99,96	100,84	57,45	12,00	82.464.911,00		55,13		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		100,00	12,00	119.578.466,00	22,29	3,00	33.338.466,00	22,29	3,00	33.517.000,00	99,96	100,84	57,45	12,00	82.464.911,00	57,45	55,13	Tidak Ada Permasalahan Apapun pada Sub kegiatan ini	-
2.11.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Juniah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Saluran: Dokumen)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		1,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	0,00		0,00		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		100,00	1,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	0,00	100,00	0,00	Tidak Ada Target Realisasi Pada Bulan Desember.	-
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100,00		8.433.477.000,00	22,26		1.877.211.661,00	22,26		3.999.500.825,00	100,00	111,54	52,02		3.999.500.825,00	52,02	47,42		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Juniah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Saluran: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		21,00	1.741.549.883,00	32,63	4,00	598.414.886,00	32,63	4,00	581.537.766,00	100,00	102,33	46,21	23,00	761.669.105,00		43,74		
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Penotretan (Laporan)		100,00	6,00	1.232.893.000,00	45,18	3,00	556.999.000,00	45,18	3,00	501.932.000,00	100,00	90,11	45,18	4,00	501.932.000,00	45,18	40,71	Dalam Proses Keuangan	
	Belanja Tagihan Listrik (Laporan)		100,00	10,00	453.144.883,00	2,44	1,00	11.415.886,00	2,44	1,00	79.705.766,00	100,00	696,20	45,80	10,00	235.345.701,00	45,80	50,79	Dalam Proses Keuangan	-
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Laporan)		100,00	5,00	45.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	78,26	9,00	24.391.404,00	78,26	53,83	Tidak Ada Anggaran	
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Juniah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Saluran: Laporan)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		29,00	5.691.627.117,00	19,56	9,00	1.308.796.771,00	19,56	9,00	1.512.114.000,00	100,00	115,53	53,53	16,00	3.237.831.720,00		48,38		
	Belanja Barang Pakai Habis (Laporan)		100,00	4,00	95.169.477,00	40,52	2,00	38.564.117,00	40,52	2,00	37.548.000,00	100,00	97,37	99,46	3,00	37.548.000,00	99,46	39,45	Sudah Habis	
	Belanja Jasa Kantor (Laporan)		100,00	12,00	5.193.587.000,00	18,08	3,00	1.119.928.000,00	18,08	3,00	1.329.836.240,00	100,00	118,74	52,07	6,00	2.946.075.240,00	52,07	47,60	0	0
	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi (Laporan)		100,00	12,00	333.170.646,00	24,10	3,00	80.304.660,00	24,10	3,00	74.729.760,00	100,00	93,06	57,85	6,00	182.207.480,00	57,85	54,69	0	0
	Belanja Sewa Gedung / Bangunan (Laporan)		100,00	1,00	70.000.000,00	100,00	1,00	70.000.000,00	100,00	1,00	70.000.000,00	100,00	100,00	100,00	1,00	70.000.000,00	100,00	100,00	anggaran Habis	
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)		100,00		648.682.000,00	19,12		201.436.800,00	19,51		251.848.300,00	102,06	65,28	58,45		251.848.300,00	58,45	38,82		
2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Juniah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Saluran: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		27,00	300.000.000,00	19,80	6,00	59.409.400,00	19,80	6,00	61.854.400,00	100,00	104,12	55,53	6,00	110.719.500,00		36,91		
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Beban Pajak dan Perawatan, dan Pembayaran BBM Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 (Unit)		100,00	27,00	300.000.000,00	19,80	6,00	59.409.400,00	19,80	6,00	61.854.400,00	100,00	104,12	55,53	6,00	110.719.500,00	55,53	36,91	Tidak Ada Kinerja	
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Juniah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan (Saluran: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		20,00	240.102.000,00	21,76	9,00	116.397.400,00	22,82	0,00	44.109.400,00	104,87	37,90	65,81	0,00	46.001.800,00		20,36		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 4, Roda 3 dan Roda Khusus/Enam (Unit)		100,00	20,00	240.102.000,00	21,76	9,00	116.397.400,00	22,82	0,00	44.109.400,00	104,87	37,90	65,81	0,00	46.001.800,00	65,81	20,36		
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Juniah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Saluran: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		72,00	47.890.000,00	25,51	39,00	25.630.000,00	25,51	1,00	25.538.000,00	100,00	96,64	50,34	1,00	32.950.000,00		68,67		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)		100,00	72,00	47.890.000,00	25,51	39,00	25.630.000,00	25,51	1,00	25.538.000,00	100,00	96,64	50,34	1,00	32.950.000,00	50,34	68,67		
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Juniah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Saluran: Unit)	Edwin Ligar Jatnika, SE, M.Si		1,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	29.187.000,00		97,29		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)		100,00	1,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	29.187.000,00	100,00	97,29	Tidak Ada Kinerja	
2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Edwin Ligar Jahnika, SE, M.Si		1,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	29.990.000,00		99,97		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)		100,00	1,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	29.990.000,00	0,00	99,97	Tidak Ada Kinerja	
2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			100,00		796.437.600,00	27,44		248.191.950,00	15,97		218.195.424,00	58,21	87,91	58,91		766.434.074,00		96,23		
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi (dokumen)		2,00		196.008.000,00	23,06		94.553.900,00	0,00		392.715.100,00	0,00	96,52	17,44		392.715.100,00	872,08	99,17		
2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi (Satuan: Dokumen)	Irwani Setiawan, S.Hut, M.Si		5,00	109.678.000,00	29,49	2,00	94.275.900,00	0,00	2,00	91.260.000,00	0,00	96,80	22,30	4,00	306.563.100,00		99,03		
	Penyusunan Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	86.330.000,00	0,00	0,00	1.002.650,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	0,00	1,00	85.327.310,00	0,00	98,84	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.1.002.650,- merupakan sisa anggaran dari efisiensi Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Banten	
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Banten Tahun 2024 (Dokumen)		100,00	1,00	86.338.000,00	0,00	0,00	1.305.250,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	80,00	1,00	85.032.710,00	80,00	98,49	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.1.305.250,- merupakan efisiensi kontrak dari Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Banten Tahun 2024	
	Penyusunan Laporan RKL-RPL Kantor BPSDM Provinsi Banten semester 1 Tahun 2024 (Dokumen)		100,00	1,00	45.661.000,00	0,00	0,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	0,00	0,00	45.043.000,00	0,00	98,60	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.536.000,- merupakan efisiensi kontrak dari Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan RKL-RPL Kantor BPSDM Provinsi Banten semester 1 Tahun 2024	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Laporan RKL RPL Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Semester 2 Tahun 2024 (Dokumen)		100,00	1,00	45.666.000,00	100,00	1,00	45.666.000,00	0,00	1,00	45.625.000,00	0,00	99,91	0,00	1,00	45.625.000,00	0,00	99,91	terdapat Efisiensi Kontrak Penyusunan Laporan RKL RPL Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Semester 2 Tahun 2024 sebesar Rp.40.000,-	
	Penyusunan Laporan RKL RPL Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Semester 2 Tahun 2024 (Dokumen)		100,00	1,00	45.666.000,00	100,00	1,00	45.666.000,00	0,00	1,00	45.635.000,00	0,00	99,93	0,00	1,00	45.635.000,00	0,00	99,93	Terdapat Efisiensi Kontrak Betanja Jasa Konsultansi Penyusunan Laporan RKL RPL Kantor DLHK Provinsi Banten Semester 2 Tahun 2024 sebesar Rp.30.000,-	
2.11.02.1.01.0006 Perinjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan perinjauan kembali (Satuan: Dokumen)	Irwani Setiawan, S.Hu, M.Si		1,00	86.330.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	Nilai	0,00	0,00	1,00	86.052.000,00		99,68		
	Penyusunan Review RPPLH Provinsi Tahun 2024 (Dokumen)		100,00	1,00	86.330.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	Nilai	0,00	0,00	1,00	86.052.000,00	0,00	99,68	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.278.000,- merupakan SILPA (Sisa Anggaran Yang Tidak Terpakai, yaitu efisiensi dari belanja nakanan dan minuman dan belanja fotocopi)	
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Straegis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Straegis (KLHS) Provinsi (dokumen)		2,00		400.428.600,00	31,77		153.545.050,00	31,77		373.718.974,00	100,00	82,52	100,00		373.718.974,00	5.000,00	93,33		
2.11.02.1.02.0005 Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan (Satuan: Dokumen)	Irwani Setiawan, S.Hu, M.Si		1,00	24.185.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	Nilai	0,00	100,00	1,00	23.355.000,00		96,57		
	Pelaksanaan Validasi Dokumen KLHS KabKota (Dokumen)		100,00	1,00	24.185.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	Nilai	0,00	100,00	1,00	23.355.000,00	100,00	96,57	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.930.000,- merupakan SILPA (Sisa Anggaran Yang Tidak Terpakai, yaitu efisiensi dari belanja nakanan dan minuman dan belanja fotocopi)	
2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Satuan: Dokumen)	Irwani Setiawan, S.Hu, M.Si		7,00	376.241.600,00	33,81	2,00	152.815.050,00	33,81	2,00	126.335.424,00	100,00	83,06	100,00	6,00	350.363.974,00		93,12		
	Pelaksanaan Asistensi Dokumen KLHS RP,MD (Dokumen)		100,00	1,00	47.240.000,00	0,00	0,00	8.110.000,00	0,00	0,00	0,00	Nilai	0,00	100,00	0,00	39.630.000,00	100,00	83,89	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.8.110.000,- merupakan SILPA (Sisa Anggaran Yang Tidak Terpakai, yaitu efisiensi dari belanja sewa hotel dan belanja penggantian)	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi sid Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 Penyusunan KLHS RPJMD (Dokumen)		100,00	1,00	44.400.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	1,00	39.000.000,00	100,00	87,81	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.7.600.000,- merupakan SILPA (Sisa Anggaran Yang Tidak Terpakai, yaitu efisiensi dari belanja sewa hotel)	
	Pelaksanaan Validasi Dokumen KLHS RPJMD (Dokumen)		100,00	1,00	44.400.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	1,00	34.100.000,00	100,00	75,80	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.7.600.000,- merupakan SILPA (Sisa Anggaran Yang Tidak Terpakai, yaitu efisiensi dari belanja sewa hotel)	
	Pelaksanaan Penyusunan Review Dokumen KLHS RPJMD (Dokumen)		100,00	2,00	113.000.600,00	0,00	0,00	2.305.050,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	2,00	110.696.550,00	100,00	97,98	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Anggaran Rp.2.111.430,- merupakan SILPA (Sisa Anggaran Yang Tidak Terpakai, yaitu efisiensi kontrak penyusunan jasa konsultasi KLHS RPJMD honor tim pojaja)	
	Asisten Penyusunan KLHS RPJMD (Dokumen)		100,00	1,00	62.110.000,00	100,00	1,00	62.110.000,00	100,00	1,00	61.910.000,00	100,00	99,71	100,00	1,00	61.930.000,00	100,00	99,71	Pelaksanaan Asistensi Penyusunan KLHS RPJMD sudah diselesaikan bulan November 2024	
	Validasi Penyusunan KLHS RPJMD (Dokumen)		100,00	1,00	65.090.000,00	100,00	1,00	65.090.000,00	100,00	1,00	65.005.424,00	100,00	99,87	100,00	1,00	65.005.424,00	100,00	99,87	Pelaksanaan Validasi Penyusunan KLHS RPJMD telah diselesaikan bulan November 2024	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		2.281.019.000,00	7,02		164.997.000,00	7,02		148.301.500,00	100,00	88,57	25,26		541.564.000,00		23,74		
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (dokumen)		5,00		2.281.019.000,00	7,02		164.997.000,00	7,02		541.564.000,00	100,00	88,57	25,26		541.564.000,00	505,14	23,74		
2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si		1,00	20.100.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	6,52	1,00	0,00		0,00		
	Pergalangan dinas kegiatan pemantauan kualitas udara, laut & sungai (Dokumen)		100,00	1,00	20.100.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	6,52	1,00	0,00	6,92	0,00	Tidak ada Target kinerja	
2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatno, ST, M.Si		1,00	10.000.000,00	3,00	0,00	627.500,00	3,00	0,00	273.600,00	100,00	43,50	100,00	1,00	9.646.100,00		96,45		
	Rapat koordinasi program kampung iklim 2024 (Laporan)		100,00	1,00	10.000.000,00	3,00	0,00	627.500,00	3,00	0,00	273.600,00	100,00	43,50	100,00	1,00	9.646.100,00	100,00	96,45	Tidak ada target	
2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Satuan: Laporan)	Ruli Riatno, ST, M.Si		1,00	10.000.000,00	2,30	0,00	230.000,00	2,30	0,00	112.500,00	100,00	48,91	100,00	1,00	9.882.500,00		98,82		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (pengadaan tempat sampah) (Laporan)		100,00	1,00	10.000.000,00	2,30	0,00	230.000,00	2,30	0,00	112.500,00	100,00	48,91	100,00	1,00	9.882.500,00	100,00	98,62	Tidak ada target	
2.11.01.1.01.0005 Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Satuan: Laporan)	Ruli Riatne, ST, M.Si		64,00	1.942.950.000,00	6,10	6,00	122.981.500,00	6,10	6,00	105.872.900,00	100,00	86,09	22,15	64,00	407.429.900,00		20,57		
	Pembinaan profil menuju tingkat Nasional (Laporan)		100,00	8,00	141.488.000,00	0,31	0,00	448.000,00	0,31	0,00	402.500,00	100,00	89,93	100,00	8,00	132.296.900,00	100,00	93,50	Tidak ada target	
	Konsultasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pembinaan proklam (Laporan)		100,00	1,00	20.692.000,00	1,45	0,00	302.000,00	1,45	0,00	300.600,00	100,00	99,34	62,91	1,00	15.973.000,00	62,91	77,19	Tidak ada target	
	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Laporan)		100,00	22,00	1.125.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target	
	Sosialisasi program kampung iklim (Laporan)		100,00	33,00	655.380.000,00	17,97	6,00	122.231.500,00	17,97	6,00	105.170.000,00	100,00	86,04	42,09	33,00	259.160.000,00	42,09	39,54	Tidak ada target	
2.11.01.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Satuan: Laporan)	Ruli Riatne, ST, M.Si		1,00	10.000.000,00	2,99	0,00	299.000,00	2,99	0,00	32.500,00	100,00	17,56	100,00	1,00	9.153.500,00		97,54		
	Pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (pengadaan benih tanaman) (Laporan)		100,00	1,00	10.000.000,00	2,99	0,00	299.000,00	2,99	0,00	32.500,00	100,00	17,56	100,00	1,00	9.153.500,00	100,00	97,54	Tidak ada target	
2.11.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun (Satuan: laporan)	Ruli Riatne, ST, M.Si		1,00	15.640.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	32,42	1,00	4.538.000,00		29,02		
	Perjalanan Dines dalam rangka Verifikasi Lapangan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran (Laporan)		100,00	1,00	15.640.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaN	NaN	32,42	1,00	4.538.000,00	32,42	29,02	Tidak ada target unerja	
2.11.01.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan In (Satuan: Lokasi)	Ruli Riatne, ST, M.Si		16,00	241.880.000,00	16,73	16,00	40.460.000,00	16,73	16,00	39.945.000,00	100,00	98,73	35,95	16,00	79.890.000,00		33,03		
	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan beserta Pengadaan Alat -alat Lab (Lokasi)		100,00	16,00	241.880.000,00	16,73	16,00	40.460.000,00	16,73	16,00	39.945.000,00	100,00	98,73	35,95	16,00	79.890.000,00	35,95	33,03	Tidak ada target unerja	
2.11.01.1.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Satuan: Kegiatan)	Ruli Riatne, ST, M.Si		3,00	20.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	20.379.000,00		99,70		
	kegiatan rapat koordinasi indeks kualitas lingkungan untuk perhitungan indeks kualitas air dan emisi (Kegiatan)		100,00	3,00	20.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	20.379.000,00	100,00	99,70	Tidak ada target unerja	
2.11.01.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Satuan: Dokumen)	Ruli Riatne, ST, M.Si		1,00	10.000.000,00	3,90	0,00	399.000,00	3,90	0,00	45.000,00	100,00	11,28	19,00	1,00	45.000,00		0,45		
	Rapat Inventarisasi GRK (Laporan)		100,00	1,00	10.000.000,00	3,90	0,00	399.000,00	3,90	0,00	45.000,00	100,00	11,28	19,00	1,00	45.000,00	19,00	0,45	Tidak ada target	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			100,00		6.000.000,00	100,00		6.900.000,00	100,00		5.980.000,00	100,00	99,67	100,00		5.980.000,00		99,67		
2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi (persen)		100,00		6.000.000,00	100,00		6.900.000,00	100,00		5.980.000,00	100,00	99,67	100,00		5.980.000,00	100,00	99,67		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.04.1.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Satuan: Orang)	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Satuan: Orang)	Ruli Ratno, ST, M.Si		20,00	6.000.000,00	100,00	20,00	6.000.000,00	100,00	20,00	5.980.000,00	100,00	99,67	100,00	20,00	5.980.000,00		99,67		
	Pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati (Orang)		100,00	20,00	6.000.000,00	100,00	20,00	6.000.000,00	100,00	20,00	5.980.000,00	100,00	99,67	100,00	20,00	5.980.000,00	100,00	99,67	Tidak ada target	
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			100,00		50.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	100,00		38.640.000,00		77,28		
	2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelaaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (dokumen)		6,00		50.000.000,00	0,00		0,00		38.640.000,00	NaN	NaN	100,00		38.640.000,00	1.666,67	77,28		
2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen bin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/bin Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha (Satuan: Dokumen)	Ruli Ratno, ST, M.Si		1,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	14.950.000,00		59,80		
	Pembinaan Dan Evaluasi Terhadap Industri Yang Persetujuan Teknis Dan Rincian Teknis TPS dan LB3 di Keluaran Oleh DLHK Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	14.950.000,00	100,00	59,80	Tidak ada target	
2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Satuan: Dokumen)	Ruli Ratno, ST, M.Si		1,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	23.690.000,00		94,76		
	Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 (Dokumen)		100,00	1,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	23.690.000,00	100,00	94,76	Tidak ada target	
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			100,00		127.992.400,00	22,13		23.227.400,00	7,84		22.108.212,00	35,26	95,18	85,60		125.973.212,00		99,12		
	2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan bin Lingkungan dan bin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Penerbitaan Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan bin Lingkungan dan bin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi (Persetujuan)		100,00		127.992.400,00	22,13		23.227.400,00	7,84		22.973.212,00	35,26	95,18	85,60		125.973.212,00	85,60	99,12	
2.11.06.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban bin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Satuan: Dokumen)	Iwan Setiawan, SHu, M.Si		16,00	1.458.400,00	0,00	4,00	1.458.400,00	0,00	4,00	1.420.000,00	NaN	97,37	100,00	4,00	1.420.000,00		97,37		
	Koordinasi dan Konsultasi (Dokumen)		100,00	16,00	1.458.400,00	0,00	4,00	1.458.400,00	0,00	4,00	1.420.000,00	NaN	97,37	100,00	4,00	1.420.000,00	100,00	97,37	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024 Sisa Anggaran Rp.38.400 - adalah sisa dari biaya pengadaan	
2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yangawasi (Satuan: Badan Usaha)	Iwan Setiawan, SHu, M.Si		160,00	125.534.000,00	22,49	15,00	21.769.000,00	7,93	16,00	20.980.212,00	35,26	95,04	85,44	127,00	124.553.212,00		99,14		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pengawasan Langsung (Badan/Usaha)		100,00	110,00	101.080.000,00	27,66	16,00	20.240.000,00	9,56	16,00	20.100.000,00	34,56	99,31	81,90	77,00	108.940.000,00	81,90	96,86	Tidak Ada Target Kinerja di Bulan Desember 2024	
	Pengawasan Tidak Langsung (Badan/Usaha)		100,00	50,00	24.554.000,00	1,22	0,00	1.529.000,00	1,22	0,00	588.212,00	100,00	38,47	100,00	50,00	21.613.212,00	100,00	96,17	Sisa Anggaran Rp.935.000,- dari efisiensi belanja makanan dan minuman rapat dan belanja narasumber	
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			100,00		133.400.000,00	91,70		133.400.000,00	0,00		56.850.000,00	0,00	42,62	0,00		56.850.000,00		42,62		
2.11.07.1.01 Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak (dokumen)	Iwan Setiawan, SHut, M.Si	1,00		8.400.000,00	0,00		8.400.000,00	0,00		7.800.000,00	NaV	92,86	0,00		7.800.000,00	0,00	92,86		
2.11.07.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Satuan: Dokumen)	Iwan Setiawan, SHut, M.Si		1,00	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	NaV	92,86	0,00	0,00	7.800.000,00		92,86		
	Pengumpulan Data Kearifan Lokal Terkait PPLH (Dokumen)		100,00	1,00	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	NaV	92,86	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	92,86	Tidak ada target kegiatan	
2.11.07.1.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan (Lembaga)		2,00		125.000.000,00	100,00		125.000.000,00	0,00		49.050.000,00	0,00	39,24	0,00		49.050.000,00	0,00	35,24		
2.11.07.1.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Pengantar Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan (Satuan: Lembaga)	Iwan Setiawan, SHut, M.Si		1,00	125.000.000,00	100,00	1,00	125.000.000,00	0,00	1,00	49.050.000,00	0,00	39,24	0,00	1,00	49.050.000,00		35,24		
	Rapat Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Banten (Lembaga)		100,00	1,00	125.000.000,00	100,00	1,00	125.000.000,00	0,00	1,00	49.050.000,00	0,00	39,24	0,00	1,00	49.050.000,00	0,00	35,24	Tidak ada target kegiatan	
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100,00		855.615.000,00	2,33		207.537.565,00	0,00		191.560.000,00	0,00	92,30	58,09		548.748.945,00		64,14		
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi (Persen)		100,00		855.615.000,00	2,33		207.537.565,00	0,00		548.748.945,00	0,00	92,30	58,09		548.748.945,00	58,09	64,14		
2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Satuan: Dokumen)	Iwan Setiawan, SHut, M.Si		1,00	19.960.000,00	100,00	1,00	19.960.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	48,60	0,00	0,00	9.700.000,00		48,60		
	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Sekolah Adiwiyata) Tingkat Provinsi (Dokumen)		100,00	1,00	19.960.000,00	100,00	1,00	19.960.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	48,60	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	48,60	Tidak ada target kegiatan	
2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pesaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat (Satuan: Orang)	Iwan Setiawan, SHut, M.Si		150,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaV	NaV	91,44	150,00	38.997.600,00		76,00		
	Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (Orang)		100,00	150,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaV	NaV	91,44	150,00	38.997.600,00	91,44	76,00	Tidak ada target kegiatan	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2.11.08.1.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat (Satuan: Keluarga)	Iwan Setiawan, S.Hut, M.S		288,00	451.330.000,00	0,00	0,00	4.513.610,00	0,00	0,00	730.000,00	NaN	16,17	100,00	101,00	193.851.345,00	100,00	42,95		
	Rapat Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)		100,00	30,00	44.461.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	31.121.345,00	100,00	70,00	Tidak ada target kegiatan	
	Sosialisasi Pengelolaan LH Untuk Kehidupan yang Sehat (Keluarga)		100,00	238,00	406.868.655,00	0,00	0,00	4.513.610,00	0,00	0,00	730.000,00	NaN	16,17	100,00	101,00	192.730.000,00	100,00	40,00	Tidak ada target kegiatan	
2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Satuan: Lembaga)	Iwan Setiawan, S.Hut, M.S		348,00	334.325.000,00	0,00	0,00	183.063.955,00	0,00	0,00	181.130.000,00	NaN	98,94	0,00	122,00	306.200.000,00	0,00	91,59		
	Rapat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang LH untuk Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga)		100,00	18,00	26.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target kegiatan	
	Sosialisasi Pengelolaan LH Untuk Kehidupan yang Sehat (Lembaga)		100,00	330,00	307.680.000,00	0,00	0,00	183.063.955,00	0,00	0,00	181.130.000,00	NaN	98,94	0,00	122,00	306.200.000,00	0,00	99,52	Tidak ada target kegiatan	
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			100,00		150.000.000,00	0,00		4.841.800,00	0,00		0,00	NaN	0,00	15,04		30.950.000,00		20,63		
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Lembaga)		93,00		150.000.000,00	0,00		4.841.800,00	0,00		30.950.000,00	NaN	0,00	15,04		30.950.000,00	37,48	20,63		
2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Satuan: Entitas)	Iwan Setiawan, S.Hut, M.S		75,00	150.000.000,00	0,00	0,00	4.841.800,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	15,04	50,00	30.950.000,00		20,63		
	Penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (sekolah Adiwiyata), Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri (Entitas)		100,00	72,00	136.540.000,00	0,00	0,00	4.841.800,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	28,64	47,00	19.260.000,00	28,64	14,11	Tidak ada target kegiatan	
	Penilaian Kota Berwawasan Lingkungan di Provinsi Banten (Entitas)		100,00	3,00	13.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	3,00	11.590.000,00	100,00	66,65	Tidak ada target kegiatan	
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		186.510.000,00	21,25		29.530.000,00	21,25		21.134.000,00	100,00	102,94	58,04		91.844.000,00		49,24		
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi (Persen)		100,00		186.510.000,00	21,25		29.530.000,00	21,25		91.844.000,00	100,00	102,94	58,04		91.844.000,00	58,04	49,24		
2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjaati kewenangan Provinsi (Satuan: Perkara)	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjaati kewenangan Provinsi (Satuan: Perkara)	Iwan Setiawan, S.Hut, M.S		20,00	39.000.000,00	30,04	5,00	4.800.000,00	30,04	5,00	4.507.500,00	100,00	93,91	69,76	20,00	23.020.000,00		59,03		
	Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administratif (Perkara)		100,00	20,00	39.000.000,00	30,04	5,00	4.800.000,00	30,04	5,00	4.507.500,00	100,00	93,91	69,76	20,00	23.020.000,00	69,76	59,03	Tidak terdapat kendala dalam realisasi fisik dan anggaran. Terdapat refocusing anggaran sehingga pada Desember 2024 hanya perjalanan ke Kota Serang dan hal tersebut terlaksana.	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.10.1.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilayani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang dilayani yang menjadi kewenangan Provinsi (Satuan: Perkara)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si		10,00	41.450.000,00	19,12	2,00	4.710.000,00	19,12	2,00	5.826.500,00	100,00	123,70	54,64	10,00	23.349.000,00		53,74		
	Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Perkara)		100,00	10,00	41.450.000,00	19,12	2,00	4.710.000,00	19,12	2,00	5.826.500,00	100,00	123,70	54,64	10,00	23.349.000,00	54,64	53,74	Tidak terdapat kendala dalam realisasi fisik dan kegiatan. Dilakukan perjalanan dinas ke Kab. Serang dan terdapat kegiatan audiensi menggunakan sisa anggaran yang belum terserap pada Agustus karena sempat terjadi kesalahan penarikan sehingga dilakukan pengeseran).	
2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani (Satuan: Pengaduan)	Irwan Setiawan, S.Hut, M.Si		20,00	104.060.000,00	18,85	5,00	11.620.000,00	18,85	5,00	10.806.000,00	100,00	98,30	55,07	20,00	45.475.000,00		47,70		
	Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Pengaduan)		100,00	20,00	104.060.000,00	18,85	5,00	11.620.000,00	18,85	5,00	10.806.000,00	100,00	98,30	55,07	20,00	45.475.000,00	55,07	47,70	Tidak terdapat kendala dalam realisasi fisik dan anggaran. Namun karena terjadi relokusung dan urgent, maka kegiatan difokuskan seluruhnya pada Kab. Serang.	
211.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			100,00		9.581.005.000,00	35,77		3.738.411.500,00	20,16		392.986.500,00	55,37	10,51	41,47		1.238.907.300,00		12,93		
211.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional (Persen)		100,00		9.581.005.000,00	35,77		3.738.411.500,00	20,16		1.238.907.300,00	55,37	10,51	41,47		1.238.907.300,00	41,47	12,93		
2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani (Satuan: Ton)	Ruli Ratne, ST, M.Si		258,00	9.556.120.000,00	35,86	69,00	3.738.411.500,00	20,22	69,00	392.986.500,00	55,37	10,51	41,47	258,00	1.232.249.800,00		12,89		
	Pembinaan Peguyuban Bank Sampah (Laporan)		100,00	0,00	30.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	53,11	0,00	14.230.000,00	53,11	46,89	Tidak Ada target kinerja di bulan Desember 2024	
	Pembinaan Bank Sampah di 8 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Banten yang Mendapatkan Roda Tiga (Cator) (Laporan)		100,00	0,00	98.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	71,00	0,00	9.280.000,00	71,00	5,31	Tidak ada target kinerja di bulan Desember 2024	
	Pemberdayaan Masyarakat/Bank Sampah di 8 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Banten (Ton)		100,00	258,00	8.198.478.600,00	39,67	69,00	3.570.687.500,00	21,44	69,00	224.662.500,00	54,03	6,29	38,61	258,00	711.316.100,00	38,61	6,68	Tidak ada target kinerja di bulan Desember 2024	
	Pemasangan Kubus Apung Penahan Sampah (Dokumen)		100,00	0,00	101.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target kinerja di bulan Desember 2024	
	Paket Pengukuran Sampah di Muara Sungai atau Kawasan Pesisir (Dokumen)		100,00	0,00	195.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	90,33	0,00	159.754.900,00	90,33	81,76	Tidak ada target kinerja di bulan Desember 2024	
	Pemberitahuan dan/atau Pembinaan Bank Sampah di 8 Kabupaten/kota Wilayah Provinsi Banten (5 Lokasi) (Laporan)		100,00	0,00	95.139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target kinerja di bulan Desember 2024	
	Inventarisasi dan Pengolahan Data Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Mercuri (RAD PPM) (Dokumen)		100,00	0,00	81.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	72,34	0,00	0,00	72,34	0,00	Tidak ada target kinerja di bulan Desember 2024	
	Pengelolaan Kebersihan Banten Lame (Laporan)		100,00	0,00	751.116.000,00	23,24	0,00	158.324.000,00	23,24	0,00	166.324.000,00	100,00	100,00	63,21	0,00	337.728.800,00	63,21	44,96		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota (Satuan: Dokumen)	Ruli Ratno, ST, M.Si		1,00	24.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaV	NaV	39,62	1,00	6.557.500,00		26,75		
	Inventarisasi Pengelolaan Sampah Se Provinsi Banten (Dokumen)		100,00	1,00	24.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaV	NaV	39,62	1,00	6.557.500,00	39,62	26,75	Tidak ada target kinerja di bulan Desember 2024	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					1.753.113.000,00	30,30		677.994.930,00	30,10		471.254.051,00	59,36	69,51	56,15		751.348.101,00		43,43		
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		692.234.000,00	29,39		220.169.930,00	29,14		192.201.800,00	59,16	87,30	47,82		315.003.850,00		45,51		
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil di pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecil di pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (dokumen)		5,00		194.024.000,00	31,45		57.886.000,00	31,45		89.056.656,00	100,00	93,38	55,54		89.056.656,00	1.110,79	48,39		
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Satuan: Dokumen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		6,00	194.024.000,00	31,45	6,00	57.886.000,00	31,45	6,00	54.049.000,00	100,00	93,38	55,54	16,00	89.056.656,00		48,39		
	Rapel Sosialisasi KHDPK (Laporan)		100,00	1,00	31.760.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaV	NaV	50,00	2,00	14.923.000,00	50,00	46,99	Tidak ada target kegiatan	
	Rapel Identifikasi Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat di Provinsi Banten (Laporan)		100,00	1,00	23.900.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	NaV	NaV	50,00	2,00	10.447.500,00	50,00	43,90	Tidak ada target kegiatan	
	Rapel Fasilitas PPTPKH (Laporan)		100,00	1,00	55.764.000,00	4,07	1,00	2.276.000,00	4,07	1,00	1.780.000,00	100,00	78,41	19,23	4,00	5.550.000,00	19,23	9,95	Tidak ada target kegiatan	
	Koordinasi Identifikasi Potensi Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (Laporan)		100,00	1,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaV	NaV	50,00	1,00	1.396.156,00	50,00	44,46	Tidak ada target kegiatan	
	Koordinasi Identifikasi Potensi Perijinan Bursaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Kabupaten Latak (Laporan)		100,00	1,00	10.170.000,00	24,39	1,00	2.486.000,00	24,39	1,00	1.718.000,00	100,00	69,27	57,73	4,00	4.019.000,00	57,73	39,52	Tidak ada target kegiatan	
	Koordinasi Identifikasi Potensi Perijinan Bursaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus di Kabupaten Pandegling (Laporan)		100,00	1,00	9.390.000,00	33,34	1,00	3.136.000,00	33,34	1,00	2.539.000,00	100,00	81,12	66,68	2,00	4.709.000,00	86,68	50,15	Tidak ada target kegiatan	
	Rapel Pehutanan Sosial (Dokumen)		100,00	1,00	50.000.000,00	100,00	1,00	50.000.000,00	100,00	1,00	48.012.000,00	100,00	96,02	100,00	1,00	48.012.000,00	100,00	96,02	Tidak ada target kegiatan	
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (dokumen)		4,00		107.250.000,00	15,84		10.050.000,00	15,84		51.672.324,00	100,00	80,94	49,02		51.672.324,00	1.225,52	48,18		
3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala (Satuan: Dokumen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		1,00	17.250.000,00	45,80	0,00	936.000,00	45,80	0,00	554.000,00	100,00	59,57	80,40	2,00	7.524.000,00		44,20		
	Pengumpulan data dan koordinasi serta Rapel Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi (Laporan)		100,00	1,00	17.250.000,00	45,80	0,00	936.000,00	45,80	0,00	554.000,00	100,00	59,57	80,40	2,00	7.524.000,00	80,40	44,20	Tidak ada target kegiatan	
3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala (Satuan: Dokumen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		1,00	30.000.000,00	11,10	1,00	3.336.000,00	11,10	0,00	2.774.000,00	100,00	83,30	25,13	3,00	19.219.824,00		84,07		
	Pengumpulan data dan koordinasi serta Rapel Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung (Laporan)		100,00	1,00	30.000.000,00	11,10	1,00	3.336.000,00	11,10	0,00	2.774.000,00	100,00	83,30	25,13	3,00	19.219.824,00	25,13	84,07	Tidak ada target kegiatan	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi sid Triwulan ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PEPH Di Kawasan Hutan Produksi (Satuan: Dokumen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		1,00	30.000.000,00	11,03	1,00	3.310.000,00	11,03	1,00	2.576.000,00	100,00	77,89	31,36	4,00	6.738.000,00		22,46		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi (Laporan)		100,00	1,00	30.000.000,00	11,03	1,00	3.310.000,00	11,03	1,00	2.576.000,00	100,00	77,89	31,36	4,00	6.738.000,00	31,36	22,46	Tidak ada target kegiatan	
3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PEPH Di Kawasan Hutan Lindung (Satuan: Dokumen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		1,00	30.000.000,00	8,27	1,00	2.480.000,00	8,27	1,00	2.226.000,00	100,00	89,84	72,53	3,00	18.090.500,00		60,30		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian izin usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung (Laporan)		100,00	1,00	30.000.000,00	8,27	1,00	2.480.000,00	8,27	1,00	2.226.000,00	100,00	89,84	72,53	3,00	18.090.500,00	72,53	60,30	Tidak ada target kegiatan	
3.28.03.1.06.0006 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Pemohonan PEPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Manajemen PEPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah Ber (Unit)		7,00		270.000.000,00	40,85		132.103.930,00	40,85		141.306.310,00	100,00	86,03	49,41		141.306.310,00	705,82	52,34		
3.28.03.1.06.0002 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemberitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemohonan PEPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani (Satuan: Unit Manajemen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		11,00	75.000.000,00	69,82	11,00	52.367.930,00	69,82	11,00	48.140.000,00	100,00	91,93	100,00	11,00	70.712.070,00		94,36		
	Rapat Koordinasi Teknis Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu (Laporan)		100,00	11,00	75.000.000,00	69,82	11,00	52.367.930,00	69,82	11,00	48.140.000,00	100,00	91,93	100,00	11,00	70.712.070,00	100,00	94,36	Tidak ada target anggaran	-
3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PEPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi (Satuan: Unit Manajemen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		6,00	195.000.000,00	29,71	3,00	75.736.000,00	29,71	3,00	65.511.300,00	100,00	82,16	29,95	6,00	70.536.300,00		36,17		
	Pembinaan Teknis Pengolahan Bumbu (Unit Manajemen)		100,00	1,00	38.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	1,23	1,00	4.285.000,00	1,23	11,19	Tidak ada target	-
	Pembinaan Teknis Budidaya Jamur Tiram (Unit Manajemen)		100,00	2,00	56.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada target	-
	Pembinaan Teknis Budidaya Lebah Madu (Unit Manajemen)		100,00	3,00	99.861.000,00	58,01	3,00	75.736.000,00	58,01	3,00	65.511.300,00	100,00	82,16	58,01	3,00	65.511.300,00	58,01	65,60	- Tidak ada kendala - Realisasi target satuan (3 unit manajemen telah terealisasi pada bulan Oktober) - Rp. 7.727.000 merupakan sisa anggaran per September 2024 dari total SILPA IV sub kegiatan Triwulan sebesar Rp. 14.964.700 - Rp. 3.230.000 merupakan realisasi keuangan pelaksanaan perjalanan dinas bulan Oktober (pentransferan pada akhir bulan November 2024)	-
	Pembinaan Teknis Budidaya Aren (Unit Manajemen)		100,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	740.000,00	0,00	100,00	- Tidak ada target - Masuk dalam pengurangan anggaran dalam APBD P	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Per (Unit)		20,00		130.960.000,00	13,97		20.136.000,00	12,69		32.966.500,00	90,63	81,28	32,72		32.966.500,00	163,38	25,17		
3.29.03.1.07.0001 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah (Satuan: Unit Manajemen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		15,00	55.960.000,00	29,77	15,00	16.586.000,00	26,72	15,00	14.557.500,00	89,73	90,16	60,68	15,00	27.516.500,00		49,17		
	Rapel Penyusunan dan Pembuatan RPBB dan Dokumen Pengelolaan Hasil Hutan (Laporan)		100,00	0,00	26.750.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	Nafi	0,00	36,93	0,00	4.720.000,00	36,93	17,54	Tidak ada target kinerja	
	Rapel Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penatausahaan Hasil Hutan (SI -PUHH) (Unit Manajemen)		100,00	15,00	130.900,00	100,00	15,00	130.000,00	100,00	15,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15,00	0,00	100,00	0,00		
	Rapel Sinkronisasi Data Penatausahaan Hasil Hutan dengan Perum Perhutani KPH Banten (Laporan)		100,00	0,00	21.000.000,00	62,43	0,00	13.116.000,00	62,43	0,00	12.552.500,00	100,00	98,80	100,00	0,00	20.791.500,00	100,00	99,31	Ridak ada target kinerja	
	Rapel Rekonsiliasi PNEP SDA Kehutanan Provinsi Banten (Laporan)		100,00	0,00	8.080.000,00	42,34	0,00	2.791.000,00	21,17	0,00	2.005.000,00	50,00	71,84	36,49	0,00	2.005.000,00	36,49	24,31		
3.29.03.1.07.0003 Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Uji Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Pemohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani (Satuan: Unit Manajemen)	Tubagus Asep Setiawan, ST		5,00	75.000.000,00	2,17	5,00	3.556.000,00	2,17	5,00	1.410.000,00	100,00	39,72	11,85	5,00	5.456.000,00		7,27		
	Pertemuan Pembinaan Fasilitas Rekomendasi PBPHH dengan Kapasitas Produksi < 6000 m3/tahun (Unit Manajemen)		100,00	5,00	75.000.000,00	2,17	5,00	3.556.000,00	2,17	5,00	1.410.000,00	100,00	39,72	11,85	5,00	5.456.000,00	11,85	7,27		
1.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATIDAN EKOSISTEMNYA			100,00		305.918.000,00	12,18		119.441.000,00	11,63		76.020.001,00	95,51	65,32	67,49		119.452.001,00		39,35		
1.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Persen)		100,00		305.918.000,00	12,18		119.441.000,00	11,63		119.452.001,00	95,51	65,32	67,49		119.452.001,00	67,49	39,35		
3.29.04.1.03.0001 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst (Satuan: Dokumen)	Adb Solihin, ST, MT, M.Si		1,00	26.680.000,00	2,49	1,00	4.061.000,00	2,49	1,00	840.000,00	100,00	29,65	14,85	1,00	7.600.000,00		28,49		
	Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst (dokumen)		100,00	1,00	26.680.000,00	2,49	1,00	4.061.000,00	2,49	1,00	840.000,00	100,00	29,65	14,85	1,00	7.600.000,00	14,35	28,49	target kinerja 1 dokumen adalah target kinerja triwulan 4 dan sudah diupload pada bulan sebelumnya dan realisasi keuangan telah silpa	
3.29.04.1.03.0003 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah (Satuan: Dokumen)	Adb Solihin, ST, MT, M.Si		1,00	40.000.000,00	1,12	1,00	6.406.000,00	1,12	1,00	1.000.000,00	100,00	0,00	16,88	2,00	6.640.001,00		16,50		
	Koordinasi dan timbex Perencanaan Ekosistem Lahan Basah (Dokumen)		100,00	1,00	40.000.000,00	1,12	1,00	6.406.000,00	1,12	1,00	1.000.000,00	100,00	0,00	16,88	2,00	6.640.001,00	16,88	16,50	target keuangan merupakan silpa	
3.29.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Satuan: Ha)	Adb Solihin, ST, MT, M.Si		8,00	239.238.000,00	15,11	3,00	108.976.000,00	14,41	3,00	77.180.000,00	95,37	79,83	81,82	4,00	105.212.000,00		43,96		
	Pengelolaan Daerah Penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola (ha)		100,00	8,00	239.238.000,00	15,11	3,00	108.976.000,00	14,41	3,00	77.180.000,00	95,37	79,83	81,82	4,00	105.212.000,00	81,82	43,96	target realisasi melebihi target bulan ini karena realisasi keuangan pada bulan lalu	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			100,00		372.336.000,00	49,37		183.320.500,00	49,37		94.234.250,00	100,00	51,40	71,52		179.299.250,00		48,16		
1.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (persen)		100,00		372.336.000,00	49,37		183.320.500,00	49,37		179.299.250,00	100,00	51,40	71,52		179.299.250,00	71,52	48,16		
3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas (Satuan: Orang)	Adb Solihin, ST, MT, M.Si		153,00	30.530.000,00	95,08	153,00	28.106.000,00	95,08	153,00	24.145.500,00	100,00	85,90	95,08	153,00	24.870.500,00		81,46		
	Penguatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (Orang)		100,00	153,00	30.530.000,00	95,08	153,00	28.106.000,00	95,08	153,00	24.145.500,00	100,00	85,90	95,08	153,00	24.870.500,00	95,08	81,46	Realisasi anggaran sudah sampai tahap penransferan dan sebagian juga sudah pengajuan ke Bendahara, jadi belum masuk ke realisasi LRA, namun semua kegiatan sudah terlaksana.	Segera dilakukan penransferan kegiatan.
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Satuan: Kelompok)	Adb Solihin, ST, MT, M.Si		55,00	279.536.000,00	47,06	25,00	131.527.000,00	47,06	25,00	66.916.750,00	100,00	52,40	75,90	55,00	151.430.750,00		54,17		
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (Kelompok)		100,00	55,00	279.536.000,00	47,06	25,00	131.527.000,00	47,06	25,00	66.916.750,00	100,00	52,40	75,90	55,00	151.430.750,00	75,90	54,17	Realisasi anggaran sudah sampai tahap penransferan oleh Bendahara dan sebagian juga sudah sampai proses pengajuan ke Bendahara, namun karena masih dalam proses jadi belum masuk ke LRA.	Segera dilakukan penransferan.
3.28.05.1.01.0003 Peryiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial (Satuan: Ha)	Adb Solihin, ST, MT, M.Si		400,00	62.270.000,00	37,31	150,00	23.684.500,00	37,31	150,00	1.172.000,00	100,00	4,95	40,29	400,00	2.998.000,00		4,81		
	Penyiapan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial (Ha)		100,00	300,00	41.650.000,00	46,15	150,00	19.674.500,00	46,15	150,00	1.172.000,00	100,00	5,96	50,60	300,00	2.998.000,00	50,60	7,20	Realisasi anggaran sudah dalam tahap penransferan oleh Bendahara dan sebagian juga sudah sampai proses pengajuan ke Bendahara, jadi belum masuk LRA, namun kegiatan sudah terlaksana semua.	Segera dilakukan penransferan.
	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kelompok Pengelola KHDPK (Ha)		100,00	0,00	2.410.000,00	100,00	0,00	2.410.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Tidak ada target kinerja	-
	Rapat Koordinasi Perhutanan Sosial dan KHDPK (Ha)		100,00	100,00	18.210.000,00	8,79	0,00	1.600.000,00	8,79	0,00	0,00	100,00	0,00	8,79	100,00	0,00	8,79	0,00	Tidak ada target kinerja	-
1.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			100,00		382.625.000,00	27,86		155.063.500,00	27,86		106.796.000,00	100,00	68,87	47,19		147.593.000,00		38,57		
1.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (persen)		100,00		382.625.000,00	27,86		155.063.500,00	27,86		147.593.000,00	100,00	68,87	47,19		147.593.000,00	47,19	38,57		
3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS (Satuan: Dokumen)	Adb Solihin, ST, MT, M.Si		1,00	33.566.000,00	9,11	1,00	11.226.000,00	9,11	1,00	11.010.000,00	100,00	98,08	32,43	1,00	15.110.000,00		45,02		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS (Dokumen)		100,00	1,00	33.566.000,00	9,11	1,00	11.226.000,00	9,11	1,00	11.016.000,00	100,00	98,08	32,43	1,00	15.110.000,00	32,43	45,02	Pada bulan Desember Tidak ada Target Kegiatan, Target anggaran yang ada adalah silpa pada sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Tidak Ada
3.28.06.1.01.0004 Pembedayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembedayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (Satuan: Orang)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si		280,00	319.059.000,00	32,19	150,00	142.617.000,00	32,19	150,00	95.786.000,00	100,00	67,16	52,92	210,00	132.483.000,00		41,52		
	Pembedayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan (Orang)		100,00	280,00	319.059.000,00	32,19	150,00	142.617.000,00	32,19	150,00	95.786.000,00	100,00	67,16	52,92	210,00	132.483.000,00	52,92	41,52	Target anggaran pada bulan desember adalah silpa pada sub kegiatan pembedayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS, dan realisasi anggaran yang ada, adalah realisasi pada bulan sebelumnya yang masuk di bulan Desember	Tidak ada
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS (Satuan: Lembaga)	Adib Solihin, ST, MT, M.Si		1,00	30.006.000,00	2,79	0,00	1.220.500,00	2,79	0,00	0,00	100,00	0,00	2,79	1,00	0,00		0,00		
	Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS (Lembaga)		100,00	1,00	30.006.000,00	2,79	0,00	1.220.500,00	2,79	0,00	0,00	100,00	0,00	2,79	1,00	0,00	2,79	0,00	Target anggaran adalah silpa pada sub kegiatan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	Tidak Ada
SUB JUMLAH				2.869,00	61.576.778.468,00	27,29	831,00	18.123.416.467,00	24,43	773,00	9.832.512.957,00	89,53	60,98	57,37	2.145,00	27.548.453.118,18		44,74		
211.3.28.0.00.02.0001 CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG					1.181.236.400,00	62,91		763.048.141,00	38,81		390.253.470,00	61,49	77,35	73,28		998.979.659,00		84,57		
211 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					490.404.400,00	57,05		299.176.131,00	57,05		169.360.260,00	100,00	90,03	96,11		460.588.329,00		93,92		
211.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		490.404.400,00	57,05		299.176.131,00	57,05		169.360.260,00	100,00	90,03	96,11		460.588.329,00		93,92		
211.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada CDLHK Latak Tangerang (Person)		100,00		62.661.400,00	9,55		15.584.101,00	9,55		50.583.299,00	100,00	22,46	100,00		50.583.299,00	100,00	80,72		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si		1,00	3.306.000,00	0,00	0,00	427.600,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	1,00	2.873.000,00		87,06		
	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1)		100,00	1,00	3.306.000,00	0,00	0,00	427.600,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	1,00	2.873.000,00	100,00	87,06	Tidak ada output kegiatan	
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si		1,00	16.500.000,00	0,00	0,00	1.602.500,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	0,00	14.897.500,00		90,29		
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		100,00	1,00	16.500.000,00	0,00	0,00	1.602.500,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	0,00	14.897.500,00	100,00	90,29	Tidak ada output kegiatan	
2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si		1,00	3.306.000,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	1,00	2.516.000,00		76,24		
	Belanja Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Paket)		100,00	1,00	3.306.000,00	0,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	1,00	2.516.000,00	100,00	76,24	Tidak ada output kegiatan	
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusnandar, S.Sos, M.Si		1,00	2.200.000,00	0,00	0,00	482.600,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	0,00	1.718.000,00		78,09		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Belanja Pakaian Natura (Paket)		100,00	1,00	2.200.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	0,00	1.719.000,00	100,00	78,09	Tidak ada output kegiatan	
2.11.01.1.03.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Ahmad Rusrandar, S.Sos, M.Si		1,00	11.000.000,00	0,00	0,00	1.750.175,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	0,00	9.249.825,00		84,09		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Paket)		100,00	1,00	11.000.000,00	0,00	0,00	1.750.175,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	100,00	0,00	9.249.825,00	100,00	84,09	Tidak ada output kegiatan	
2.11.01.1.05.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Ahmad Rusrandar, S.Sos, M.Si		1,00	1.367.400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	1.367.400,00		100,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan/Surat Kabar/Koran (Dokumen)		100,00	1,00	1.367.400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	1.367.400,00	100,00	100,00	Tidak ada output kegiatan	
2.11.01.1.03.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Ahmad Rusrandar, S.Sos, M.Si		12,00	25.000.000,00	23,95	3,00	10.538.426,00	23,95	0,00	3.500.000,00	100,00	33,21	100,00	9,00	17.961.574,00		71,85		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dokumen)		100,00	12,00	25.000.000,00	23,95	3,00	10.538.426,00	23,95	0,00	3.500.000,00	100,00	33,21	100,00	9,00	17.961.574,00	100,00	71,85	Kegiatan sudah dilaksanakan berupa perjalanan dinas dalam kota, tetapi realisasi keuangan belum masuk LRA bulan Desember	
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Latak Tangerang (Persen)		100,00		301.917.000,00	80,29		247.393.630,00	80,29		288.273.430,00	100,00	94,49	100,00		288.273.430,00	100,00	95,48		
2.11.01.1.03.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ahmad Rusrandar, S.Sos, M.Si		12,00	61.740.000,00	24,99	3,00	19.276.630,00	24,99	0,00	9.600.060,00	100,00	52,53	100,00	9,00	53.063.410,00		85,95		
	Jumlah Laporan Penyediaan Listrik dan Internet Kantor (Laporan)		100,00	12,00	61.740.000,00	24,99	3,00	19.276.630,00	24,99	0,00	9.600.060,00	100,00	52,53	100,00	9,00	53.063.410,00	100,00	85,95	Kegiatan sudah dilaksanakan berupa tagihan belanja listrik dan internet kantor, tetapi realisasi anggaran belum masuk LRA	
2.11.01.1.03.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Ahmad Rusrandar, S.Sos, M.Si		2,00	240.177.000,00	94,51	2,00	229.117.000,00	94,51	0,00	224.150.000,00	100,00	97,83	100,00	1,00	235.210.000,00		97,93		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)		100,00	2,00	240.177.000,00	94,51	2,00	229.117.000,00	94,51	0,00	224.150.000,00	100,00	97,83	100,00	1,00	235.210.000,00	100,00	97,93	Kegiatan sudah dilaksanakan berupa belanja jasa tenaga kebersihan dan keamanan kantor, tetapi realisasi anggaran belum masuk LRA	
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Latak Tangerang (persen)		100,00		121.820.000,00	24,92		35.198.600,00	24,92		121.731.600,00	100,00	88,71	84,92		121.731.600,00	84,92	96,75		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan (Satuan: Unit)	Ahmad Rusrandar, S.Sos, M.Si		8,00	92.700.000,00	26,20	2,00	25.090.600,00	26,20	0,00	25.680.200,00	100,00	98,43	83,34	0,00	92.289.600,00		99,56		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)		100,00	8,00	92.700.000,00	26,20	2,00	25.090.600,00	26,20	0,00	25.680.200,00	100,00	98,43	83,34	0,00	92.289.600,00	83,34	99,56	Tidak ada output kegiatan	
2.11.01.1.03.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi (Satuan: Unit)	Ahmad Rusrandar, S.Sos, M.Si		24,00	31.120.000,00	21,33	6,00	10.108.000,00	21,33	0,00	6.430.000,00	100,00	63,61	89,35	0,00	29.442.000,00		88,89		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Itri			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Peneliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (Unit)		100,00	24,00	33.120.000,00	21,33	6,00	10.108.000,00	21,33	0,00	6.430.000,00	100,00	63,61	89,35	0,00	29.142.000,00	89,35	88,86	Tidak ada output kegiatan	
328 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					690.826.000,00	67,08		463.671.910,00	25,67		320.893.210,00	38,56	69,18	57,06		538.191.330,00		77,93		
328.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		605.850.000,00	73,45		445.496.850,00	26,46		306.483.210,00	36,03	68,80	52,35		455.148.710,00		75,13		
328.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Pesertisasi Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (COLHK-LT) (persen)		100,00		580.850.000,00	76,52		444.956.850,00	27,55		441.195.710,00	36,01	68,70	50,47		441.195.710,00	50,47	75,96		
328.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Satuan: Dokumen)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM		2,00	38.590.000,00	48,08	1,00	18.539.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,92	1,00	19.940.300,00		50,93		
	perencanaan penyusunan dokumen Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RK-RHL) Tahun 2024 (dokumen)		100,00	1,00	20.020.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	19.940.300,00	100,00	98,10	- Kegiatan telah selesai dilaksanakan	- tidak ada target Kinerja di bulan Desember
	perencanaan penyusunan dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn-RHL) Tahun 2025 (dokumen)		100,00	1,00	18.539.050,00	100,00	1,00	18.539.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- Tidak ada target aktilitas kegiatan	- Tidak ada Target kinerja di bulan Desember
328.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM		327,00	450.000.000,00	77,90	2,00	350.560.000,00	30,77	0,00	299.958.100,00	39,50	85,57	52,48	0,00	399.198.100,00		88,76		
	Peneliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 1 (Ha)		100,00	100,00	99.888.000,00	95,80	0,00	95.688.000,00	34,22	0,00	33.600.000,00	35,72	35,11	38,42	0,00	35.100.000,00	38,42	35,14	- Pembayaran untuk Kegiatan Upah/HOK Pemeliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 1 telah selesai dibayarkan di Bulan Oktober	- Kegiatan telah selesai dilaksanakan
	Peneliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 2 (Ha)		100,00	50,00	49.312.000,00	96,35	0,00	47.512.000,00	93,26	0,00	100.476.000,00	96,79	211,47	96,91	0,00	100.476.000,00	96,91	208,76	- Tidak ada target aktilitas kegiatan	- Tidak ada Target kinerja di bulan Desember
	Peneliharaan Hutan Rakyat Tahun ke 3 (Ha)		100,00	175,00	150.800.000,00	38,04	0,00	57.360.000,00	36,89	0,00	48.790.000,00	96,99	85,06	97,70	0,00	146.730.000,00	97,70	97,30	- Tidak Ada Kendala	- Kegiatan Perjataan Dinas telah dilaksanakan
	Perghijauan Lingkungan (Ha)		100,00	2,00	150.000.000,00	100,00	2,00	150.000.000,00	1,77	0,00	117.992.100,00	1,77	78,06	1,77	0,00	117.992.100,00	1,77	78,06	- Tidak ada target aktilitas kegiatan - Realisasi Belanja barang untuk kegiatan Penghijauan Lingkungan	- Tidak ada Target Kegiatan di bulan Desember
328.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipit Teknis yang Terbangun (Satuan: Unit)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM		0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	477.800,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	74,47	0,00	5.362.200,00		92,09		
	Pembangunan Sumur Resapan Air (Unit)		100,00	0,00	6.040.000,00	0,00	0,00	477.800,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00	74,47	0,00	5.362.200,00	74,47	92,09	- Anggaran Pembangunan Sumur Resapan Air telah difocusing pada perubahan Anggaran Tahun 2024	- Rencana Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan Air tidak jadi dilaksanakan
328.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Satuan: Laporan)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM		2,00	30.000.000,00	63,75	2,00	19.130.000,00	60,28	0,00	4.225.110,00	94,55	22,09	96,52	0,00	15.995.110,00		50,32		
	Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota (Laporan)		100,00	2,00	30.000.000,00	63,75	2,00	19.130.000,00	60,28	0,00	4.225.110,00	94,55	22,09	96,52	0,00	15.995.110,00	96,52	50,32	- Tidak Ada kendala	- Kegiatan telah terlaksanakan
328.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Diehabilitasi (Satuan: Ha)	Dendi Setyawan, S.Hut, MM		3,00	56.250.000,00	100,00	3,00	56.250.000,00	6,22	0,00	1.500.000,00	6,22	2,67	6,22	0,00	1.500.000,00		2,67		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penanaman Mangrove di Luar Kawasan Hutan Negara (Ha)		100,00	3,00	56.250.000,00	100,00	3,00	56.250.000,00	6,22	0,00	1.500.000,00	6,22	2,67	6,22	0,00	1.500.300,00	6,12	2,67	Kegiatan tidak dilaksanakan - Rencana Calon Lokasi dan KTH tidak bisa di pgunakan karena telah menjadi kawasan dari Proyek Strategis Nasional (PSN)	- calon KTH tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan Mangrove
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Prov. (dokumen)		1,00		25.000.000,00	2,16		540.000,00	1,08		13.953.000,00	50,00	148,15	96,11		13.953.300,00	9.611,14	55,81		
3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi (Sasaran: Dokumen)	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM		1,00	25.000.000,00	2,16	0,00	540.000,00	1,08	0,00	800.000,00	50,00	148,15	96,11	1,00	13.953.300,00		55,81		
	Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (Dokumen)		100,00	1,00	11.138.000,00	4,85	0,00	540.000,00	2,42	0,00	800.000,00	50,00	148,15	93,26	1,00	13.003.300,00	93,26	116,74	Target kinerja sudah tercapai, anggaran kegiatan di 2024 sudah terlaksana.	
	Konsultasi dan Koordinasi dalam rangka Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (Dokumen)		100,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	93,08	0,00	950.300,00	93,08	25,60	Target kinerja di tahun 2024 sudah tercapai, anggaran kegiatan di 2024 sudah terlaksana.	
	Bimbingan Teknis kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (Dokumen)		100,00	0,00	10.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Target kinerja di tahun 2024 sudah tercapai, anggaran kegiatan di 2024 sudah terlaksana.	
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		84.978.000,00	21,53		18.315.060,00	21,63		14.410.000,00	100,00	78,42	90,65		83.242.320,00		97,96		
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Conversion On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Le (Laporan)		1,00		20.000.000,00	0,00		0,00	0,00		23.996.680,00	NaN	NaN	97,06		23.996.680,00	9.705,87	119,98		
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Sasaran: Laporan)	Yan Yan Royani, SE, S.Sos, MM		1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	97,06	2,00	23.996.680,00		119,98		
	Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Laporan)		100,00	0,00	7.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	91,78	1,00	11.287.300,00	91,78	157,64	Target kinerja di tahun 2024 sudah tercapai, anggaran kegiatan di 2024 sudah terlaksana.	
	Perengkapan Dinas Seragam Pertemuan Lapangan Pakaian Kerja Lapangan Baju kerah bahan kain cotton (stef)		100,00	0,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	3.620.300,00	100,00	99,45	Target kinerja di tahun 2024 sudah tercapai, anggaran kegiatan di 2024 sudah terlaksana.	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Bimbingan Teknis Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (Laporan)		100,00	1,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	9.089.586,00	100,00	96,80		
2.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT) (Persen)	100,00		64.976.000,00	28,28		18.375.060,00	28,28		59.245.940,00	100,00	78,42	88,68		59.245.946,00	88,68	91,18		
1.28.04.1.03.0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani (Satuan: Ha)		1,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	13.235.006,00		86,23		
	Monitoring dan Koordinasi dalam rangka Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (Laporan)		100,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	99,99	0,00	4.180.006,00	99,99	72,07	Target kinerja di tahun 2024 sudah tercapai, anggaran kegiatan di 2024 sudah terlaksana.	
	Bintik kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (Ha)		100,00	1,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	9.055.006,00	100,00	96,42	Target kinerja sudah terealisasi, anggaran kegiatan sudah terlaksana.	
1.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Satuan: Ha)		1,00	5.800.000,00	20,20	1,00	1.172.000,00	20,20	0,00	0,00	100,00	0,00	54,58	0,00	4.628.006,00		75,79		
	Monitoring dan Koordinasi Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (Laporan)		100,00	1,00	5.800.000,00	20,20	1,00	1.172.000,00	20,20	0,00	0,00	100,00	0,00	54,58	0,00	4.628.006,00	54,58	75,79	Target kinerja di tahun 2024 sudah tercapai, anggaran kegiatan di 2024 sudah terlaksana.	
1.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Satuan: Orang)		40,00	44.176.000,00	38,95	40,00	17.203.060,00	38,95	40,00	14.410.000,00	100,00	83,75	89,31	40,00	41.382.940,00		93,68		
	Monitoring dan Koordinasi dalam rangka Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Laporan)		100,00	0,00	36.820.000,00	12,49	0,00	3.847.060,00	12,49	0,00	1.550.000,00	100,00	40,29	84,68	0,00	28.522.940,00	84,68	92,55	Tidak ada kendala	
	Bintik kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Orang)		100,00	40,00	13.356.000,00	100,00	40,00	13.356.000,00	100,00	40,00	12.960.000,00	100,00	96,29	100,00	40,00	12.660.006,00	100,00	96,29	Target fisik sudah dilaksanakan 100% dan realisasi keuangan mencapai 99%	
SUB JUMLAH				442,00	1.181.230.420,00	62,91	56,00	763.048.241,00	38,81	40,00	590.253.470,00	61,69	77,35	73,28	66,00	998.579.555,00		84,57		
2.11.3.28.0.0002.0002	CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON				931.279.800,00	19,79		194.413.380,00	19,64		189.427.120,00	95,22	97,44	65,09		849.084.892,23		91,17		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					379.617.000,00	39,75		160.932.130,00	39,75		151.562.029,00	100,00	100,39	99,57		345.333.092,23		96,97		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		379.617.000,00	39,75		160.932.130,00	39,75		151.562.029,00	100,00	100,39	99,57		345.333.092,23		96,97		
2.11.01.1.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon (Persen)		100,00		116.000.000,00	0,91		1.453.470,00	0,91		78.150.449,37	100,00	96,60	94,64		78.150.449,37	94,64	71,05		
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nanati Finitati S.Sos		5,00	30.000.000,00	0,00	1,00	454.100,00	0,00	1,00	404.100,00	NaN	88,99	73,40	1,00	14.607.706,00		46,69		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)		100,00	5,00	30.000.000,00	0,00	1,00	454.100,00	0,00	1,00	404.100,00	NaN	88,99	73,40	1,00	14.607.706,00	73,40	46,69	Realisasi keuangan bulan November 2024	Tidak ada

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.05.0004 Peryedaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nanat Finati, S.Sos		1,00	25.000.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	93,75	1,00	19.367.000,00		77,47		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (1)		100,00	12,00	25.000.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	93,75	1,00	19.367.000,00	93,15	77,47	tidak ada	tidak ada
2.11.01.1.05.0005 Peryedaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Nanat Finati, S.Sos		1,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	9.431.500,00		62,88		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		100,00	4,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	9.431.500,00	100,00	62,88	Tidak ada target dan realisasi	tidak ada
2.11.01.1.05.0006 Peryedaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Nanat Finati, S.Sos		1,00	10.000.000,00	9,99	3,00	999.370,00	9,99	0,00	1.000.000,00	100,00	100,00	179,82	1,00	6.838.999,37		68,39		
	Peryedaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen)		100,00	12,00	10.000.000,00	9,99	3,00	999.370,00	9,99	0,00	1.000.000,00	100,00	100,00	179,82	1,00	6.838.999,37	179,82	68,39	tidak ada target dan realisasi	tidak ada
2.11.01.1.05.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Nanat Finati, S.Sos		12,00	30.000.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	85,54	9,00	27.905.250,00		93,02		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dokumen)		100,00	12,00	30.000.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	85,54	9,00	27.905.250,00	85,54	93,02	Tidak ada target dan realisasi pada bulan desember	tidak ada
2.11.01.1.08 Peryediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenentase Ketercapaian Kegiatan Peryediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC (Persen)		100,00		178.617.000,00	75,40		135.496.410,00	75,40		171.259.342,86	100,00	96,66	109,73		171.259.342,86	109,13	95,88		
2.11.01.1.08.0002 Peryediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Peryediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nanat Finati, S.Sos		12,00	33.500.000,00	25,25	3,00	9.279.410,00	25,25	3,00	6.118.420,00	100,00	65,94	111,89	12,00	24.799.342,86		74,03		
	Peryediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)		100,00	12,00	33.500.000,00	25,25	3,00	9.279.410,00	25,25	3,00	6.118.420,00	100,00	65,94	111,89	12,00	24.799.342,86	151,89	74,03	Realisasi menyesuaikan tagihan setiap bulan, target tidak tercapai	tidak ada
2.11.01.1.08.0004 Peryediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Peryediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Nanat Finati, S.Sos		1,00	145.117.000,00	86,98	3,00	126.217.000,00	86,98	3,00	127.560.000,00	100,00	101,06	100,00	4,00	146.460.000,00		100,93		
	Peryediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)		100,00	12,00	145.117.000,00	86,98	3,00	126.217.000,00	86,98	3,00	127.560.000,00	100,00	101,06	100,00	4,00	146.460.000,00	100,00	100,93	tidak ada target dan realisasi bulan desember	tidak ada
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persenentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC (persen)		100,00		91.000.000,00	16,74		23.982.250,00	16,74		95.923.300,00	100,00	110,41	85,57		95.923.300,00	85,57	105,41		
2.11.01.1.09.0002 Peryediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Nanat Finati, S.Sos		10,00	66.000.000,00	11,61	4,00	17.730.000,00	11,61	4,00	18.367.500,00	100,00	103,60	80,11	7,00	71.106.300,00		107,74		
	Peryediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Unit)		100,00	12,00	66.000.000,00	11,61	4,00	17.730.000,00	11,61	4,00	18.367.500,00	100,00	103,60	80,11	7,00	71.106.300,00	80,11	107,74	Keuangan telah terealisasi pada bulan November 2024	Tidak ada
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Nanat Finati, S.Sos		25,00	25.000.000,00	25,00	4,00	6.252.250,00	25,00	4,00	8.112.000,00	100,00	125,75	100,00	11,00	24.817.000,00		99,27		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)		100,00	12,00	25.000.000,00	25,00	4,00	6.252.250,00	25,00	4,00	8.112.000,00	100,00	125,75	100,00	11,00	24.817.000,00	100,00	99,27	tidak ada target dan realisasi	tidak ada
1.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					551.662.800,00	6,06		33.481.250,00	5,80		27.865.100,00	95,69	83,23	41,37		503.751.800,00		91,32		
1.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		462.992.800,00	5,89		27.311.250,00	5,81		20.729.100,00	98,63	75,90	43,80		454.445.800,00		98,15		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDJHK-PSC) (persen)		100,00		417.992.800,00	6,12		27.311.250,00	5,14		414.875.800,00	98,63	38,99	44,16		414.875.800,00	44,16	94,72		
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Satuan: Dokumen)	Setiabudi, SE, MM		2,00	20.473.800,00	1,83	1,00	374.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.525.200,00		95,37		
	Penyusunan Dokumen Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ri- RHL) (Dokumen)		100,00	1,00	20.020.950,00	1,87	0,00	374.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.525.200,00	0,00	97,53	tidak ada permasalahan	Sudah realisasi sesuai anggaran kas
	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTn-RL) (Dokumen)		100,00	1,00	452.850,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tidak ada permasalahan	Sudah di realisasikan sesuai anggaran kas
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan: Ha)	Setiabudi, SE, MM		60,00	281.259.000,00	1,83	60,00	5.188.000,00	1,83	0,00	2.980.000,00	100,00	57,44	38,99	0,00	272.179.000,00		97,12		
	Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) (Ha)		100,00	60,00	155.728.000,00	3,10	60,00	4.878.000,00	3,10	0,00	2.980.000,00	100,00	61,12	65,51	0,00	147.322.000,00	65,51	94,60	Tidak ada permasalahan Keterangan : 1. Penggandaan laporan realisasi fisik bulan oember 2. Realisasi fisik akumulasi bulan, Oktober, oember dan Desember	Kuangan di Realisasi bulan Desember
	Pemeliharaan sumber Mata air (Ha)		100,00	3,00	125.541.000,00	0,25	0,00	312.000,00	0,25	0,00	0,00	100,00	0,00	6,09	0,00	125.857.000,00	6,09	100,25	Tidak ada permasalahan Keterangan : 1. realisas fisik penggandaan laporan sudah dilaksanakan bulan oember	Kuangan di realisasikan bulan Desember
3.28.03.1.04.0006 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Spil Tekris yang Terbangun (Satuan: Unit)	Setiabudi, SE, MM		5,00	10.000.000,00	7,20	0,00	3.599.500,00	7,20	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,00	46.400.500,00		92,80		
	Pembuatan Sumur Resapan Air (SRA) (Unit)		100,00	5,00	10.000.000,00	7,20	0,00	3.599.500,00	7,20	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,00	46.400.500,00	100,00	92,80	Tidak ada permasalahan ket : 1. pembobotan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor, barang untuk dijual/diseahkan kepada masyarakat, merupakan pembobotan ssa pagu/visinsi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.	Drealisasikan sesuai dengan anggaran kas
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (Satuan: Laporan)	Setiabudi, SE, MM		2,00	10.000.000,00	53,67	2,00	16.100.000,00	53,67	0,00	7.399.100,00	100,00	45,95	88,00	0,00	21.299.100,00		71,00		
	pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan (Laporan)		100,00	2,00	10.000.000,00	53,67	2,00	16.100.000,00	53,67	0,00	7.399.100,00	100,00	45,95	88,00	0,00	21.299.100,00	88,00	71,00	Tidak ada permasalahan Keterangan : 1. Fisik sudah dilaksanakan bulan november dan Desember 2024	Kuangan di realisasikan bulan Desember
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi (Satuan: Ha)	Setiabudi, SE, MM		4,00	16.250.000,00	3,64	0,00	2.049.000,00	3,64	0,00	270.000,00	100,00	13,19	13,08	0,00	54.471.000,00		96,84		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan (Ra)		100,00	4,00	56.250.000,00	3,64	0,00	2.049.000,00	3,64	0,00	270.000,00	100,00	13,18	13,08	0,00	54.471.000,00	13,08	96,84	Tidak ada permasalahan Keterangan: 1. Target fisik perijinan dinas biasa ke Kab Pandeglang sudah dilaksanakan pada bulan oktober 2024 , realisasi keuangan bulan november 2024 sebesar Rp. 270.000,-. 2. Pembelian belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja barang untuk diujidiseal ke pada masyarakat, dan belanja makanan dan minuman rapat merupakan Sisa paguvisi dari kegiatan yang sudah dilaksanakan	direvisasi sesuai anggaran kas
328.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPPIH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)		1,00		25.000.000,00	0,00		0,00	0,00		39.570.000,00	NaN		37,60		39.570.000,00	3,760,00	156,28		
1.26.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPPIH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Sasaran: Dokumen)	Rido Achmad Rosadi, S.Hut		1,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	NaN		37,60	0,00	39.570.000,00		156,28		
	umlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPPIH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provi (Dokumen)		100,00	1,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	NaN		37,60	0,00	39.570.000,00	37,60	156,28	kebutuhan Pegawa yang membantu pengadministrasian kegiatan	melakukan koordinasi dengan subagum dan kepegawaian
328.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			100,00		88.670.000,00	6,96		6.170.000,00	5,75		7.135.000,00	82,71	115,66	28,66		49.106.000,00		55,61		
328.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Conversion On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pa (Laporan)		1,00		20.000.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	28,00		0,00	2.800,00	0,00		
1.26.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Sasaran: Laporan)	Rido Achmad Rosadi, S.Hut		1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	28,00	0,00	0,00		0,00		
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (Laporan)		100,00	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00		
328.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC) (%)		100,00		68.670.000,00	8,98		6.170.000,00	7,43		49.305.000,00	82,71	115,66	28,85		49.106.000,00	28,85	71,80		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi sid Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.28.04.1.01.0002 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani (Satuan: Ha)	Rido Achmad Rosadi, S.Hur		5,00	5.370.000,00	100,00	0,00	5.370.000,00	95,90	1,00	4.796.000,00	95,00	89,31	95,00	1,00	4.796.000,00		89,31		
	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (Ha)		100,00	5,00	5.370.000,00	100,00	0,00	5.370.000,00	95,90	1,00	4.796.000,00	95,00	89,31	95,00	1,00	4.796.000,00	95,00	89,31	Laporan Tahunan Ekosistem Karst dan Perlatan Dinas Biasa	
3.28.04.1.01.0004 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Satuan: Ha)	Rido Achmad Rosadi, S.Hur		1,00	13.330.000,00	6,00	0,00	800.000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	21.590.000,00		152,33		
	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani (Ha)		100,00	1,00	13.330.000,00	6,00	0,00	800.000,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	21.590.000,00	47,00	152,33		
3.28.04.1.01.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Satuan: Orang)	Rido Achmad Rosadi, S.Hur		40,00	50.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2.340.000,00	NaN		16,52	0,00	22.920.000,00		45,84		
	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan (Orang)		100,00	40,00	50.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2.340.000,00	NaN		16,52	0,00	22.920.000,00	16,52	45,84	kekurangan tenaga administrasi	melakukan koordinasi dengan subag umum dan kepegawaian
SUB JUMLAH				192,00	931.279.000,00	16,79	85,00	194.413.380,00	19,64	16,00	189.427.120,00	99,22	97,44	65,09	52,00	849.084.892,23		91,17		
2.11.3.28.0.00.02.0003 UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN					769.020.000,00	28,68		228.763.900,00	28,37		210.237.750,00	98,92	95,22	80,23		754.157.327,00		98,09		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					769.020.000,00	28,68		228.763.900,00	28,37		210.237.750,00	98,92	95,22	80,23		754.157.327,00		98,09		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		524.030.000,00	32,00		167.686.400,00	31,83		164.448.250,00	99,47	98,07	72,13		520.162.850,00		99,38		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		234.030.000,00	23,57		55.170.400,00	23,19		231.608.600,00	98,38	95,67	17,60		231.608.600,00	37,60	98,98		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)				1,00	7.500.000,00	0,92	0,00	68.790,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.431.300,00		99,68		
			100,00	1,00	7.500.000,00	0,92	0,00	68.790,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.431.300,00	0,00	99,68	Laporan Sipa Rp. 68.700,- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)				1,00	35.030.000,00	1,69	0,00	583.290,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	34.406.800,00		98,31		
			100,00	1,00	35.030.000,00	1,69	0,00	583.290,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	34.406.800,00	0,00	98,31	Laporan Sipa Rp. 593.200,- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7,00	150.000.000,00	34,15	1,00	51.227.090,00	34,15	0,00	49.752.200,00	100,00	97,12	17,55	3,00	148.525.200,00		99,62		
			100,00	7,00	150.000.000,00	34,15	1,00	51.227.090,00	34,15	0,00	49.752.200,00	100,00	97,12	17,55	3,00	148.525.200,00	37,55	99,62	Laporan Sipa Rp. 1.474.800,- Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor	
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)				1,00	6.500.000,00	3,61	0,00	234.500,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	6.165.500,00		96,39		
			100,00	1,00	6.500.000,00	3,61	0,00	234.500,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	0,00	6.165.500,00	96,39	96,39	Laporan Sippa Rp. 234.500,- Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan	
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)				12,00	35.030.000,00	8,70	3,00	1.047.090,00	8,70	0,00	3.027.000,00	100,00	99,34	72,54	6,00	34.980.000,00		99,94		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi sid Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)		100,00	12,00	35.000.000,00	8,10	3,00	3.047.300,00	8,70	0,00	3.027.000,00	100,00	99,34	72,54	6,00	34.980.000,00	72,54	99,94	Pengandaan/otocopy Pelaporan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan (persen)		100,00		290.000.000,00	38,80		112.516.000,00	38,80		289.154.050,00	100,00	99,25	100,00		289.154.050,00	100,00	99,71		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Satuan: Unit)	Nenden Wulandari, SH, M.Si		10,00	185.000.000,00	30,94	3,00	57.239.300,00	30,94	0,00	56.813.050,00	100,00	99,29	100,00	7,00	184.594.050,00		99,78		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		100,00	10,00	185.000.000,00	30,94	3,00	57.239.300,00	30,94	0,00	56.813.050,00	100,00	99,29	100,00	7,00	184.594.050,00	100,00	99,78	Laporan Silpa Rp. 405.950,- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Nenden Wulandari, SH, M.Si		43,00	195.000.000,00	52,64	6,00	55.277.000,00	52,64	0,00	54.837.000,00	100,00	99,20	100,00	23,00	104.560.000,00		99,58		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)		100,00	43,00	105.000.000,00	52,64	6,00	55.277.000,00	52,64	0,00	54.837.000,00	100,00	99,20	100,00	23,00	104.560.000,00	100,00	99,58	Laporan Silpa Rp. 410.000,- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			100,00		245.020.000,00	21,99		53.107.500,00	20,98		45.788.500,00	97,17	88,22	97,54		233.594.477,00		96,34		
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan (Dokumen)		5,00		150.000.000,00	21,27		32.097.500,00	20,35		143.628.000,00	95,84	80,15	96,05		143.628.000,00	1.921,07	96,75		
2.11.03.1.01.0004 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Satuan: Paket)	Triana Saraswati, ST, MM		75,00	75.000.000,00	35,38	26,00	26.834.300,00	34,30	25,00	25.725.500,00	95,87	95,87	93,07	75,00	73.891.500,00		96,52		
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Satuan : Paket)		100,00	75,00	75.000.000,00	35,38	26,00	26.834.300,00	34,30	25,00	25.725.500,00	95,87	95,87	93,07	75,00	73.891.500,00	93,07	96,52		
2.11.03.1.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Satuan: Unit)	Triana Saraswati, ST, MM		5,00	25.000.000,00	1,14	0,00	296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	5,00	24.714.000,00		98,86		
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)		100,00	5,00	25.000.000,00	1,14	0,00	296.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	5,00	24.714.000,00	97,10	98,86	SILPA	
2.11.03.1.01.0014 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (Satuan: Unit)	Triana Saraswati, ST, MM		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		NaN		0,00	0,00		NaN		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan/ Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan (D)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		NaN		0,00	0,00		NaN		
2.11.03.1.01.3015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Satuan: Dokumen)	Titans Saraswati, ST, MM		1,00	50.000.000,00	9,58	0,00	4.977.500,00	9,58	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	45.022.500,00		90,04		
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)		100,00	1,00	50.000.000,00	9,58	0,00	4.977.500,00	9,58	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	1,00	45.022.500,00	100,00	90,04	SILPA	
2.11.01.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	"Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten" (Dokumen)		12,00		95.020.000,00	21,10		21.010.000,00	21,99		89.966.477,00	99,50	95,49	99,89		89.966.477,00	832,42	94,68		
2.11.03.1.02.3001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Intis Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Intis Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	Lia Muliawati, SKM		12,00	95.020.000,00	21,10	1,00	21.010.000,00	21,99	1,00	20.963.000,00	99,50	95,49	99,89	11,00	89.966.477,00		94,68		
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Intis Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)		100,00	12,00	95.020.000,00	21,10	1,00	21.010.000,00	21,99	1,00	20.963.000,00	99,50	95,49	99,89	11,00	89.966.477,00	99,89	94,68	--	--
SUB JUMLAH				168,00	759.020.000,00	28,68	40,00	220.753.900,00	28,17	21,00	210.237.750,00	98,92	95,22	80,23	133,00	754.357.327,00		96,09		
2.11.3.28.0.06.02.0004 UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN					1.052.141.300,00	20,38		238.168.318,00	18,46		313.720.675,00	90,52	111,72	86,84		1.029.212.683,00		96,89		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					513.502.000,00	29,26		150.319.020,00	25,26		224.999.055,00	86,33	149,68	72,78		499.318.471,00		97,24		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		513.502.000,00	29,26		150.319.020,00	25,26		224.999.055,00	86,33	149,68	72,78		499.318.471,00		97,24		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		107.400.000,00	19,21		28.633.680,00	15,24		100.428.425,00	79,35	161,28	65,89		100.428.425,00	65,89	93,51		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	5.866.001,00		97,77		
			100,00	1,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	5.866.001,00	100,00	97,77	- sudah tidak ada realisasi lagi (57,77%)	- koordinasi dengan PEP
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4,00	19.000.000,00	21,23	4,00	4.034.600,00	21,23	2,00	4.401.005,00	100,00	109,68	85,16	2,00	8.242.905,00		43,38		
			100,00	1,00	4.179.000,00	18,03	1,00	753.600,00	18,03	0,00	744.255,00	100,00	98,76	72,90	0,00	1.904.155,00	72,90	45,56	- tidak ada realisasi di bulan desember - sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya (99,41%)	- koordinasi dengan PEP
			100,00	1,00	8.120.000,00	24,63	1,00	2.148.000,00	24,63	1,00	2.126.760,00	100,00	99,01	100,00	1,00	4.338.760,00	100,00	49,76	- tidak ada kendala	- koordinasi dengan pep
			100,00	1,00	4.015.000,00	20,00	1,00	803.000,00	20,00	0,00	1.225.440,00	100,00	152,61	73,37	0,00	1.225.440,00	73,37	30,52	- tidak ada realisasi di bulan desember - sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya (94,01%)	- koordinasi dengan pep
			100,00	1,00	2.086.000,00	15,82	1,00	330.000,00	15,82	1,00	304.550,00	100,00	92,29	70,42	1,00	774.530,00	70,42	37,13	- tidak ada realisasi bulan desember - sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya (97,69%)	- koordinasi dengan pep

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Wahyudin, S.Pd, MM		12,00	43.000.000,00	25,19	5,00	10.830.000,00	15,28	5,00	18.743.135,00	60,65	113,07	65,35	10,00	48.868.425,00		113,65		
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Paket)		100,00	2,00	3.810.000,00	24,81	1,00	945.000,00	24,81	1,00	942.400,00	100,00	99,72	91,75	2,00	3.492.750,00	91,75	91,67	- tidak ada realisasi bulan desember - sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya (89,70%)	- koordinasi dengan pep
	Belanja Isi Tabung Gas (Paket)		100,00	1,00	5.900.000,00	20,00	1,00	1.180.000,00	10,00	1,00	1.180.000,00	50,00	100,00	80,00	2,00	6.490.000,00	80,00	110,00	- tidak ada realisasi bulan desember - sudah dilaksanakan (100%)	- koordinasi dengan pep
	Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket)		100,00	5,00	20.186.000,00	26,89	1,00	5.429.000,00	17,84	1,00	9.381.735,00	66,34	112,81	72,52	2,00	23.219.675,00	72,52	115,03	- tidak ada realisasi bulan desember - sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya (88,99%)	- koordinasi dengan pep
	Belanja Makanan dan Minum Rapat (Paket)		100,00	2,00	9.800.000,00	25,00	1,00	2.400.000,00	11,88	1,00	4.674.000,00	47,50	194,75	34,86	2,00	11.367.000,00	34,86	116,41	- tidak ada kendala	- koordinasi dengan pep
	Belanja Makanan dan Minum Jamuan Tamu (Paket)		100,00	2,00	3.504.000,00	25,02	1,00	876.000,00	8,34	1,00	2.565.000,00	33,35	292,81	54,17	2,00	4.299.000,00	54,17	122,69	- tidak ada kendala	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Wahyudin, S.Pd, MM		4,00	6.000.000,00	23,18	1,00	1.390.600,00	23,18	1,00	2.539.014,00	100,00	182,58	74,64	2,00	6.257.214,00		104,29		
	Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (Paket)		100,00	4,00	6.000.000,00	23,18	1,00	1.390.600,00	23,18	1,00	2.539.014,00	100,00	182,58	74,64	2,00	6.257.214,00	74,64	104,29	- belanja cetak buku disposisi sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Wahyudin, S.Pd, MM		12,00	5.400.000,00	25,01	3,00	1.350.480,00	25,01	3,00	1.295.600,00	100,00	95,94	92,63	9,00	5.091.880,00		94,29		
	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah (Dokumen)		100,00	12,00	5.400.000,00	25,01	3,00	1.350.480,00	25,01	3,00	1.295.600,00	100,00	95,94	92,63	9,00	5.091.880,00	92,63	94,29	- tidak ada realisasi bulan desember - sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Wahyudin, S.Pd, MM		12,00	28.000.000,00	10,81	4,00	3.028.000,00	10,81	4,00	6.300.000,00	100,00	208,06	39,32	9,00	26.102.000,00		90,22		
	Pergijanan Dinas Biasa (Laporan)		100,00	12,00	28.000.000,00	10,81	4,00	3.028.000,00	10,81	4,00	6.300.000,00	100,00	208,06	39,32	9,00	26.102.000,00	39,32	90,22	- tidak ada realisasi bulan desember - sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)		100,00		30.900.000,00	0,00		0,00	0,00		29.240.985,00	NaN		74,48		29.240.985,00	74,48	97,47		
2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Wahyudin, S.Pd, MM		7,00	30.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.985,00	NaN		74,48	5,00	29.240.985,00		97,47		
	Belanja Peralatan dan Mesin (Unit)		100,00	1,00	3.035.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	96,84	- sudah selesai dilaksanakan	- koordinasi dengan pep
	Belanja Modal Pompa (Unit)		100,00	1,00	11.577.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	0,00	11.200.000,00	100,00	96,74	- sudah selesai dilaksanakan	- koordinasi dengan pep
	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang (Unit)		100,00	2,00	2.313.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	2,00	2.240.000,00	100,00	96,82	- sudah selesai dilaksanakan	- koordinasi dengan pep
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Unit)		100,00	1,00	3.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	3.500.000,00	100,00	94,24	- sudah selesai dilaksanakan	- koordinasi dengan pep
	Belanja Modal Alat Pendingin (Unit)		100,00	1,00	4.822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.985,00	NaN		0,00	1,00	4.565.985,00	0,00	96,79	- sudah selesai dilaksanakan	- koordinasi dengan pep
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Unit)		100,00	1,00	4.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	4.135.000,00	100,00	99,94	- sudah selesai dilaksanakan	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.08.0000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD SPTH (Persen)		100,00		143.520.000,00	6,66		9.618.280,00	6,64		148.292.401,00	99,82	313,72	88,68		148.292.401,00	88,68	100,33		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Wahyudin, S.Pd, MM		12,00	58.120.000,00	4,45	2,00	2.604.000,00	4,45	2,00	12.486.616,00	100,00	479,52	95,63	10,00	54.864.941,00		93,75		
	Belanja Tagihan Listrik (Laporan)		100,00	5,00	48.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.312.738,00	NaN		100,00	4,00	45.686.905,00	100,00	94,98	- anggaran kas ada di bulan november	- koordinasi dengan pep
	Belanja Kawat/Faximili/Internet/TV Berlangganan (Laporan)		100,00	5,00	10.416.000,00	25,02	2,00	2.604.000,00	25,02	2,00	2.173.878,00	100,00	83,48	97,92	6,00	9.178.136,00	97,92	88,12	- tidak ada kendala	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Wahyudin, S.Pd, MM		12,00	95.000.000,00	8,17	5,00	7.014.180,00	8,15	4,00	18.660.000,00	99,75	255,69	81,14	11,00	93.427.460,00		109,91		
	Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas (Laporan)		100,00	1,00	201.000,00		1,00	67.000,00		1,00	134.000,00		290,00		1,00	268.000,00		133,33	- tidak ada kendala	- koordinasi dengan pep
	Belanja Bahan Isi Tabung Gas Pemadam Kebakaran (Laporan)		100,00	1,00	1.152.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	876.000,00	NaN		100,00	1,00	2.628.000,00	100,00	150,00	- tidak ada kendala	- koordinasi dengan pep
	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis lainnya (Laporan)		100,00	1,00	77.000,00	22,44	1,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	11.460,00	22,44	14,88	- tidak ada realisasi dan penyerapan anggaran	- koordinasi dengan pep
	Belanja Penalatan Kantor (Laporan)		100,00	1,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	1,00	4.900.000,00	0,00	98,00	- tidak ada realisasi	- koordinasi dengan pep
	Belanja Peralengkapan Pandal (Laporan)		100,00	3,00	12.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	50,00	3,00	9.120.000,00	50,00	73,51	- tidak ada realisasi	- koordinasi dengan pep
	Belanja Pakaian Pramubakti (Laporan)		100,00	1,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	50,00	1,00	840.000,00	50,00	93,33	- tidak ada realisasi	- koordinasi dengan pep
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)		100,00	1,00	9.240.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2.240.000,00	NaN		92,86	1,00	11.010.000,00	92,86	119,16	- tidak ada kendala	- koordinasi dengan pep
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Laporan)		100,00	3,00	55.440.000,00	12,50	1,00	6.530.000,00	12,50	1,00	15.400.000,00	100,00	212,22	93,75	3,00	54.650.000,00	93,75	116,51	- tidak ada kendala	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kecepatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH (Persen)		100,00		232.182.000,00	51,62		120.067.060,00	44,53		221.336.660,00	86,46	119,54	65,92		221.356.960,00	65,92	95,17		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlindungan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dilayani Pajak dan Peleisirannya (Satuan: Unit)	Wahyudin, S.Pd, MM		11,00	53.133.500,00	4,39	3,00	2.777.320,00	0,51	3,00	33.820.800,00	11,52	1.217,66	18,69	8,00	53.790.480,00		84,93		
	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 operasional dinas (Unit)		100,00	3,00	45.151.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	22.601.800,00	NaN		22,10	2,00	38.432.000,00	22,10	84,74	- sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 (Unit)		100,00	8,00	17.982.500,00	15,45	2,00	2.777.320,00	1,78	2,00	11.219.000,00	11,52	403,52	10,10	6,00	15.358.480,00	10,10	85,41	- sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Satuan: Unit)	Wahyudin, S.Pd, MM		27,00	30.000.000,00	46,00	8,00	13.801.040,00	0,00	8,00	19.176.900,00	0,00	138,55	26,66	19,00	28.728.980,00		95,76		
	Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan (Unit)		100,00	10,00	17.110.000,00	75,33	3,00	13.040.000,00	0,00	3,00	10.256.400,00	0,00	78,65	24,67	10,00	15.376.400,00	24,67	88,83	- sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
	Pemeliharaan Komputer (Unit)		100,00	17,00	12.890.000,00	6,00	5,00	761.040,00	0,00	5,00	8.920.500,00	0,00	1.112,15	25,38	9,00	13.352.580,00	25,38	105,22	- sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Wahyudin, S.Pd, MM		4,00	139.148.500,00	74,32	2,00	103.488.500,00	74,32	2,00	103.030.000,00	100,00	99,55	95,86	4,00	138.837.300,00		99,70		
	Pemeliharaan Bedeng Persemaian/Perbaikan (Unit)		100,00	1,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	100,00	1,00	30.000.000,00	100,00	100,00	- tidak ada realisasi	- koordinasi dengan pep
	Pemeliharaan Gudang (Unit)		100,00	1,00	90.000.000,00	100,00	1,00	90.000.000,00	100,00	1,00	89.720.000,00	100,00	99,69	100,00	1,00	89.720.000,00	100,00	99,59	- sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
	Pemeliharaan Saluran Air (Unit)		100,00	1,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	0,00	1,00	5.760.000,00	0,00	100,00	- tidak ada realisasi	- koordinasi dengan pep
	Pemeliharaan Tempat air Artetis (Unit)		100,00	1,00	13.488.500,00	100,00	1,00	13.488.500,00	100,00	1,00	13.300.000,00	100,00	98,60	100,00	1,00	13.357.200,00	100,00	99,03	- sudah dilaksanakan pada bulan sebelumnya	- koordinasi dengan pep
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					548.139.300,00	12,09		87.849.318,00	12,09		88.721.624,00	100,00	100,59	100,00		529.894.212,00		96,57		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Itri			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.28.01 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			100,00		548.739.308,00	12,09		87.849.318,00	12,09		88.121.624,00	100,00	100,99	100,00		529.894.212,00		96,57		
3.28.01.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Ketercapaian ketersediaan jumlah bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat pada UPTD SPTH (Basang)		100,00		439.755.308,00	7,04		53.065.318,00	7,04		433.173.906,00	100,00	118,15	100,00		433.173.906,00	0,10	98,50		
3.28.03.1.04.0034 Peningkatan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luis Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Satuan Ha)	Cecap Henry Sukmanah, SP		180,00	439.755.308,00	7,04	180,00	53.065.318,00	7,04	180,22	52.495.924,00	100,00	118,15	100,00	180,22	433.173.906,00		98,50		
	Menyediakan bibit tanaman hutan dan produktif bersertifikat untuk masyarakat (Hektar)		100,00	180,00	392.575.308,00	4,82	180,00	28.088.500,00	4,82	180,22	37.925.225,00	100,00	135,02	100,00	180,22	386.208.025,00	100,00	98,38	tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, namun realisasi anggaran lebih besar dikarenakan kegiatan di persenai di bulan November baru dapat dibayarkan di bulan Desember.	selalu berkoordinasi dengan keuangan
	Pergelaran Dinas dalam rangka Monitoring Distribusi Bibit, Pembinaan, Koordinasi/Konsultasi Perbenihan Tanaman Hutan (Laporan)		100,00	0,00	47.180.008,00	25,50	0,00	24.976.818,00	25,50	0,00	24.170.699,00	100,00	99,17	100,00	0,00	46.973.881,00	100,00	99,56	tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, Realisasi keuangan lebih besar disebabkan adanya pergelaran dinas yang dilaksanakan bulan sebelumnya namun baru dapat dibayarkan di bulan Desember.	berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk mempercepat realisasi keuangan.
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (Persen)		100,00		108.984.008,00	32,48		14.784.000,00	32,48		96.120.306,00	100,00	74,82	100,00		96.728.306,00	100,00	88,75		
3.28.03.1.09.0001 Peretapas Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pencetakan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pen (Satuan: Unit Usaha)	Sitania, SP, MM		1,00	25.000.008,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Naif	Naif	100,00	1,00	24.667.806,00		98,67		
	Penetapan Pengada Pengedar Benih Bibit Tanaman Hutan (Unit Usaha)		100,00	1,00	25.000.008,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	Naif	Naif	100,00	1,00	24.667.806,00	100,00	98,67	-	-
3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Sitania, SP, MM		1,00	25.000.008,00	7,40	1,00	1.850.000,00	7,40	1,00	1.437.000,00	100,00	77,68	100,00	1,00	23.292.700,00		93,17		
	Penerbitan Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan (Sertifikat)		100,00	1,00	25.000.008,00	7,40	1,00	1.850.000,00	7,40	1,00	1.437.000,00	100,00	77,68	100,00	1,00	23.292.700,00	100,00	93,17	-	-
3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Sitania, SP, MM		1,00	25.000.008,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1.032.500,00	Naif		100,00	2,00	24.153.600,00		96,61		
	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Mutu Benih Tanaman Hutan (Sertifikat)		100,00	1,00	25.000.008,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1.032.500,00	Naif		100,00	2,00	24.153.600,00	100,00	96,61	-	-
3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan (Satuan: Sertifikat)	Sitania, SP, MM		4,00	25.000.008,00	100,00	4,00	25.000.000,00	100,00	4,00	20.246.200,00	100,00	80,98	100,00	4,00	20.246.200,00		88,98		
	Penerbitan Sertifikat Mutu Bibit Tanaman Hutan (Sertifikat)		100,00	4,00	25.000.008,00	100,00	4,00	25.000.000,00	100,00	4,00	20.246.200,00	100,00	80,98	100,00	4,00	20.246.200,00	100,00	88,98	-	-
3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar (Satuan: Laporan)	Sitania, SP, MM		1,00	8.984.008,00	95,20	1,00	7.934.000,00	95,20	1,00	3.310.000,00	100,00	41,72	100,00	2,00	4.368.000,00		48,53		
	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan (Laporan)		100,00	1,00	8.984.008,00	95,20	1,00	7.934.000,00	95,20	1,00	3.310.000,00	100,00	41,72	100,00	2,00	4.368.000,00	100,00	48,53	-	-
SUB JUMLAH				306,00	1.062.241.308,00	20,39	225,00	218.168.338,00	18,46	222,22	313.120.679,00	90,52	131,72	86,84	280,22	1.029.212.683,00		96,89		
2.11.3.28.0.00.02.0005	UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN				5.354.437.511,00	51,47		2.755.980.979,00	49,22		406.834.570,00	95,61	14,76	75,57		2.905.867.468,00		54,27		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					4.409.078.460,00	54,22		2.390.392.872,00	52,73		247.826.070,00	97,25	10,37	71,82		2.251.482.016,00		51,06		
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		4.409.078.460,00	54,22		2.390.392.872,00	52,73		247.826.070,00	97,25	10,37	71,82		2.251.482.016,00		51,06		
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tuhura Banten (Persen)		100,00		295.243.700,00	49,03		144.759.340,00	31,48		270.480.040,00	70,33	82,89	85,05		270.480.040,00	85,05	91,61		
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Haris Mulyana, A.Md		2,00	90.620.000,00	94,79	1,00	85.897.000,00	47,40	1,00	84.900.000,00	50,00	98,84	52,61	2,00	89.623.000,00		98,90		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik atau Penerangan Bangunan Kantor (Paket)		100,00	2,00	90.620.000,00	94,79	1,00	85.897.000,00	47,40	1,00	84.900.000,00	50,00	98,84	52,61	2,00	89.623.000,00	52,40	98,90	Tidak ada kendala	-
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Haris Mulyana, A.Md		3,00	31.829.000,00	4,16	0,00	1.406.000,00	4,16	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3,00	32.423.000,00		95,84		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor (Paket)		100,00	3,00	31.829.000,00	4,16	0,00	1.406.000,00	4,16	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	3,00	32.423.000,00	100,00	95,84	Tidak ada kendala	-
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Satuan: Paket)	Haris Mulyana, A.Md		43,00	87.479.700,00	36,38	12,00	31.815.340,00	36,38	12,00	16.961.680,00	100,00	53,31	96,65	45,00	72.626.040,00		83,02		
	Penyediaan Natura (Paket)		100,00	12,00	18.936.000,00	21,97	3,00	4.161.540,00	21,97	3,00	4.156.680,00	100,00	99,88	96,22	12,00	18.931.040,00	98,12	99,97	target sudah tercapai	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu (Laporan)		100,00	22,00	51.743.700,00	40,47	5,00	20.533.700,00	40,47	5,00	7.765.000,00	100,00	37,09	100,00	24,00	38.575.000,00	100,00	74,55	tidak ada kendala	-
	Jasa Tenaga Administrasi (Laporan)		100,00	9,00	16.800.000,00	40,00	4,00	6.720.000,00	40,00	4,00	5.040.000,00	100,00	75,00	95,00	9,00	15.120.000,00	95,00	90,00	Tidak ada kendala	-
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Satuan: Paket)	Haris Mulyana, A.Md		1,00	19.124.000,00	6,30	0,00	1.204.000,00	6,30	0,00	1.200.000,00	100,00	99,67	100,00	1,00	19.120.000,00		99,98		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Paket)		100,00	1,00	19.124.000,00	6,30	0,00	1.204.000,00	6,30	0,00	1.200.000,00	100,00	99,67	100,00	1,00	19.120.000,00	100,00	99,98	Tidak ada target karena sudah tercapai	-
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Satuan: Dokumen)	Haris Mulyana, A.Md		12,00	2.064.000,00	47,50	6,00	980.000,00	47,50	0,00	980.000,00	100,00	100,00	100,00	6,00	2.064.000,00		100,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)		100,00	12,00	2.064.000,00	47,50	6,00	980.000,00	47,50	0,00	980.000,00	100,00	100,00	100,00	6,00	2.064.000,00	100,00	100,00	Tidak ada target karena sudah tercapai	-
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Satuan: Laporan)	Haris Mulyana, A.Md		12,00	62.127.000,00	37,74	3,00	23.457.000,00	37,74	3,00	15.954.000,00	100,00	68,01	100,00	12,00	54.624.000,00		87,92		
	Pejalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		100,00	12,00	62.127.000,00	37,74	3,00	23.457.000,00	37,74	3,00	15.954.000,00	100,00	68,01	100,00	12,00	54.624.000,00	100,00	87,92	tidak ada kendala	-
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah/Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD Pengelolaan Tuhura Banten (Persen)		100,00		1.108.052.460,00	45,97		509.344.270,00	44,52		671.985.850,00	96,86	16,66	71,42		671.985.850,00	71,42	60,65		
2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Haris Mulyana, A.Md		29,00	121.566.000,00	25,14	4,00	31.064.000,00	25,14	4,00	0,00	100,00	0,00	107,39	33,00	80.900.000,00		65,47		
	Penyediaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)		100,00	29,00	121.566.000,00	25,14	4,00	31.064.000,00	25,14	4,00	0,00	100,00	0,00	107,39	33,00	80.900.000,00	107,39	65,47	Tidak ada kendala	-
2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Satuan: Unit)	Haris Mulyana, A.Md		43,00	984.486.460,00	48,58	30,00	478.280.270,00	46,96	30,00	84.875.660,00	96,66	17,75	66,91	35,00	561.085.850,00		60,04		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)		100,00	43,00	984.486.460,00	48,58	30,00	478.280.270,00	46,96	30,00	84.875.660,00	96,66	17,75	66,91	35,00	561.085.850,00	66,91	60,04	Tidak ada kendala	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tuhura Banten) (Persen)		100,00		63.776.300,00	26,66		17.905.200,00	26,66		54.028.490,00	100,00	62,85	97,79		54.028.490,00	97,79	84,72		
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Satuan: Laporan)	Haris Mulyana, A.Md		24,00	63.776.300,00	26,66	6,00	17.905.200,00	26,66	6,00	10.687.030,00	100,00	62,85	97,79	24,00	54.028.490,00		84,72		
	Penyediaan Jasa Komunikasi (Laporan)		100,00	12,00	19.806.000,00	25,76	3,00	5.100.000,00	25,76	3,00	2.671.230,00	100,00	52,38	95,39	12,00	13.941.590,00	96,39	70,41	Tidak ada kendala	-
	Penyediaan Jasa Listrik (Laporan)		100,00	12,00	43.976.300,00	27,66	3,00	11.905.200,00	27,06	3,00	8.015.800,00	100,00	67,33	98,41	12,00	40.086.900,00	98,41	91,16	Tidak ada kendala	-
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tuhura Banten (persen)		100,00		2.942.006.000,00	58,44		1.719.284.062,00	58,21		1.254.987.638,00	99,60	1,88	70,08		1.254.987.638,00	70,08	42,66		
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan (Satuan: Unit)	Haris Mulyana, A.Md		10,00	95.836.000,00	30,36	4,00	29.398.800,00	30,36	4,00	8.401.200,00	100,00	28,87	82,06	13,00	75.138.400,00		78,40		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)		100,00	10,00	95.836.000,00	30,36	4,00	29.398.800,00	30,36	4,00	8.401.200,00	100,00	28,87	82,06	13,00	75.138.400,00	82,06	78,40	Tidak ada kendala	-
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Satuan: Unit)	Haris Mulyana, A.Md		38,00	2.846.176.000,00	59,39	18,00	1.690.185.262,00	59,15	18,00	23.864.500,00	99,60	1,41	69,68	49,00	1.179.849.238,00		41,45		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)		100,00	38,00	2.846.176.000,00	59,39	18,00	1.690.185.262,00	59,15	18,00	23.864.500,00	99,60	1,41	69,68	49,00	1.179.849.238,00	69,68	41,45	Tidak ada kendala	-
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					945.359.057,00	38,67		365.588.107,00	32,88		159.006.500,00	85,03	43,49	93,07		654.385.450,00		89,22		
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATIDAN EKOSISTEMNYA			100,00		945.359.057,00	38,67		365.588.107,00	32,88		159.006.500,00	85,03	43,49	93,07		654.385.450,00		89,22		
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (Persen)		100,00		945.359.057,00	38,67		365.588.107,00	32,88		654.385.450,00	85,03	43,49	93,07		654.385.450,00	93,07	89,22		
3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tuhura Provinsi (Satuan: Operasi)	Rom, SE		48,00	404.597.057,00	17,72	12,00	71.577.057,00	17,72	12,00	67.488.000,00	100,00	94,16	99,31	32,00	340.933.000,00		84,26		
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi (Notulen)		100,00	0,00	5.826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	NaN	64,95	0,00	2.011.000,00	64,95	34,55	Tidak ada target capaian kinerja di Bulan ini	-
	Pelaksanaan Patroli Pengamanan Kawasan dan Pencegahan Kebakaran Hutan Tuhura Banten (Operasi)		100,00	48,00	397.246.000,00	18,63	12,00	71.520.000,00	18,01	12,00	67.488.000,00	100,00	94,23	100,00	32,00	318.922.000,00	100,00	85,32	Realisasi Fisik telah dilaksanakan sesuai target capaian kinerja Bulan ini	Realisasi fisik dalam proses keuangan
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi (Laporan)		100,00	0,00	1.537.057,00	3,72	0,00	57.057,00	3,72	0,00	0,00	100,00	0,00	51,86	0,00	0,00	51,86	0,00	Realisasi Fisik telah dilaksanakan	Realisasi anggaran masih proses keuangan
3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tuhura yang Dinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Teliti Kehati-Tinggi (Satuan: Ha)	Rom, SE		100,00	50.000.000,00	97,64	0,00	48.320.000,00	97,04	0,00	885.000,00	100,00	1,82	100,00	100,00	2.355.000,00		4,73		
	Rapat Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi (Notulen)		100,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	900.000,00	100,00	0,00	885.000,00	100,00	98,33	100,00	0,00	885.000,00	100,00	98,33	Tidak ada target capaian kinerja Bulan ini	-
	Pelaksanaan Inventarisasi Tumbuhan, Satwa, serta Habitat (Hektar)		100,00	100,00	47.504.800,00	100,00	0,00	47.504.800,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	740.000,00	100,00	1,56	Tidak ada target capaian kinerja Bulan ini	-
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi (Laporan)		100,00	0,00	1.595.200,00	7,22	0,00	115.200,00	7,22	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	740.000,00	100,00	46,39	Tidak ada target capaian kinerja Bulan ini	-

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi s/d Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem (Satuan: Ha)	Romi, SE		12,50	50.000.000,00	79,95	12,50	39.970.000,00	79,95	0,00	32.560.000,00	100,00	81,45	113,08	0,00	41.595.000,00		83,19		
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi (Notulen)		100,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nilai	Nilai	1.000,00	0,00	985.000,00	1.000,00	98,33	Tidak ada target capaian kinerja Bulan ini	-
	Pelaksanaan Penanaman Bibit Kehutanan di Dalam Kawasan Tahura Barten (Hektar)		100,00	12,50	48.700.000,00	81,26	12,50	39.570.000,00	81,26	0,00	32.560.000,00	100,00	82,28	96,80	0,00	40.710.000,00	96,80	83,59	Tidak ada target capaian kinerja Bulan ini	-
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi (Laporan)		100,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	400.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Tidak ada target capaian kinerja Bulan ini	-
3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Pemohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditolak Lanjut (Satuan: Pemohonan)	Edwin Nugraha, S.Hut, M.P		3,00	19.880.000,00	17,62	0,00	3.501.000,00	8,12	0,00	1.560.000,00	46,08	44,53	96,50	3,00	2.853.000,00		14,35		
	Pemanfaatan jasa lingkungan (permohonan)		100,00	3,00	19.880.000,00	17,62	0,00	3.501.000,00	8,12	0,00	1.560.000,00	46,08	44,53	96,50	3,00	2.853.000,00	96,50	14,35	tidak ada output kegiatan yang tertera anggaran silpa, terlampir laporan sub kegiatan	
3.28.04.1.01.0007 Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Pelebaran Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha, S.Hut, M.P		1,00	20.000.000,00	8,53	0,00	1.705.500,00	8,00	0,00	1.560.000,00	93,79	91,47	37,36	1,00	19.854.500,00		99,27		
	Kerjasama dengan Mitra Konservasi di Tahura Banten (Dokumen)		100,00	1,00	20.000.000,00	8,53	0,00	1.705.500,00	8,00	0,00	1.560.000,00	93,79	91,47	37,36	1,00	19.854.500,00	37,36	99,27	tidak ada output yang tertera anggaran silpa, terlampir laporan sub kegiatan	
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Satuan: Desa)	Romi, SE		4,00	125.000.000,00	35,59	2,00	44.485.000,00	35,59	2,00	36.112.000,00	100,00	81,18	100,00	4,00	107.785.000,00		86,23		
	Rapat Persiapan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi (Notulen)		100,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nilai	Nilai	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Tidak ada target capaian kinerja Bulan ini	-
	Pelaksanaan Penyerahan Bantuan dan Bimtek Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat (Desa)		100,00	4,00	124.062.000,00	35,83	2,00	44.447.000,00	35,83	2,00	36.112.000,00	100,00	81,25	100,00	4,00	107.785.000,00	100,00	86,88	Realisasi tsik dilaksanakan sesuai target capaian kinerja Bulan ini	Realisasi anggaran proses di keuangan
	Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi (Laporan)		100,00	0,00	38.000,00	100,00	0,00	38.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Tidak ada target capaian kinerja bulan ini	-
3.28.04.1.01.0010 Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Pea Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha, S.Hut, M.P		1,00	162.948.000,00	92,83	1,00	151.254.000,00	61,48	0,00	16.658.500,00	66,23	11,01	67,79	2,44	28.352.500,00		17,40		
	penataan Blok Pengelolaan di Tahura Barten (Dokumen)		100,00	1,00	162.948.000,00	92,83	1,00	151.254.000,00	61,48	0,00	16.658.500,00	66,23	11,01	67,79	2,44	28.352.500,00	67,79	17,40	rapat tata batas belum terlaksana karena menunggu jadwal dari UPT KemerLHK	koordinasi dengan UPT KemerLHK dan diperoleh informasi rapat tata batas akan dilaksanakan pada tanggal 16 desember 2024, sebagaimana surat undangan rapat terlampir
3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan (Satuan: Dokumen)	Edwin Nugraha, S.Hut, M.P		2,00	112.994.000,00	3,96	0,00	4.471.500,00	2,49	0,00	2.183.000,00	62,88	48,80	97,87	1,00	110.543.450,00		97,97		

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Target Triwulan			Realisasi Triwulan			Capaian Triwulan		Realisasi sld Triwulan Ini			Capaian Terhadap Target Tahunan		Kendala	Tindak Lanjut
			(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	(%)	Output	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penyusunan rencana pengelolaan TAHURA Banter (Dokumen)		100,00	2,00	112.934.000,00	3,96	0,00	4.473.350,00	2,49	0,00	2.183.000,00	62,88	48,80	97,87	1,00	110.643.450,00	97,87	97,97	anggaran belum terealisasi	
SUB JUMLAH				388,50	5.354.437.517,00	51,47	111,50	2.755.980.979,00	49,22	92,00	406.634.570,00	95,53	14,76	75,57	366,44	2.905.867.468,00		54,27		
JUMLAH				4.365,50	70.874.987.485,00	29,52	1.358,50	20.255.821.105,00	25,43	1.170,22	11.542.986.546,00	89,54	56,87	59,81	1.042,66	34.085.955.147,41		48,09		

D. Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Perubahan Anggaran Tahun 2024

Dalam pencapaian target Pendapatan Dinas Lingkungan hidup Provinsi Banten tahun 2024 belum melampaui target yang telah ditetapkan dari target Sebesar Rp 276.120.000,00,- terealisasi sebesar Rp. 199.412.500,00,- atau sebesar 72,22% dari terget yang telah ditetapkan. Seperti terlihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.3 Realisasi Target Pendapatan Tahun 2024

No	Kode rek	Uraian Pendapatan	Target APBD Murni (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		Lebih/(kurang) (Rp)	Permasalahan	Tindaklanjut
					(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	276.120.000,00	276.120.000,00	199.412.500,00	72,22%	- 76.707.500,00		
1	4.1.02.02.01.0001	Kantin	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.000,00	100%	Rp -	-	-
2	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	250.000.000,00	250.000.000,00	171.615.500,00	68,65%	-Rp 78.384.500,00	1.Pelaksanaan implementasi Keputusan Gubernur Banten No. 181 Tahun 2024 tentang pembentukan komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup provinsi banten tanggal 06 Juni 2024, dimana ada kebijakan yang mengharuskan bekerja sama dengan Laboratorium Lingkungan terakreditasi (UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN DLHK PROVINSI BANTEN) dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji rona awal lingkungan dalam dokumen lingkungan dan monitoring lingkungan baru berjalan pada TW. IV (Oktober – Desember 2024) sehingga masih belum maksimal pencapaian realisasi 2.Perjalanan Dinas Tahun 2024 untuk pengambilan sample retribusi hanya Rp. 75.000.000,- sehingga ada permintaan sampling retribusi yang tidak bisa di fasilitasi dengan perjalanan dinas pada bulan desember 2024	Penambahan Anggaran perjalanan dinas dalam rangka optimalisasi pencapaian target pendapatan daerah
2	4.1.02.02.09.0001	Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (TAHURA)	20.000.000,00	20.000.000,00	21.677.000,00	108,39%	Rp 1.677.000,00	-	-

E. Permasalahan dan Solusi

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam merealisasikan capaian kinerjanya. Adapun Permasalahan dan Solusi dalam pelaksanaan kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pilihan Kehutanan adalah sebagai berikut :

a) Permasalahan

1. Target IKU tidak tercapai karena peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan, tingginya konsentrasi limbah udara industri di Banten, masih banyaknya pembakaran sampah secara terbuka oleh masyarakat karena rendahnya kesadaran masyarakat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) baru menggambarkan kondisi ekosistem (State), seperti meningkatnya kadar SO₂ dan NO₂ di udara yang dipicu oleh Drivers (seperti populasi yang terus meningkat dan Pressure (seperti ekosistem yang terganggu akibat kegiatan manusia)
2. Target IKA tidak tercapai karena a. Limbah domestik (masih rendahnya cakupan fasilitas (IPAL) komunal di kawasan perkotaan dan pedesaan b. Limbah Industri (masih kurangnya pengawasan dan penegakan hukum c. masih adanya erosi dan sedimentasi akibat aktivitas penambangan dan deforestasi di daerah hulu sungai, d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan, e. masih banyaknya sampah plastik yang terbuang ke sungai
3. Target IKAL tercapai namun masih perlu peningkatan koordinasi multistekholder (pelaku usaha, masyarakat, Pemerintah pusat, provinsi dan Kab/Kota terhadap pengendalian pencemaran Air laut dan pengawasan serta pemantauan pembuangan limbah ke laut.
4. Target IKTL tercapai namun untuk mempertahankan capaian masih perlu adanya rehabilitasi lahan karena masih luasnya lahan kritis, peningkatan ruang terbuka hijau serta penguatan data penanaman (dalam bentuk peta) untuk dilaporkan kedalam sistem pelaporan
5. Beberapa Cabang Dinas (CDLHK Lebak Tangerang, CDLHK Pandeglang Serang dan Cilegon) belum memiliki gedung kantor sendiri
6. target Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas tercapai namun perlu adanya peningkatan kualitas dokumen KLHS Kab/Kota melalui optimalisasi kompetensi tenaga ahli

7. Masih perlu adanya sinergitas antara perencanaan dan penganggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan agar seluruh rencana bisa dieksekusi dengan baik, Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia baik tingkat lokal/daerah maupun nasional terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
8. Persetujuan Lingkungan belum terintegrasi (semula kewenangan Kab/Kota menjadi Provinsi) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum optimalnya Pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Banten belum optimal
9. Jumlah KTH di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2024 sebanyak 339 KTH, sedangkan jumlah Penyuluh Kehutanan ASN sebanyak 6 Orang dan Non ASN (PSKM) 152 Orang, hal ini mengindikasikan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah KTH yang di Bina dengan Jumlah Pendamping serta masih minimnya Jumlah luas Perhutanan Sosial yang sudah dilegalisasi (sampai dengan tahun 2024 seluas 6.360,35 Ha sedangkan Pendamping Perhutanan Sosial sebanyak 6 orang).
10. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS serta minimnya pemahaman dan kesadaran lingkungan sehingga menjadi kendala dalam keberhasilan pengelolaan DAS.

b) Solusi/Tindaklanjut

1. Peningkatan Pengelolaan Emisi dari Kendaraan Pengendalian Emisi Industri Penanganan Sampah Penghijauan dan Pengurangan Polusi Mengkampanyekan gerakan tanam pohon di masyarakat Penggunaan Teknologi dan Pemantauan Kualitas Udara Edukasi dan Kesadaran Publik Kerjasama Lintas Sektor

2. Peningkatan Pengelolaan Limbah Domestik Penegakan Hukum terhadap Limbah Industri Pengelolaan Sedimentasi Peningkatan Praktik Pertanian Ramah Lingkungan Penanganan Sampah Infrastruktur dan Teknologi Edukasi dan Kampanye Publik Kolaborasi Lintas Sektor
3. Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain : 1). Pengendalian Limbah Laut: Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestik dan industri ke perairan laut. 2). Pembersihan Laut dan Pantai: Pelaksanaan program bersih pantai secara berkala melibatkan masyarakat dan komunitas lokal. 3). Penegakan Hukum Lingkungan: Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran laut, termasuk dari sektor perkapalan.
4. meningkatkan luas areal penanaman pada lahan kritis- meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat- memberikan pelatihan pemetaan dan cara pelaporan sesuai dengan ketentuan
5. Mengusulkan Pengadaan /Pembangunan Gedung Kantor
6. Optimalisasi Penguatan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota
7. Peningkatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melalui strategi pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut
8. Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Persetujuan Lingkungan serta optimalisasi Pembinaan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban Pelaporan Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
9. Meningkatkan kapasitas pendamping KTH khususnya bagi PKSM. serta mengusulkan penambahan jumlah Pendamping Perhutanan Sosial

10. Peningkatan kesadaran masyarakat dan keterlibatan dalam pengelolaan DAS dengan melakukan pelatihan serta penulisan secara berkelanjutan

F. Analisis Kesesuaian dengan Target Kinerja Program

Analisis kesesuaian dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituangkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.4 Kesesuaian dengan Target Kinerja Program
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024**

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)	Keterangan
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil		
1	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	$= \Sigma \text{Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi} / \text{Jumlah Kegiatan yang diampu}$	Cakupan Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dibagi Jumlah Kegiatan yang diampu	DINAS LHK	SEKRETARIS DINAS LHK	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 7 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (7)	$= (700/7)$	100	100	
					KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 3 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	$= (300/3)$	100	100	
					KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 3 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (3)	$= (300/3)$	100	100	
					KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 2 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (2)	$= (200/2)$	100	100	
					KEPALA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 4 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (4)	$= (400/4)$	100	100	
					KEPALA UPTD TAHURA BANTEN	100 Persen	Persentase ketercapaian setiap kegiatan = $(100 \% \times 4 \text{ kegiatan})$, dibagi jumlah kegiatan yang diampu (4)	$= (400/4)$	100	100	
2	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	$= \Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)} + \Sigma \text{dokumen perencanaan lingkungan hidup yang divalidasi yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di bagi Jumlah Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan yang divalidasi dikali } 100\%$	Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas adalah Persentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah Mengintergrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100 Persen	1. Dokumen DIKPLHD 2. Dokumen Monitoring Implementasi Model Kerjasama Penurunan Emisi berbasis Pemberdayaan Masyarakat 3. Dokumen Review RPPLH Banten 2024 4. Dokumen RKL RPL (BPSDM, DLHK dan KP3B) 5. Pembinaan Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota) 6. Pemantauan dan Evaluasi Dokumen KLHS RPJMD dan RPJPD Kab. Kota (8 kab/kota)	$= (6/6) * 100$	100	100	
3	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang telah diberikan pengelolaan Hutan Adat dan ditetapkan oleh Kementerian LHK dibagi jumlah MHA yang potensial yang diakui pemerintah (17 MHA potensial) dikali 100%	Persentase jumlah masyarakat hukum adat (MHA) yang ditetapkan oleh kementerian lhk dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup setiap tahun	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	11,76 persen	1. MHA Karang (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg) 2. MHA Cibarani (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg) 3. MHA Pasir Eurih (Pemberdayaan 30 Org, Bibit Cengkeh 300 Btg, Bibit Alpukat 200 Btg, Pupuk 500 Kg)	$= 3/17 * 100$	17,65	150,06	

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)	Keterangan
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil		
4	Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	Jumlah lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dibagi jumlah target lembaga tiap tahun yang akan dilibatkan dalam pengelolaan lingkungan hidup x 100%	Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup per tahun sebanyak 60 lembaga	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100 Persen	1. Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (1 Dokumen) 2. Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Penyuluhan dan Kampanye (150 org) 3. Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat (288 Keluarga) 4. Jumlah lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (348 Lembaga)	=787/787*100	100	100	
5	Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga/Kab.Kota)	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga + Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	Jumlah sekolah adiwiyata/Lembaga, Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	68 lembaga/ 7 Kab.kota	1. Jumlah sekolah adiwiyata yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan : Adiwiyata Provinsi 83 Sekolah, Adiwiyata Nasional/Mandiri 52 Sekolah 2. Jumlah kota adipura yang peduli terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun berjalan : 7 Kab/Kota	=135 Lembaga/ 7 Kab.Kota	135 Lembaga / 7 Kab.Kota	198,53	
6	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	jumlah pelaku usaha yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di kali 100%	Banyaknya pelaku usaha /kegiatan yang dilaksanakan pembinaan dan Pengawasan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	85 Persen	1. terdapat 160 pelaku usaha yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH nya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. 2. telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 139 pelaku usaha	= (139 / 160)x100	86.875 Persen	102,21	
7	Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	=Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti adalah pengaduan yang masuk ke seksi pengaduan dan penegakan hukum kemudian dilakukan : 1. Pemeriksaan kelengkapan pengaduan 2. Pemeriksaan kewenangan penanganan pengaduan 3. Verifikasi lapangan pengaduan atau pelimpahan kewenangan pengaduan 4. Tindak lanjut hasil verifikasi lapangan	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	100 Persen	Jumlah Pengaduan yang masuk 26, yang ditindak lanjuti 26 = 100%	= (26/26) x 100	100 Persen	100	0

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)	Keterangan
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil		
8	Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Σ lokasi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup + Σ Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dibagi target lokasi 4 tahun	Pencapaian pencegahan, Penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah persentase dari pencapaian upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PSLB3PP	61.5 Persen	1. jumlah lokasi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebanyak 112 lokasi (udara 64 kali, sungai 40 kali, laut 8 kali) 2. jumlah lokasi penanggulangan pencemaran tidak ada (= 0) 3. jumlah lokasi pemulihan pencemaran/proklamasi = 64 lokasi jadi realisasi = 112+0+64 = 176 target lokasi 4 tahun adalah: 1. target pencegahan pencemaran 202 lokasi 2. target penanggulangan pencemaran 13 titik 3. target pemulihan pencemaran/proklamasi 60 titik jadi total target = 275 lokasi	= (176/275)x 100	64 Persen	104,07	
9	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati = (Σ rencana induk pengelolaan kehati yang disusun + Σ jumlah dokumen laporan	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati adalah persentase ketersediaan Rencana Induk, laporan	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PSLB3PP	14.29 Persen	1. rencana induk pengelolaan kehati yang disusun 1 2. dokumen laporan peningkatan kapasitas 1 3. dokumen laporan sarpras 0 target 14 dokumen dalam 4 tahun	=1+1+0/14*100% =14,29%	14,29	100	
10	Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Persentase Dokumen Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 = Jumlah Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan	Dokumen Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PSLB3PP	100	persentase Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 sebesar 100 Persen = jumlah permohonan fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 dibagi jumlah pemohon dikali 100 persen terdapat 5 permohonan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 , dan difasilitasi sebanyak 5 Pemohon. Persentase Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan 100 Persen = jumlah Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 yang dilaksanakan pada tahun 2024 (30 perusahaan(capaian koordinasi 11 perusahaan sebesar 100% dan capaian fasilitas 19 perusahaansebesar 100%) dibagi target Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 tahun 2024 30 Perusahaan (100%) dikali 100% Target Koordinasi Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 tahun 2024 adalah sebanyak 11 perusahaan dan sudah dilakukan pembinaan terhadap 11 perusahaan tersebut	'= (100%+100%)/ 100% + 100% = 100%	100%	100	
11	Persentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	Jumlah sampah kerjasama pada tahun n dibagi target volume sampah ditangani pada tahun n x 100%	Jumlah sampah kerjasama dibagi Jumlah target volume sampah yang ditangani x 100%	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PSLB3PP	100	Jumlah sampah kerjasama pada tahun 2024 adalah sebanyak : 264 Ton, Target Volume sampah yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebanyak 258 Ton	= (262/258) x 100% =	101,55	101,55	Sampah dari Banten Lama yang di buang ke TPA Cilowong sebanyak 124 Ton, Sampah yang di tangani oleh Bank Sampah yang dikasih motor roda 3 sebanyak = 138 unit x 0.5 ton sebanyak 2 kali pengangkutan dalam 1 tahun = 138 Ton Jumlah sampah yang ditangani = 124+138 = 262 Ton
12	Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	(jumlah dokumen perencanaan hutan tahun ke n + jumlah dokumen pemanfaatan hutan tahun ke n + jumlah unit management HHK tahun ke n + jumlah unit management HHBK tahun ke n dibagi target 4 tahun	Dokumen perencanaan hutan, pemanfaatan hutan dan unit management Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu dibagi target selama 4 tahun x 100%	DINAS LHK	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	25%	1. realisasi dokumen perencanaan hutan = 6 dokumen 2. realisasi dokumen pemanfaatan hutan = 4 dokumen 3. realisasi unit manajemen HHK = 24 unit management 4. realisasi unit management HHBK = 7 unit management target 4 tahun: 1. dokumen perencanaan = 20 dokumen 2. dokumen pemanfaatan hutan = 16 Dokumen 3. target unit manajemen HHK = 40 unit management 4. target unit manajemen HHBK = 16 unit management)	= (6+4+24+7)/(20+16+40+16) x 100%	44,57	178,28	

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)	Keterangan
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil		
13	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat = Σ KTH + FMU + Σ Penyuluh + Σ Kelompok Perhutanan Sosial	Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan (KTH), Forest Managemen Unit (FMU), Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Perhutanan Sosial	DINAS LHK	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	47 Kelompok	1. Jumlah KTH = 55 2. Jumlah FMU = 0 3. Jumlah Penyuluh = 1 4. Kelompok PS = 2 total 58 kelompok	=55+0+1+2	58	123,40	
14	Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani dibagi Jumlah Seluruh Kawasan Ekosistem Bernilai Penting x 100 %	Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang ditangani setiap tahun dibagi 14 kawasan ekosistem bernilai penting di provinsi banten	DINAS LHK	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28.57 Persen	Jumlah KEE di Banten ada 14, yang ditangani 4 KEE (Serang kadu beureum Padarincang, Taman Kehati Serang, Lebak HA Kasepuhan Karang, Banten Mangrove Center Sawah Luhur) = $4/14 \times 100\% = 28,57$	= $4/14 \times 100\% = 28,57$	28.57 Pe	100	
15	Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Jumlah DAS yang ditangani pertahun / DAS Prioritas x 100%	Jumlah DAS yang ditangani per tahun dibagi 5 DAS Prioritas di Provinsi Banten	DINAS LHK	KEPALA BIDANG DAS,KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	20 Persen	1. DAS Prioritas : Cidurian, Ciujung, Cidanau, Cibanten, Cisdane 2. DAS Yang ditangani Cidanau dan Ciujung	= $2/5 \times 100\%$	40	200	
16	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	Jumlah Lahan yang terehabilitasi = Σ pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-LT asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang terehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang terehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Rersapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah lebak dan tangerang	DINAS LHK	KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG	2500 HA	jumlah pohon yang ditanam = 1.415.000 batang yang tertanam pada 13 KTH dan 32 Kelompok, di wilayah Lebak Tangerang		2830 Ha	113,2	APBD Prov Banten a. Pemeliharaan HR Tahun ke-1 = 4 KTH b. Pemeliharaan HR Tahun Ke-2 = 2 KTH c. Pemeliharaan HR Tahun Ke-3 = 7 KTH d. Penghijauan lingkungan= 2 Kelompok APBN BP DAS Bogor e. KBR = 12 Kelompok f. Bibit Rumpin 20 Kelompok g. Gully plug = 12 Kelompok Total = 59 Kelompok

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)	Keterangan
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil		
17	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Lebak dan Tangerang	DINAS LHK	KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG	9 Kelompok	Pemberdayaan Masyarakat pada kawasan bernilai ekosistem penting : 1. KTH Saung Ayub 2. KTH Muara Cemerlang 3. KTH Mapuca 4. KTH Mangrove Lestari Lontar 5. KTH Cirinten 6. KTH Bayah Timur TSL : 1. Kelompok Penangkar Burung 2. kelompok penangkar jangkrik 3. kelompok Transplantasi Korai	= 6 +3 = 9 kelompok	9 kelompok	100	
18	Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Jumlah Lahan yang ter rehabilitasi = x pohon yang ditanam dari Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada CDLHK-PSC asumsi per hektar : Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Murni = 600 btg/Ha Jml Kebutuhan Bibit Hutan Rakyat Pengkayaan = 300 btg/Ha Luas Penghijauan Lingkungan = (jumlah bibit tertanam : 600 btg) ha	Luas lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang ter rehabilitasi baik melalui kegiatan yang bersifat vegetatif (penanaman hutan rakyat, penanaman mangrove, penghijauan lingkungan, pembangunan hutan kota), maupun yang ter rehabilitasi melalui pembuatan bangunan Sipil Teknis (Sumur Rersapan, Gullyplug, Biopori dan embung) guna mengkonservasi tanah dan air, hutan lahan. Wilayah Pandeglang, Serang Cilegon	DINAS LHK	KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON	2500 HA	Jumlah bibit tertanam pada hutan mangrove = 21.500 batang = 5,3 Ha Jumlah bibit tertanam pada hutan rakyat pengkayaan = 706.641 batang = 2.355,47 Ha	= 5,3 Ha + 2.355,47 Ha = 2.363,32 Ha	2.363,32 Ha	94,53	
19	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Jumlah Kelompok TSL dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meningkat 3 kelompok pertahun	Bertambahnya Jumlah Kelompok Tanaman dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat pada Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Wilayah Pandeglang, Serang Cilegon	DINAS LHK	KEPALA CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON	9 Kelompok	Kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekosistem penting 1. KTH Tunas Baru desa anyar 2. Kelompok pecinta alam pesisir Pulau dua 3. Kelompok segara biru 4. kelompok budidaya ikan laris manis (Mangrove) 5. KTH. Alam sejahtera Kopo kab. Serang Kelompok TSL 1. sugar Glider serang 2. jumulka serang 3. conan reptil serang 4. kelompok pedagang burung Pandeglang	= 5 + 4 = 9 Kelompok	9 Kelompok	100	

No.	Indikator	Metode/Rumus Perhitungan	Penjelasan Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab	Target	Realisasi			Capaian (%)	Keterangan
							Isian Data	Pembilang/ Penyebut	Nilai/Hasil		
20	Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Indikator Kerja Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan IK=(% IK Peningkatan Kompetensi+% IK Pelayanan)/(Total % IK) x 100 %	Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan adalah Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Parameter Kualitas Lingkungan dan Pelayanan Pengujian Parameter Lingkungan Kepada Masyarakat	DINAS LHK	KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	21.8 Persen	Penambahan Parameter Lingkup Akreditasi dari Tahun 2024 direncanakan sebanyak 4 parameter dari 81 parameter sampai dengan tahun 2026 Indikator kerja lingkup akreditasi=(28 parameter)/(81 parameter) x 100%=34,6 % Pembinaan Mutu Laboratorium lingkungan Tahun 2024 melaksanakan bimbingan teknis laboratorium lingkungan Kab/Kota se Provisis Banten Direncanakan sebanyak 30 orang dengan dengan rencana sampai tahun 2026 sebanyak 100 orang dan Realisasi sebanyak 7 orang untuk pelatihan internal saja hai ini karena anggaran bimbingan teknis tidak tersedia di tahun 2024 Indikator kerja pembinaan mutu=(7 orang)/(100 orang) x 100%=7 % Pengujian dan analisis Sampel Uji Tahun 2024 direncanakan sebanyak 21 sampel, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan internal sampai dengan tahun 2026 sebanyak 600 sampel dan realisasi sebanyak 161 sampel pada tahun 2024 Indikator kerja Pengujian dan analisis=(161 sampel)/(600 sampel) x 100%=26.8 % Pelayanan Pengujian dan Analisa Parameter Kualitas Lingkungan Eksternal Tahun 2024 direncanakan sebanyak 300 sampel dengan rencana s/d 2026 sebanyak 1000 sampel dan realisasi sebanyak 347 sampel pada tahun 2024 Indikator kerja Pengujian dan analisis=(347 sampel)/(1000 sampel) x 100%=34.7 % Total % IK dihitung dari = Tahun 2022 + Tahun 2023 + Tahun 2024 + Tahun 2025+ Tahun 2026 $= 92 + 99,6 + 103,3 + 106,6 + 72 = 473,5$	IK= (34,6 + 7 + 26.8 + 34.7)/473,5 x 100= 100,3/473,5=21.8 %	21.8 Persen	100	
22	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat = Jumlah Bibit tanaman yang dibagikan ke masyarakat dibagi Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia dikali 100%	Bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif bersertifikat yang terdistribusi sesuai permohonan masyarakat atau lembaga	DINAS LHK	KEPALA UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	90 Persen	Jumlah bibit tanaman yang dibagikan sebanyak : 112.640 batang jumlah bibit tanaman bersertifikat yang tersedia sebanyak : 113.650 batang	= (112.640 / 113.650) x 100	99.12 Persen	110,13	
23	Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura	Pengelolaan tahura meliputi pengelolaan hutan konservasi untuk kepentingan Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, pelestarian budaya dan potensi flora, fauna serta sarana prasarana penunjangnya.	DINAS LHK	KEPALA UPTD TAHURA BANTEN	100 Persen	= % Pengelolaan perlindungan dan rehabilitasi tahura + % Pengelolaan pengembangan dan pemanfaatan Tahura =50% + 50 % =100 %	=50% + 50 % =100 %	100 Persen	100	

3.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada Tahun 2024 tidak ada Kebijakan Strategis spesifik yang ditetapkan yang langsung terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 3.5 Kebijakan Strategis yang ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	-	-	-

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada Tahun 2024 tidak ada Tindaklanjut Rekomendasi DPRD dikarenakan pada tahun sebelumnya DPRD Provinsi Banten rapat LKPJ Tahun 2023 tidak memberikan Catatan/Rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja/serapan anggaran yang dicapai.

Tabel 3.6 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindaklanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
-	-	-	-

PENUTUP

LKPJ TA-2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN 2024**

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memberikan keterangan yang akuntabel dan memberikan gambaran kinerja DLHK Provinsi Banten yang telah dilaksanakan selama periode satu tahun.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2024 berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.